

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENATAAN
KAWASAN KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTUNG
KOTA BATAM**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**PUDJI ASTUTI
L4D003119**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENATAAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTUNG KOTA BATAM

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

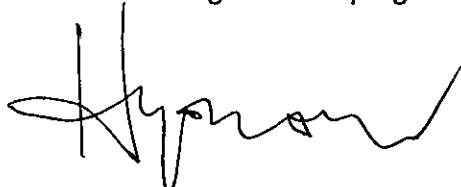
PUDJI ASTUTI
L4D003119

Diajukan Pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal Agustus 2005

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik


Semarang, Agustus 2005

Pembimbing Pendamping



Ir. Hadi Wahyono, MA

Pembimbing Utama



Ir. Parfi Khadiyanto, MSL

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.

Sepanjang sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, Agustus 2005

Penulis,

PUDJI ASTUTI

L4D003119

UPT-PUSTAK-UNCP	
No. Daft:	4217/T/MTWK/c1
Tgl.	10/5-06

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT sehingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul "*Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam,*" yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan menempuh Program Pasca Sarjana Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (MPWK) Universitas Diponegoro, Semarang.

Selesainya thesis ini tidak lepas dari peranan dan dukungan yang telah diberikan, dan pada kesempatan yang berbahagia ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA selaku Ketua Program
2. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP., selaku Sekretaris Program
3. Bapak Ir. Parfi Khadiyanto, MSL, selaku pembimbing.
4. Bapak Ir. Hadi Wahyono, MA, selaku co-pembimbing.
5. Bapak Ir. Fadjar Hari Mardiansjah, MT, MDP, selaku penguji 1
6. Samsul Ma'arif SP,MT, selaku penguji 2
7. Suami, anak-anak dan menantu maupun seluruh keluarga yang sangat saya cintai dan banggakan: Ir. H. Danial M. Yunus MM, Meta Andansari ST, Adi Nugroho ST, Aninda Dwi Saksana dan Mira Ambarsari yang telah memberikan semangat, dukungan, doa dan waktunya
8. Rekan-rekan kerja di Bappeko Batam dan Bappeda Propinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan bantuan dan dorongan
9. Bapak Ir. Supriyanto MT ketua kelas beserta teman-teman seperjuangan Mahasiswa MPWK Angkatan 2003 di Batam dan Tanjung Pinang

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu mohon kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Terima kasih.

Semarang, Agustus 2005

Penulis

Pudji Astuti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	12
1.3.1. Tujuan Penelitian	12
1.3.2. Sasaran Penelitian	12
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	13
1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah	13
1.4.2. Ruang Lingkup Materi	15
1.5. Kerangka Pemikiran	17
1.6. Metodologi Penelitian	19
1.6.1. Pendekatan Penelitian	19
1.6.2. Kerangka Analisis	19
1.6.3. Kebutuhan Data	22
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	30
1.6.5. Teknik Sampling	33
1.6.6. Teknik Analisis	34
1.7. Sistematika Pembahasan	42
BAB II KAJIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
2.1. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	46
2.2. Persepsi Masyarakat Dalam Penataan Kawasan	49
2.3. Partisipasi Masyarakat (<i>Community Participation</i>)	58
2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	66
2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan ...	66
2.4.2. Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	68
2.5. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan	69
2.6. Faktor-faktor Yang Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Kawasan	70
2.6.1. Karakteristik Masyarakat	70
2.6.2. Faktor Kelembagaan	73
2.6.3. Faktor Keuangan	76
2.7. Permasalahan Partisipasi Masyarakat	79

2.7.1.	Permasalahan Partisipasi Masyarakat Ditinjau dari Proses Pembangunan.....	79
2.7.2.	Permasalahan Partisipasi Masyarakat Ditinjau dari Pelaku Partisipasi.....	80
2.8.	Rumusan Kajian Teori	82
 BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI		
3.1.	Kondisi Eksisting Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	94
3.1.1.	Letak dan Lokasi	94
3.1.2.	Kondisi Tata Ruang	96
3.1.3.	Kondisi Partisipasi Masyarakat Tanjung Buntung	101
3.2.	Kebijakan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	103
3.2.1.	Rencana Tata Ruang Kawasan	103
3.2.2.	Program Partisipasi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung	109
 BAB IV KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENATAAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTUNG, KOTA BATAM		
4.1.	Kajian Kesesuaian Kebijakan dan Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam dengan Kondisi Kawasan	115
4.2.	Kajian Potensi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	125
4.2.1.	Kelompok Usia	126
4.2.2.	Agama	126
4.2.3.	Tingkat Pendidikan	128
4.2.4.	Mata Pencaharian	129
4.2.5.	Tingkat Pendapatan	130
4.2.6.	Stratifikasi Sosial	131
4.2.7.	Rangkuman Kajian Karakteristik Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung	133
4.3.	Kajian Implementasi Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	135
4.4.	Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	140
4.5.	Kajian Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi dan Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Kawasan	157
4.6.	Kajian Rekomendasi Penataan Kawasan	162
 BAB V PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	175
5.2.	Rekomendasi	178
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Proses Analisis	21
TABEL I.2	Hubungan Antara Analisis, Data dan Variabel	23
TABEL I.3	Kebutuhan Data	29
TABEL I.4	Jenis dan Jumlah Narasumber	34
TABEL I.5	Kerangka Analisis Penelitian	39
TABEL II.1	Rangkuman Kajian Teori	87
TABEL IV.1	Kajian Perbandingan Kebijakan dan Rencana Dengan Kondisi Kawasan.....	118
TABEL IV.2	Kajian Program Pelibatan Masyarakat Dalam Penataan Kawasan Tanjung Melayu Buntung	122
TABEL IV.3	Permasalahan dan Usulan Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	156

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Peta Wilayah Studi	14
GAMBAR 1.2	Kerangka Pikir	18
GAMBAR 1.3	Diagram Kerangka Analisis	20
GAMBAR 1.4	Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif: Model	35
GAMBAR 1.5	Komponen-komponen Analisis Data Kualitatif: Model Interaktif	38
GAMBAR 2.1	Hubungan Pemampu Yang dimampukan	60
GAMBAR 2.2	Alur Aktivitas Partisipasi Masyarakat	64
GAMBAR 3.1	Peta Wilayah Studi	95
GAMBAR 3.2	Wisata Rakyat	97
GAMBAR 3.3	Pola Permukiman Penduduk	98
GAMBAR 3.4	Jalan dan Drainase	99
GAMBAR 3.5	Dermaga Rakyat (Pelantar).....	100
GAMBAR 3.6	Peta Rencana Blok Peruntukan Kampung Melayu Tanjung Buntung	106
GAMBAR 4.1	Hubungan Antar Kebijakan, Rencana dan Kondisi Kawasan dalam Penataan Kawasan Tanjung Melayu Buntung.....	125

ABSTRAK

Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam masih bersifat top down planning dan belum dapat diimplementasikan karena proses perencanaan penataan kawasan tersebut belum melibatkan persepsi dan partisipasi masyarakat. Pada hakekatnya proses penyusunan suatu kawasan yang baik melibatkan unsur-unsur masyarakat agar dalam imlementasinya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga pembangunan akan dapat berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mendorong keterlibatan masyarakat.

Lingkup wilayah penelitian adalah Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang merupakan kampung nelayan kumuh, namun mempunyai potensi pariwisata yang belum dikembangkan.. Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2000 telah melaksanakan penyusunan Rencana Penataan Kawasan di kampung ini dalam upaya untuk melestarikan adat istiadat dan budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa kebijakan dan rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung serta karakteristik masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung yang didapatkan dari survey instansional. Sedangkan data primer berupa: implementasi kegiatan penataan kawasan, persepsi masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung serta faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Data primer diperoleh dari wawancara terhadap nara sumber yang merupakan tokoh kunci (key person) yang terlibat dan memahami mengenai penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yang menggunakan beberapa tahapan setelah data terkumpul, yang meliputi tahapan reduksi data dan penyajian data sebelum dilakukan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Dari hasil identifikasi dan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam, Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dialokasikan untuk kawasan permukiman. Selain kebijakan ruang yang tertuang dalam RTRW Kota Batam. Kebijakan mengenai penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung juga tertuang dalam Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan dan Program Partisipasi Masyarakat.

Dalam penelitian ini juga diidentifikasi karakteristik masyarakat setempat dari aspek: kelompok usia, agama, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan serta stratifikasi sosial. Sedangkan berdasarkan persepsi masyarakat, terdapat beberapa usulan program dari masyarakat berkaitan dengan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Program-program tersebut antara lain adalah: pemberian kejelasan status kepemilikan tanah/lahan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaan potensi wisata rakyat, serta pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana lingkungan. Dalam penelitian ini juga dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi yang berkaitan dengan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Kata Kunci: Persepsi, Partisipasi Masyarakat, Penataan Kawasan

ABSTRACT

Area Management Plan of Kampung Melayu Tanjung Buntung, Batam City is still a top down planning. The plan cannot be implemented yet because it has not involved the community participation in the plan-making process which caused lack of support from the community. Ideally, an area development process should involve every part of the community so that the implementation will be supported by the community and the development can be maximal. According to the situation, it is important to carry on a survey to identify the community perception on the area management plan policy of Kampung Melayu Tanjung Buntung in Batam City and to examine the factors which can motivate the community participation.

The survey area was Kampung Melayu Tanjung Buntung of Bengkong Laut Village Batu Ampar Subdistrict in Batam City which was a slum fishermen area but also a potential tourism. In 2000, the Local Government had made an Area Management Plan for the kampong in order to conserve its culture and tradition. The needed data in the survey were primary data and secondary data. The secondary data consist of the policy, the area management plan, and the community characteristic and profile of Kampung Melayu Tanjung Buntung based on the institutional survey. The primary data were the implementation of area management activities, community perception on area management plan, and the factors that influenced and motivated community participation in the area management. The primary data were based on the interview with a key person who was directly involved and understood the area management of Kampung Melayu Tanjung Buntung Batam City.

The qualitative analysis was used in this research and carried on some steps i.e. collecting data, reduction process, presentation, and making conclusion/verification.

The identification and the study concluded that based on the region space design plan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) of Batam City, Kampung Melayu Tanjung Buntung was allocated for housing area. Besides in the region space design plan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), the area management policy of Kampung Melayu Tanjung Buntung would be found in the region space design plan (Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW) and Area Management Plan of Kampung Melayu Tanjung Buntung which regulated Area Space Design Plan and Community Participation Program.

The research also identified the local community characteristics from the following aspects: age group, religion, education level, occupation, income, and social stratification. Based on the community perception, there were some suggested programs included land ownership clarification, income improvement, local potential tourism management, neighborhood infrastructures and facilities improvement and development. The research also studied on the factors that influenced and motivated the community involvement in area management in order to formulate a recommendation on Area Management of Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Key words: Perception, Community Participation, Area Management

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk-bentuk desentralisasi baru yang telah diberlakukan sejak era reformasi telah merubah proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perundangan dan Peraturan yang diterbitkan pada masa desentralisasi baru berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, sistem keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah serta administrasi dan organisasi pemerintah daerah, telah memberikan perubahan yang signifikan pada konstelasi proses, produk, koordinasi, organisasi dan manajemen serta aktor yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan pembangunan itu sendiri pada dasarnya merupakan amanat dari rakyat seluruh bangsa di dunia yang mendambakan kemajuan, terpenuhinya kebutuhan dan tercapai tingkat kemakmuran yang diinginkan. Pembangunan dilakukan dengan cara dan aturan tertentu yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan arah kemajuan tataran kehidupan yang diinginkan. Kebijakan pembangunan dalam suatu negara pada hakekatnya dapat didelegasikan kepada daerah-daerah yang merupakan wilayah kekuasaan negara, sehingga memunculkan wacana pembangunan daerah melalui upaya otonomi daerah.

Sementara itu, salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan pada era otonomi daerah adalah melalui upaya pelibatan masyarakat. Upaya pelibatan masyarakat, merupakan tugas dan tanggungjawab bersama dari seluruh *stakeholders* pembangunan, yaitu: Pemerintah (Pusat, Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan), kalangan dunia usaha/swasta, kalangan lembaga swadaya

masyarakat, organisasi sosial/politik, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya tak terkecuali.

Keterkaitan yang erat antara pelibatan masyarakat dengan kegiatan pembangunan menuntut adanya sinkronisasi kegiatan pembangunan yang dimulai dari perencanaan pembangunan, dilanjutkan pada implementasi dan monitoring evaluasi. Adapun proses dari perencanaan pembangunan sebagaimana telah dilaksanakan pada era pemerintahan sebelumnya adalah bertumpu pada konsep *bottom-up planning*, yang dimulai dari kelompok masyarakat paling rendah dengan permasalahan bersifat lokal sampai dengan kelompok masyarakat yang lebih luas dengan permasalahan yang semakin kompleks pula. Secara bertingkat dan setelah melalui proses seleksi maka rencana pembangunan yang memerlukan penanganan lebih seksama akan terakumulasi pada yang lebih tinggi, bahkan jika tidak memungkinkan diselesaikan di tingkat daerah dapat dibahas ke tingkat propinsi ataupun nasional.

Oleh karena itu, perencanaan memerlukan reposisi dan penggunaan paradigma baru dalam perencanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih demokratis dan partisipatif, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perencanaan. Nilai-nilai baru yang diperkenalkan dalam perencanaan pembangunan daerah, antara lain adalah :

1. Perubahan pendekatan sektoral kepada pendekatan isu-isu strategis
2. Pendekatan pengelolaan isu-isu strategis
3. Menekankan pada perencanaan jangka menengah dan strategis
4. Perubahan pendekatan '*top down*' kepada pendekatan kemitraan
5. Perencanaan dan pembangunan daerah berorientasi kinerja

6. Perencanaan partisipatif ke arah demokratisasi perencanaan pembangunan
7. Keleluasaan dan kewenangan lebih besar pada daerah dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah
8. Transparansi dan akuntabilitas
9. Perencanaan nasional lebih sebagai '*blue print*' dan cenderung bersifat sebagai 'pedoman'

Perubahan paradigma perencanaan tersebut ternyata telah didukung dan bahkan disyaratkan pada berbagai dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan, termasuk yang berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan pelibatan masyarakat bidang penataan ruang, seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/756/OTDA perihal Penyusunan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal; dan Permendagri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Singkatnya, berdasarkan perubahan paradigma perencanaan dan dukungan dari peraturan yang ada, kebutuhan perencanaan pembangunan partisipatif tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Kewajiban dalam pemeliharaan kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial setiap orang terhadap pemanfaatan ruang. Pelibatan masyarakat di bidang penataan ruang bertujuan agar masyarakat ikut memahami, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas ruang penataan ruang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 pasal 6 disebutkan dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk:

1. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
2. Berlaku tertib dalam keikutsertannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan negara menekankan tentang kedudukan, peranan, keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini bila diturunkan pada tingkat kawasan, dimana proses penyelenggaraan penataan ruang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting, sebab penataan ruang merupakan kepentingan seluruh lapisan masyarakat, serta untuk tercapainya atau terselenggaranya penataan ruang yang memberdayakan masyarakat, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Perkembangan fisik, ekonomi, sosial dan budaya Kota Batam yang sedang berlangsung hingga saat ini sangatlah pesat, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam pelaksanaannya yang dimulai dari proses perencanaannya sampai pembangunannya kurang mengikutsertakan dan memperhatikan peran serta masyarakat. Sehingga dalam pembangunan tersebut sentuhan-sentuhan yang memperkuat "citra Batam" sebagai kota yang memiliki 'akar' budaya Melayu Riau Kepulauan belum terlihat nyata. Sentuhan budaya Melayu dirasakan sangat penting terutama untuk pengembangan wilayah-wilayah perkampungan tua yang merupakan kawasan kampung Melayu yang keberadaannya sudah sejak sebelum dimulainya

pembangunan di P. Batam ini. Beberapa kampung Melayu yang terdapat di Kota Batam, seperti: Kampung Melayu Tanjung Uma, Kampung Melayu Tanjung Riau, Kampung Melayu Pulau Seraya, Kampung Melayu Batu Besar dan Kampung Jabi, Kampung Melayu Sei Kasam, Kampung Melayu di Pulau Galang dan Kampung Melayu Tanjung Buntung, sampai saat masih belum tersentuh pembangunan fisik, bahkan telah mengalami proses *marginalisasi* (terpinggirkan). Kondisi ini menyebabkan Kampung melayu yang ada tersebut perkembangannya jauh tertinggal dibandingkan dengan pemukiman- pemukiman baru yang muncul belakangan. Namun demikian Pemerintah Kota Batam terus mengupayakan berbagai terobosan dan upaya agar perkembangan Kampung Melayu tersebut tidak terlalu jauh dengan daerah pemukiman baru lainnya. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota diantaranya adalah menyusun Peraturan Daerah yang akan mengatur perlindungan Kampung Tua sebagai kawasan yang perlu untuk dilestarikan keberadaannya. Namun dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah tersebut belum dapat berjalan seperti yang diinginkan, hal tersebut disebabkan karena status lahan semua Perkampungan Melayu di Kota Batam merupakan Hak Pengelolaan Otorita Batam sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam yang sampai sekarang masih berlaku. Adanya status lahan yang masih kurang jelas tersebut menimbulkan perkembangan kampung-kampung tersebut menjadi terhambat, sehingga menimbulkan kondisi lingkungan permukiman di kampung Melayu tersebut menjadi kurang tertata dan kondisi sanitasinya relatif buruk. Di samping itu juga umumnya kampung Melayu tersebut belum mempunyai kelengkapan sarana dan

prasarana lingkungan dan cenderung memiliki kualitas lingkungan buruk sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Demikian juga halnya dengan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang merupakan kawasan yang diambil dalam penelitian ini. Seperti halnya kampung nelayan lainnya kampung ini juga memiliki kualitas lingkungan dan sanitasi juga buruk sebagai akibat dari proses *marginalisasi* (terpinggirkan) dari proses pembangunan Kota Batam. Untuk mengeliminasi hal tersebut di atas melalui dana bantuan dari Provinsi Riau pada tahun 2000 Kampung Melayu ini dilaksanakan penataan bersama-sama dengan kampung Melayu lainnya, walaupun apabila dikaji lebih lanjut penataan ini terkesan mubazir karena kebanyakan kampung Melayu khususnya kampung Melayu Tanjung Buntung hanya mempunyai penduduk sangat relatif sedikit. Namun, Pemerintah Kota Batam mempunyai harapan besar agar kampung Melayu tersebut dapat melestarikan adat-istiadat dan budaya Melayu yang saat ini dikuatirkan semakin berkurang akibat semakin banyaknya pendatang yang ikut mendiami lahan-lahan di kawasan Kampung Melayu tersebut. Di samping itu juga upaya Pemerintah Kota ini adalah salah satu harapan agar Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dikembangkan mengingat kawasan wisata yang ada berpotensi dapat mendukung program Pemerintah Kota untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan. Awalnya proses penataan lingkungan dan pengembangan diharapkan dapat menjadi alat untuk menarik bantuan dana baik dari pemerintah Pusat maupun dari investor swasta dalam mengembangkan kawasan- kawasan kampung tua di Kota Batam. Kegagalan penataan lingkungan dan pengembangan wisata di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama disebabkan

karena program pembangunan yang dilakukan bersifat *top-down*. Artinya program penataan lingkungan dan pengembangan kawasan berasal dari pemerintah, tanpa adanya persepsi masyarakat sebagai masukan disamping itu juga pelibatan masyarakat tidak ada dan belum diperhatikan dalam penataan lingkungan dan pengembangan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai apakah belum adanya persepsi masyarakat terhadap rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung menjadi sebab belum diimplementasikan pelaksanaan penataan kawasan Tanjung Buntung serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan, sehingga akhirnya dapat direkomendasikan suatu program yang dapat diimplementasikan baik oleh Pemerintah Kota, pihak swasta dan masyarakat itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam masih bersifat *top down planning* dalam artian, proses perencanaan penataan kawasan tersebut belum melibatkan partisipasi masyarakat pada proses penyusunan rencana penataan kawasan tersebut. Peran dan partisipasi masyarakat berupa tinjauan dan komentar terhadap rencana penataan kawasan yang merupakan peran yang paling sederhana dari masyarakat dalam penataan kawasan tersebut belum muncul. Bentuk dari tinjauan dan komentar tersebut merupakan persepsi masyarakat terhadap suatu produk rencana.

Implementasi penataan Kawasan Tanjung Buntung selama ini secara umum mengalami permasalahan klasik, yaitu hasilnya belum seperti yang diharapkan. Dalam pengadaan prasarana, misalnya, menurut Kodoatie (2003:158) pengadaan prasarana secara terpusat (*top-down approach*) seringkali kurang mencerminkan kebutuhan setempat sehingga kurang dimanfaatkan dan kurang dipelihara oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan adanya persepsi masyarakat yang kurang merasa memiliki dan menganggap pengadaan infrastruktur itu hanya tanggungjawab pemerintah saja.

Boleh jadi fenomena tersebut juga terjadi di Kawasan Tanjung Buntung, meski belum terdapat legitimasi resmi namun indikasi kecenderungannya hampir sama. Misalnya, rencana penataan yang telah disusun belum dapat diimplementasikan seperti yang diharapkan. Secara umum hal itu sering dinyatakan sebagai “mampu merencanakan namun tidak mampu mengimplementasikannya”, yang berdampak pada pemborosan anggaran

perencanaan pembangunan. Hal mana pada hakekatnya akan menjadi beban yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan.

Masyarakat Kawasan Tanjung Buntung pada umumnya masih belum memperlihatkan sikap yang jelas terhadap permasalahan perencanaan penataan kawasan tempat tinggalnya. Hal ini ditandai dengan kecenderungan kurangnya perhatian dan peranserta mereka terhadap proses penyusunan/ pengusulan rencana penataan dari tingkat paling bawah, yaitu usulan tingkat RT dan dusun. Kecenderungan tersebut berlanjut pada Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan (Musbangdes) di tingkat Desa bahkan sampai diskusi Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan.

Indikasi adanya apatisme tersebut mungkin kesemuanya bermuara pada tidak dilibatkannya mereka didalam proses penyusunan rencananya. Sebagaimana dinyatakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2003:316-317) bahwa dalam kegiatan perencanaan pembangunan di daerah selama ini, masyarakat tidak mendapatkan tempat yang tepat di dalam proses perencanaannya.

Hal tersebut juga dimungkinkan berawal dari kegiatan perencanaan penataannya yang cenderung lebih banyak bertumpu pada masukan dari pemerintah dibanding masukan dari masyarakat. Sehingga produk perencanaan yang dihasilkan tersebut pada umumnya dimungkinkan belum cukup dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat Kawasan Tanjung Buntung.

Suatu permasalahan pembangunan yang muncul pada dasarnya tidak berdiri sendiri akan tetapi selalu berkaitan dengan hal lain, atau setidaknya dipengaruhi oleh unsur-unsur masukannya. Permasalahan dalam implementasi pembangunan di Kawasan Tanjung Buntung di atas kiranya dapat dikaji dari

upaya penyusunan rencana penataan kawasan sampai upaya menggerakkan partisipasi masyarakat yang terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Kendala tersebut kiranya akan cukup mempengaruhi keberhasilan mekanisme perencanaan penataan yang lebih partisipatif, yang secara timbal balik akan mempersulit upaya pemberdayaan masyarakat di Kawasan Tanjung Buntung. Pemberdayaan masyarakat sendiri diyakini menjadi salah satu penopang utama *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yang berkembang pesat sejalan dengan reformasi kebijakan nasional dengan penetapan otonomi daerah.

Dari uraian tersebut di atas, beberapa permasalahan yang perlu diketengahkan kembali antara lain adalah:

1. Dalam kebijakan penataan kawasan seharusnya terdapat mekanisme perencanaan yang memberi wadah berupa forum musyawarah yang (secara otomatis) sebenarnya dapat memberdayakan masyarakat. Namun terdapat kecenderungan bahwa pada umumnya masyarakat enggan berpartisipasi dalam forum musyawarah tersebut.
2. Kawasan Tanjung Buntung sebenarnya cukup berpeluang dan potensial untuk membangun dirinya mengingat adanya potensi wisata, namun sejauh ini kondisi yang ada ternyata: kualitas SDM masih kurang memadai, angka pendapatan masyarakat masih rendah sehingga persentase keluarga miskin masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya belum berdaya atau belum mampu memberdayakan dirinya.
3. Meski belum terdapat kajian yang seksama mengenai implementasi penataan kawasan di Tanjung Buntung, namun terdapat indikasi adanya kelemahan dan kekurangan dalam proses perencanaannya, yaitu minimnya peranserta masyarakat.

4. Berbagai permasalahan tersebut seharusnya mampu mendorong masyarakat untuk semakin memanfaatkan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang secara kontinyu dilaksanakan setiap tahun. Namun, pada kenyataannya masyarakat lebih tertarik berpartisipasi pada forum musyawarah perencanaan bagi program/kegiatan yang sudah jelas dananya.
5. Hal tersebut pada gilirannya akan menyulitkan upaya penerapan *good governance* yang mensyaratkan kesejajaran peran dan tanggungjawab pemerintah, masyarakat dan swasta serta *stakeholder* lainnya dalam pembangunan, sesuai porsi masing-masing. Oleh sebab itu perlu peningkatan peranserta dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, yang dimulai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam mekanisme perencanaan penataan kawasan.
6. Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan penataan kawasan yang juga meliputi perencanaan pengadaan prasarana, masih dilakukan secara terpusat (*top down approach*), yang seringkali kurang mencerminkan kebutuhan setempat, yang disamping itu juga berakibat kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Hal tersebut pada akhirnya akan menimbulkan adanya persepsi masyarakat yang menjadi kurang merasa memiliki dan menganggap pengadaan infrastruktur itu tanggungjawab pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diangkat akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu ”*Bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam dan faktor-faktor apakah yang dapat mendorong pelibatan masyarakat?*”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji persepsi masyarakat terhadap kebijakan rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mendorong pelibatan masyarakat.

1.3.2. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini antara lain adalah:

1. Mengkaji kesesuaian kebijakan dan rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dengan kondisi kawasan.
2. Mengkaji potensi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
3. Mengkaji implementasi kegiatan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
4. Mengkaji persepsi masyarakat terhadap penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
5. Mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
6. Merekomendasikan kebijakan yang perlu dilakukan dalam penataan Kawasan Kampung Melayu Kota Batam.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah

Untuk lebih memfokuskan penelitian sehingga dapat menghasilkan keluaran yang optimal, diambil wilayah penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan Kampung Melayu di Kota Batam terletak di Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan kota.
2. Terjadi proses pemberdayaan dalam penataan kawasan.

Berangkat dari kriteria tersebut, setelah dilakukan pengamatan pendahuluan serta studi literatur, dipilih kawasan yang dapat mewakili obyek penelitian, yaitu Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam. Kawasan ini dapat dijadikan sebagai kajian untuk melihat aspek pemberdayaan dalam penataan kawasan. Lebih jelasnya mengenai kawasan penelitian Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilihat dalam gambar berikut.



MAGISTER TEKNIKPEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO - SEMARANG

TESIS

PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP RENCANA PENATAAN KAWASAN
KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTING,
KOTA BATAM

**PETA
WILAYAH STUDI**

LEGENDA:

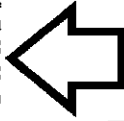
- Jalan
- Garis Pantai
- Saluran
- Batas Kawasan
- Permukiman

SKALA:

0 5,5 11 m

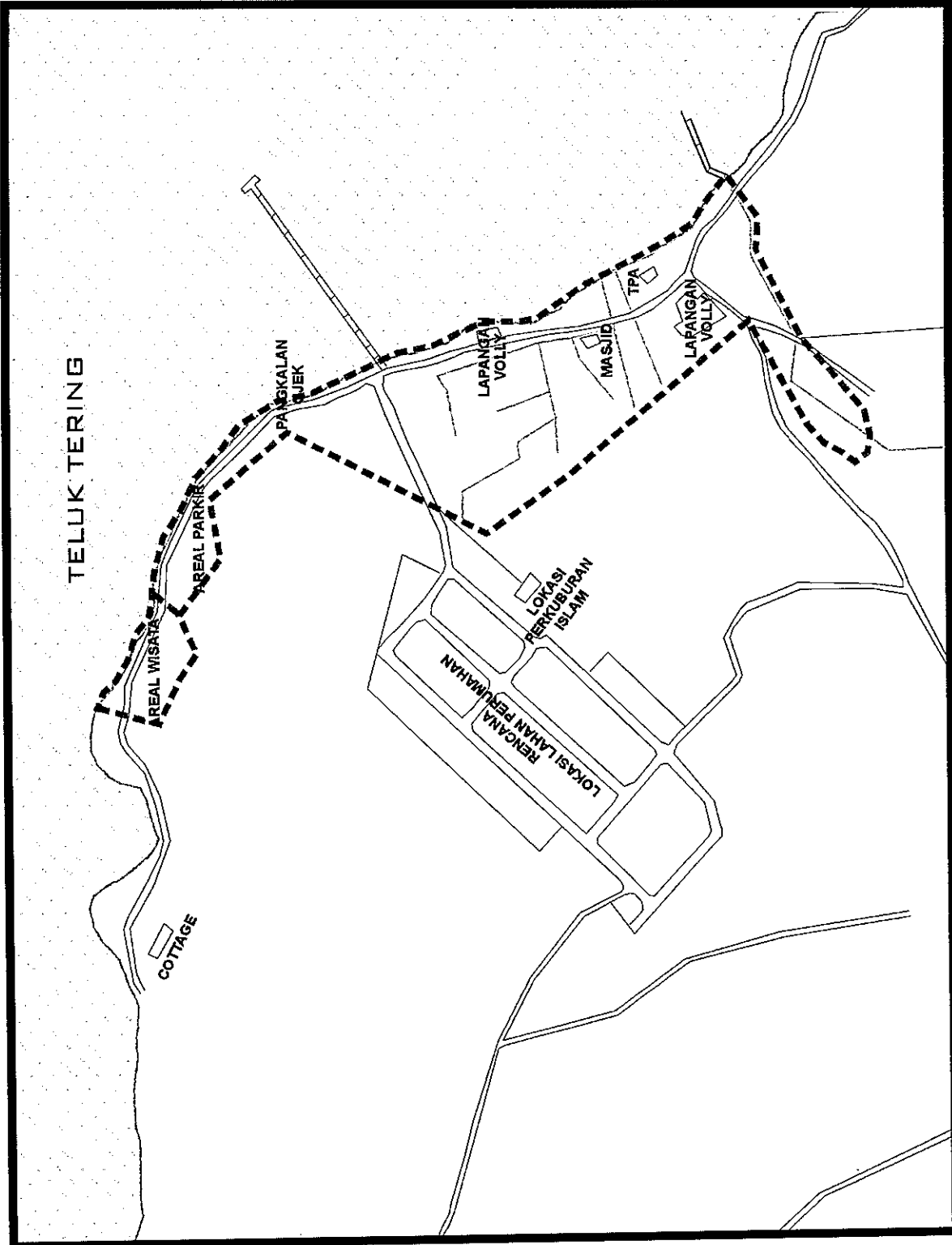
SUMBER:
HASIL SURVEY

UTARA



GAMBAR 1.1

HALAMAN
14



1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Lingkup materi yang dikaji dalam penelitian ini mencakup :

1. Kajian Kesesuaian Kebijakan dan Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dengan Kondisi Kawasan.

Dalam kajian ini membandingkan kebijakan tata ruang dan Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dengan kondisi eksisting di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Kebijakan tata ruang yang dimaksud adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam terutama Rencana Pemanfaatan Ruang dan Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas. Sedangkan kajian kesesuaian Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Kawasan (di dalamnya mengatur Rencana Pemanfaatan Ruang, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan serta Rencana Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan) serta terhadap Program Partisipasi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung (di dalamnya terdapat Rencana Partisipasi Masyarakat dan Rencana Pengorganisasian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan).

2. Kajian Potensi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.

Kajian potensi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung dilakukan terhadap jumlah penduduk berdasarkan usia yang masuk dalam kategori usia produktif, jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut, tingkat pendidikan masyarakat, mata pencaharian, tingkat pendapatan serta stratifikasi sosial yang ada.

3. Kajian Implementasi Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.

Kajian ini mengkaji seberapa jauh kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung telah dilaksanakan, hambatan-hambatan dan permasalahan apa saja yang dihadapi serta mengkaji potensi kawasan yang dapat dijadikan sebagai faktor pendukung kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

4. Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Tanjung Buntung Kota Batam.

Kajian ini mengkaji persepsi masyarakat terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung serta usulan program yang harus dilakukan.

5. Kajian Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi dan Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terdiri dari: karakteristik masyarakat, faktor kelembagaan dan faktor keruangan.

6. Kajian Rekomendasi Penataan Kawasan Kampung Melayu Kota Batam

Dalam kajian ini dijelaskan mengenai program-program apa saja yang seharusnya dilakukan dalam rangka Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang terbagi dalam tahap-tahap pelaksanaan, serta strategi pelibatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam penataan kawasan.

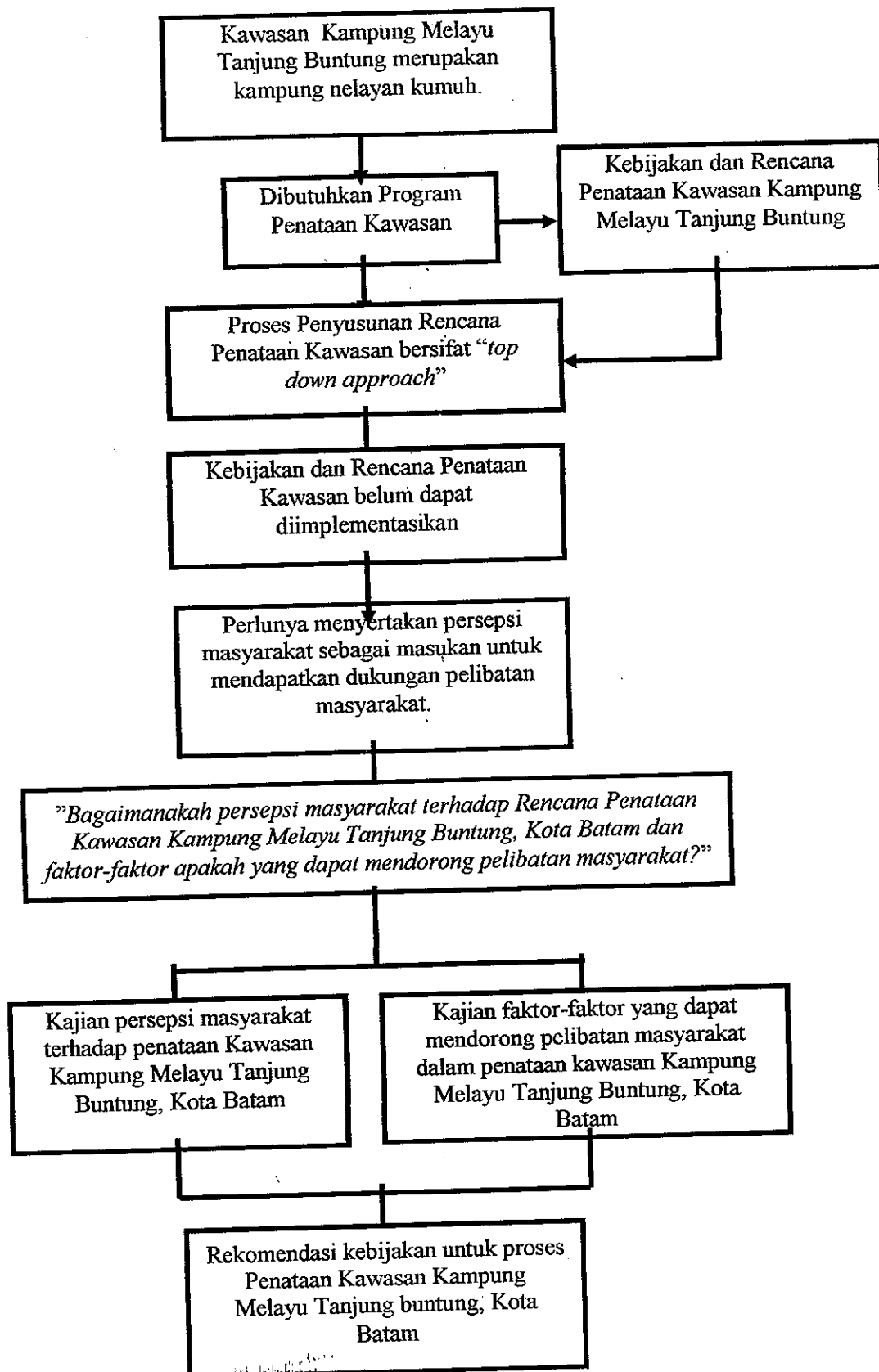
1.5 Kerangka Pemikiran

Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung ini ditekankan kepada korelasi hubungan antara kebijakan penataan kawasan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dengan implementasinya di lapangan yang dikaitkan dengan peran persepsi dan pelibatan masyarakat pada proses perencanaannya.

Kajian ini hanya dibatasi pada peran pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan saja dan tidak mengkaji faktor-faktor lain penyebab belum diimplementasinya rencana penataan kawasan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam.

Hasil akhir yang akan dicapai pada kajian ini akan berupa kesimpulan dari keseluruhan yang berkaitan faktor-faktor penyebab belum dilibatkan persepsi masyarakat terhadap rencana penataan disamping faktor-faktor yang dapat mendorong pelibatan masyarakat. Hasil kajian tersebut kemudian akan direkomendasikan untuk dilaksanakan implementasinya pada Pemerintah Kota, swasta, stakeholder lainnya dan bahkan masyarakat Tanjung Buntung itu sendiri.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian persepsi masyarakat dalam penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam dapat dilihat dalam Gambar 1.2.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.6. Metodologi Penelitian

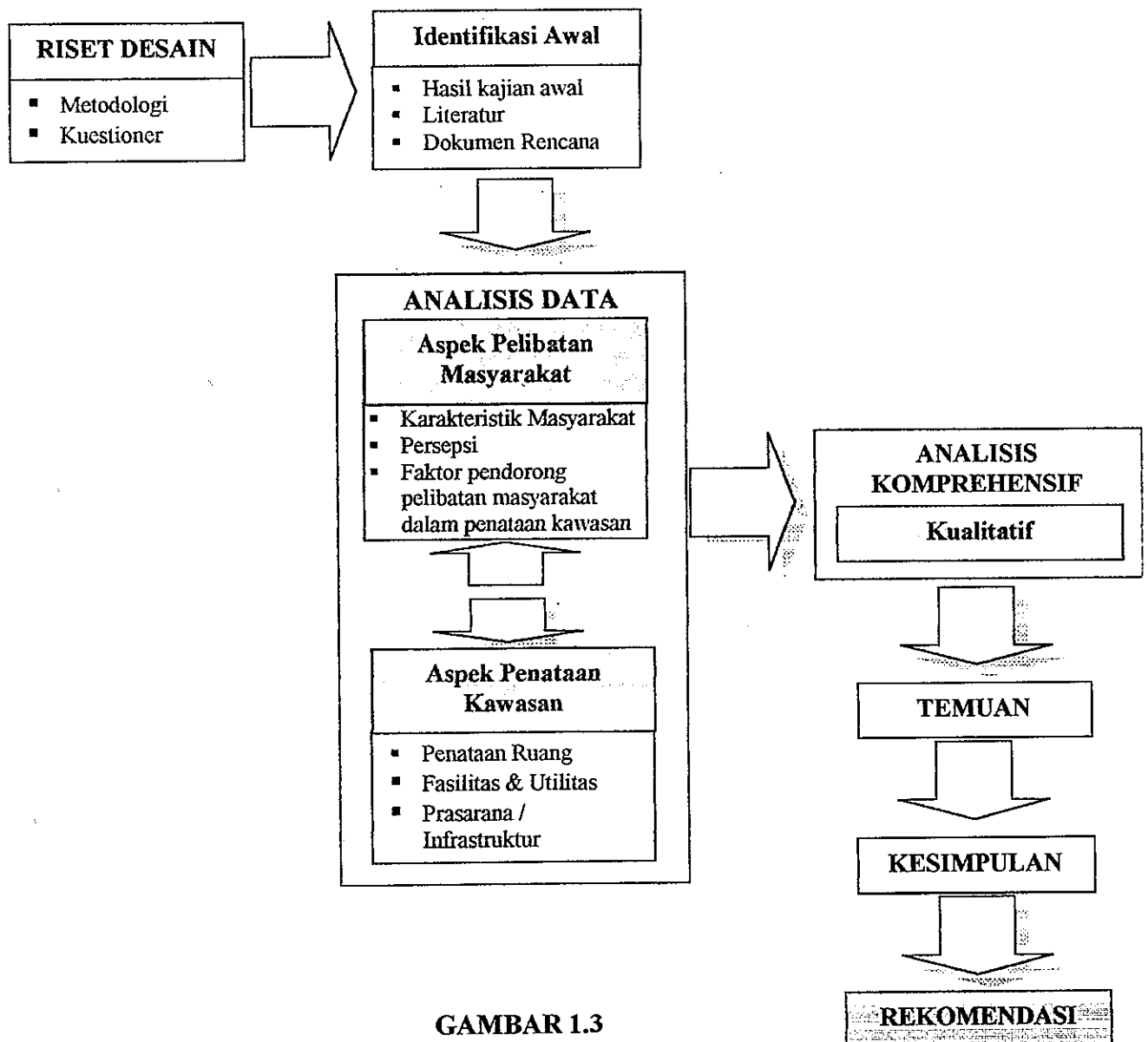
1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan salah satu cara mencapai tujuan dan sasaran penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam”. Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kajian Kesesuaian Kebijakan dan Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dengan Kondisi Kawasan.
2. Kajian Potensi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
3. Kajian Implementasi Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
4. Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Tanjung Buntung Kota Batam.
5. Kajian Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi dan Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.
6. Kajian Rekomendasi Penataan Kawasan Kampung Melayu Kota Batam

1.6.2. Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang dilakukan pada penelitian Persepsi Masyarakat dalam Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam dapat diuraikan sebagai berikut:



GAMBAR 1.3
DIAGRAM KERANGKA ANALISIS

Sumber: Penulis, 2005

Untuk lebih jelasnya mengenai analisis-analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL I.1
PROSES ANALISIS

No	Sasaran	Data	Variabel	Teknik Analisis	Hasil Analisis
1.	Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	a. Rencana Tata Ruang Kawasan	- Rencana pemanfaatan ruang - Rencana tata bangunan dan lingkungan - Rencana penyediaan sarana pelayanan lingkungan	Kualitatif	Deskriptif Peta Tabel Diagram
		b. Program partisipasi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung	- Rencana partisipasi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung - Rencana pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan	Kualitatif	Deskriptif Tabel Diagram
2.	Karakteristik masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam	a. Karakteristik sosial	- Jumlah penduduk - Tingkat pendidikan/pengetahuan - Tingkat partisipasi dalam pembangunan	Kuantitatif Kualitatif	Deskriptif Tabel Diagram
		b. Karakteristik ekonomi	- Mata pencaharian - Tingkat pendapatan - Angkatan kerja (usia produktif)	Kualitatif	Deskriptif Tabel Diagram
3.	Implementasi kegiatan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam	a. Rencana penataan kawasan	- Rencana Tata Ruang Kawasan - Program partisipasi masyarakat	Kualitatif	Deskriptif Tabel
		b. Program yang dilakukan	- Perbaikan prasarana - Penataan obyek wisata rakyat - Perbaikan fasilitas umum dan sosial	Kualitatif	Deskriptif
		c. Sumber dana dan pelaksana	- Masyarakat setempat - Pemerintah	Kualitatif	Deskriptif
4	Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	a. Tanggapan b. Usulan	- Materi rencana - Sikap - Usulan program - Usulan anggaran biaya - Sistem pengelolaan - Peranan masyarakat dalam penataan kawasan	Kualitatif Kualitatif	Deskriptif Deskriptif Tabel Peta Diagram
5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	a. Karakteristik Masyarakat	- Jenis Kelamin - Usia - Tingkat Pengetahuan/Pendidikan - Tingkat Penghasilan - Mata Pencaharian/Pekerjaan - Agama - Kelas Sosial	Kuantitatif Kualitatif	Deskriptif
		b. Faktor Kelembagaan	- Organisasi Kemasyarakatan - Organisasi Keagamaan	Kualitatif	Deskriptif
		c. Faktor Keruangan	- <i>Sub urban</i> - Permukiman perkampungan	Kualitatif	Deskriptif
6.	Rekomendasi Kebijakan	Persepsi Masyarakat Faktor-faktor Pendorong	- Tanggapan - Usulan - Faktor Internal - Faktor Eksternal	Kualitatif	Deskriptif

Sumber: Penulis, 2005

1.6.3. Kebutuhan Data

Data untuk mendukung penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap tokoh-tokoh kunci (*key persons*) yang berpengaruh dalam pengembangan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung serta pengamatan langsung pada kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam. Data/informasi yang dibutuhkan antara lain adalah:

a. Implementasi kegiatan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

- Kegiatan penataan kawasan yang telah dilakukan
- Sumber pendanaan
- Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kegiatan penataan kawasan

b. Persepsi masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam.

- Tanggapan terhadap rencana penataan kawasan
- Usulan program
- Keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan

c. Faktor-faktor yang dapat mendorong pelibatan masyarakat yang terdiri dari: karakteristik masyarakat, faktor kelembagaan dan faktor keruangan.

2. *Data Sekunder*, yaitu data yang bukan dari diusahakan sendiri dalam pengumpulannya, diperoleh dari instansi terkait dalam penelitian. Data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Dokumen Rencana Penataan Kawasan
- b. Karakteristik Masyarakat

Lebih jelasnya mengenai data diperlukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL I.2
HUBUNGAN ANTARA ANALISA, DATA DAN VARIABEL

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat
Identifikasi kebijakan dan rencana penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	Rencana tata ruang kawasan	Pemanfaatan Ruang	Permukiman	Berciri budaya Melayu		Survry Instansional
			Fasilitas Sosial dan Umum	SD		
				Puskesmas Pembantu		
				Perdagangan		
		Wisata	Pantai Teluk Tering			
			Susur hutan baku			
		Tata Bangunan dan Lingkungan	Perpetakan/persil KDB	Maksimal 200 m ²		
			Ketinggian Bangunan	15 m		
			GSB	2-3 kali Damija		
			Pola arsitektur bangunan	Rumah panggung		
	Atap limasan					
	Terdapat beranda					
	Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan	SD				
		Balai Adat				
	Program partisipasi masyarakat	Kemitraan dengan lembaga (stakeholder)	Konsultan pembangunan			
			Pemko Batam dan Bappeko Batam			
			Dinas terkait			
			Operator swasta			
		Rencana pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan	Kelompok kerja pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman	Unit kerja administrasi		
				Unit kerja fasum		
Unit kerja fasos						
Kelompok kerja pengelolaan lingkungan	Unit kerja administrasi	Unit kerja jalan & drainase				
		Unit kerja budaya Melayu dan Informasi				
		Unit kerja fasilitas				

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat
				wisata darat		
				Unit kerja fasilitas wisata laut		
				Unit kerja perawatan lingkungan alam		
				Unit kerja pelatihan dan workshop seni		
Identifikasi Karakteristik Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam	Karakteristik sosial	Jumlah penduduk	Sex Ratio	Laki-laki		
				Perempuan		
		Kelompok umur	Usia produktif			
			Usia non produktif			
		Tingkat pendidikan	Pendidikan terakhir	Tamat Sekolah Dasar		
				Tamat SMP		
				Tamat SMA		
				Tamat Akademi/Perguruan Tinggi		
			Belum/tidak sekolah			
		Tingkat partisipasi masyarakat	Potensi partisipasi	Kelembagaan di tingkat lokal		
				Semangat kebersamaan yang tinggi	Gotong royong	
					Perasaan senasib	
			Motivasi untuk maju			
	Kendala partisipasi	Perbedaan kepentingan	Lembaga-lembaga desa kurang maksimal			
	Karakteristik ekonomi	Mata pencaharian	PNS			
			Buruh			
			Pedagang			
			Wiraswasta			
		Tingkat pendapatan	Tinggi	> Rp. 3 juta		
Sedang			Rp. 1 jt - 3 jt			
Rendah			< Rp. 1 juta			
Angkatan kerja		Usia produktif	15-54 tahun			
		Usia non-produktif	0-14 tahun			
			> 55 tahun			
					Survey Instansional Wawancara	

Lanjutan

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat	
Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	Tanggapan	Materi Rencana	Pemanfaatan Ruang	Permukiman	Berciri budaya Melayu	Wawancara	
				Fasilitas sosial dan fasilitas umum	SD	Wawancara	
					Puskesmas Pembantu	Wawancara	
					Perdagangan	Wawancara	
				Wisata	Pantai Teluk Tereng	Wawancara	
					Susur hutan baku	Wawancara	
			Tata Bangunan dan Lingkungan	Perpetakan/persil	Maksimal 200 m ²	Wawancara	
				KDB	30-40%	Wawancara	
				Ketinggian Bangunan	15 m	Wawancara	
				GSB	2-3 kali Damija	Wawancara	
				Pola arsitektur bangunan	Rumah panggung	Wawancara	
					Atap limasan	Wawancara	
					Terdapat beranda	Wawancara	
					Ornamen lebat menggantung	Wawancara	
	Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan	SD		Wawancara			
		Balai Adat		Wawancara			
	Sikap	Setuju		Wawancara			
		Tidak Setuju		Wawancara			
	Usulan	Usulan Program	Perbaikan Lingkungan	Sanitasi	Air bersih	Wawancara	
					MCK	Wawancara	
					Drainase	Wawancara	
				Jalan	Jalan Desa	Wawancara	
					Jalan Lingkungan	Wawancara	
				Dermaga		Wawancara	
				Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	Obyek Wisata		Wawancara
					Ruang Parkir		Wawancara
					Tempat ibadah (mesjid)		Wawancara
				Usulan Anggaran Biaya	Besarnya Anggaran	Perbaikan lingkungan	
Pembangunan Fasos dan Fasum		Wawancara					
Sumber		Pemerintah	Wawancara				
		Masyarakat	Wawancara				
		Swasta	Wawancara				

					ra
		Sistem Pengelolaa n	Kerjasama	Pemerintah	Wawanca ra
				Masyarakat	Wawanca ra
				Swasta	Wawanca ra
	Peranan masyaraka t dalam penataan kawasan	<i>Informing</i>	Masyarakat memperoleh gambaran program	Wawanca ra	
			Tidak terlibat dalam pelaksanaan program	Wawanca ra	
		<i>Consultation</i>	Tukar informasi antara masyarakat dan perencana	Wawanca ra	
			Masyarakat mulai terlibat dalam program	Wawanca ra	
		<i>Partnership</i>	Masyarakat dan pemerintah berkedudukan sama	Wawanca ra	
			Masyarakat berpartisipasi penuh dengan menyampaikan ide, aspirasi dan kreativitasnya	Wawanca ra	
		<i>Delegated Power</i>	Masyarakat memegang kendali kekuasaan	Wawanca ra	
	Kedudukan pemerintah di bawah masyarakat		Wawanca ra		
		<i>Citizen Control</i>	Masyarakat memegang kendali penuh	Wawanca ra	

Lanjutan

Analisis	Data	Variabel	Atribut	Kriteria	Parameter	Perangkat	
Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam	Karakteristik Masyarakat	Jenis Kelamin	Laki-laki				
			Percempuan				
		Usia	Kelompok Umur				
			Usia Produktif			15 – 54 tahun	
			Usia Non Produktif			0 – 14 tahun dan > 55 tahun	
		Tingkat Pengetahuan/ Pendidikan	Tidak Sekolah				
			Lulus SD				
			Lulus SMP				
			Lulus SMA				
			Akademi				
		Tingkat Penghasilan	Sarjana				
			Rendah				< Rp. 1 juta/bulan
		Mata Pencarian	Sedang				Rp. 1 juta – 2,5 juta/bulan
	Tinggi					> Rp. 2,5 juta/bulan	
	Nelayan						
	Agama	Petani					
		Pedagang					
		PNS					
		Lainnya					
	Kelas Sosial	Islam					
		Katholik					
		Protestan					
	Faktor Kelembagaan	Hindhu					
Budha							
Pemuka Agama							
Pemuka Masyarakat							
Faktor keruangan	Perangkat Pemerintahan						
	Pengusaha						
Kajian Rekomendasi Kebijakan	Pesepsi masyarakat	Tanggapan	Materi Rencana	Pemanfaatan Ruang		Hasil Analisis	
			Sikap	Tata Bangunan & Lingkungan			
		Usulan	Usulan Program	Penyediaan Sarana Lingk.			
			Usulan Anggaran Biaya	Setuju			
			Sistem Pengelolaan	Tidak Setuju			
			Peranan masyarakat dalam penataan kawasan	Perbaikan Lingkungan			
	Perkampungan		Pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				
	Faktor-faktor yang pengaruh & pendorong	Karakteristik Masyarakat	Jenis Kelamin	Besarnya Anggaran			
			Usia	Sumber			
			Tingkat Pengetahuan/ Pendidikan	Kerjasama			
			Tingkat Penghasilan	Informing			
			Mata Pencarian	Consultation			
			Agama	Partnership			
Kelas Sosial			Delegated Power				
Faktor Kelembagaan	Organisasi Kemasyara-katan	Citizen Control					
	Organisasi keagamaan						
Faktor keruangan	Sub Urban						
	Perkampungan						

Sumber: Penulis, 2005

TABEL I.3
KEBUTUHAN DATA

No.	Data	Variabel	Jenis Data	Sumber Data
1	Rencana penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana tata ruang kawasan ▪ Program partisipasi masyarakat 	Sekunder	Survey Instansional (Pemda Kota Batam, Bappeko Batam)
2	Karakteristik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok usia ▪ Jumlah penduduk menurut agama ▪ Tingkat pendidikan ▪ Mata pencaharian ▪ Tingkat pendapatan ▪ Stratifikasi sosial 	Sekunder Prmer	Survey Instansional (Pemda Kota Batam, Bappeko Batam) Wawancara
3	Implementasi Kegiatan Penataan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program yang telah dilakukan ▪ Sumber pendanaan ▪ Permasalahan berkaitan dengan implementasi kegiatan penataan kawasan 	Primer	Wawancara
4	Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggapan ▪ Usulan program 	Primer	Wawancara
5	Faktor-faktor yang Dapat Mendorong Pelibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Karaktersitik Masyarakat ▪ Faktor Kelembagaan ▪ Faktor Keruangan 	Primer Sekunder	Wawancara Observasi lapangan Survey Instansional
6	Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan. ▪ Pemberian masukan dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang ▪ Pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang ▪ Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan ▪ Bantuan tenaga ahli ▪ Bantuan dana 	Sekunder	Literatur, Kebijakan Pemerintah

Sumber: Penulis, 2005

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yang terdiri dari (Marzuki, 2002:55-56):

1. Data Sekunder

Merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan maupun publikasi lainnya serta laporan-laporan.

2. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data tersebut menjadi data sekunder kalau dipergunakan orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara atau interviu adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan alat yang ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau yang dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan. Adapun wawancara itu sendiri berguna untuk :

- Mendapatkan data di tangan pertama (primer).
- Pelengkap teknik pengumpulan lainnya.

- Menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Salah satu teknik pengumpulan data kualitatif adalah wawancara mendalam. Instrumen yang digunakan di sini, yaitu pedoman wawancara. Jika angket dimaksud untuk menjangkau responden yang jumlahnya relatif banyak, wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

Lebih jauh, tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Adapun jenis wawancara menurut prosedurnya:

1. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin), adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan orang yang diwawancarai.
2. Wawancara terpimpin, adalah wawancara yang menggunakan pokok-pokok masalah yang diteliti. Ciri pokoknya pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data yang relevan dengan maksud penelitian yang dipersiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab untuk memudahkan kelancaran wawancara.
3. Wawancara bebas terpimpin, adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti

situasi, pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interviu berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap tokoh kunci (*key person*) yang mengetahui secara rinci masalah dengan jalan dialog/bercakap-cakap/berhadapan langsung. Seorang *interviewer* (pewawancara) menggunakan *guide* (panduan) wawancara yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam panduan wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi kualitatif yang mendalam mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap topik yang ditentukan. Karakteristik peserta sebaiknya mencerminkan populasi yang diinginkan.

Wawancara dan diskusi dilakukan dengan *stakeholders* untuk mengetahui berbagai aspek antara lain:

- Pengetahuan narasumber terhadap karakteristik kawasan studi.
- Tanggapan terhadap rencana penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam
- Program penataan kawasan yang telah dilakukan
- Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan implementasi rencana penataan kawasan.
- Usulan program yang berupa: perbaikan lingkungan dan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- Usulan sistem pengelolaan.
- Peranan/posisi masyarakat dalam penataan kawasan.

Dalam penelitian ini wawancara mendalam yang dipilih menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin (atau bebas terstruktur), setelah

mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan masing-masing teknik wawancara. Hal ini mengingat bahwa teknik campuran ini masih memberi kebebasan kepada responden dalam batas tertentu, namun juga tidak terlalu memberi ruang bagi penyimpangan masukan responden dari topik bahasan. Responden terpilih diminta untuk memberikan tanggapan mengenai variabel penelitian yang telah ditetapkan, meskipun variabel tersebut masih dimungkinkan untuk berubah (bertambah luas) sesuai masukan pendapat responden. Persepsi responden mengenai variabel tersebut menjadi penopang utama dalam penelitian ini.

b) Pengamatan Lapangan (Observasi Lapangan)

Beberapa informasi yang diperoleh dari pengamatan lapangan terutama yang berbentuk fisik lingkungan. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kondisi kawasan yang sebenarnya dengan menggunakan alat bantu seperti: alat pemotret, alat perekam suara, alat pengukur dan sebagainya.

1.6.5. Teknik Sampling

Untuk mengumpulkan data primer dapat digunakan teknik *sampling* (teknik pengambilan sampel). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2002:56). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berupa tokoh kunci (*key person*) yang terlibat dan memahami mengenai penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam. Tokoh-tokoh kunci yang diambil berupa:

tokoh masyarakat, pemuka agama, Ketua Rukun Warga (RW) serta Ketua Rukun Tetangga (RT) serta masyarakat lainnya di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Jumlah tokoh kunci atau narasumber yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL I.4
JENIS DAN JUMLAH NARASUMBER

NO	JENIS NARASUMBER	JUMLAH	KETERANGAN
1	Ketua RW (Rukun Warga)	1	RW 22
2	Ketua RT (Rukun Tetangga)	3	RT 1, RT 2 dan RT 3
3	LKMD/BPD	3	
4	Karang Taruna	2	
5	Pemuka Agama	4	Kiai, ulama
6	Pemuka Masyarakat	4	Pengusaha
7	Masyarakat Awam	3	
JUMLAH		20	

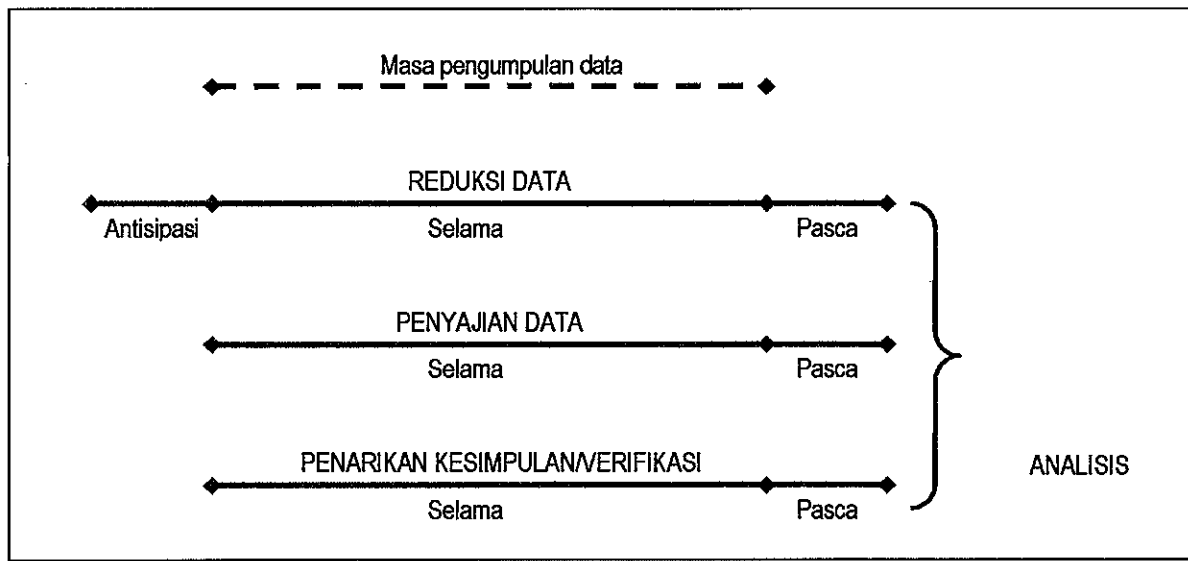
Sumber: Penulis, 2005

1.6.6. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: *reduksi data*, *penyajian data* dan *penarikan kesimpulan/ verifikasi*. Teknik analisis yang dipilih dalam penelitian ini juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada

waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Lebih jelasnya mengenai alur analisis data kualitatif dapat dilihat dalam gambar berikut.



GAMBAR 1.4
KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA KUALITATIF: MODEL ALIR

Sumber: Miles dan Huberman (1992:16)

Lebih lanjut dinyatakan bahwa *reduksi data* berarti proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama kegiatan berorientasi kualitatif berlangsung. Sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisis, membuat memo). Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis, melainkan merupakan bagian dari analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana saja yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan-pilihan yang analitis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

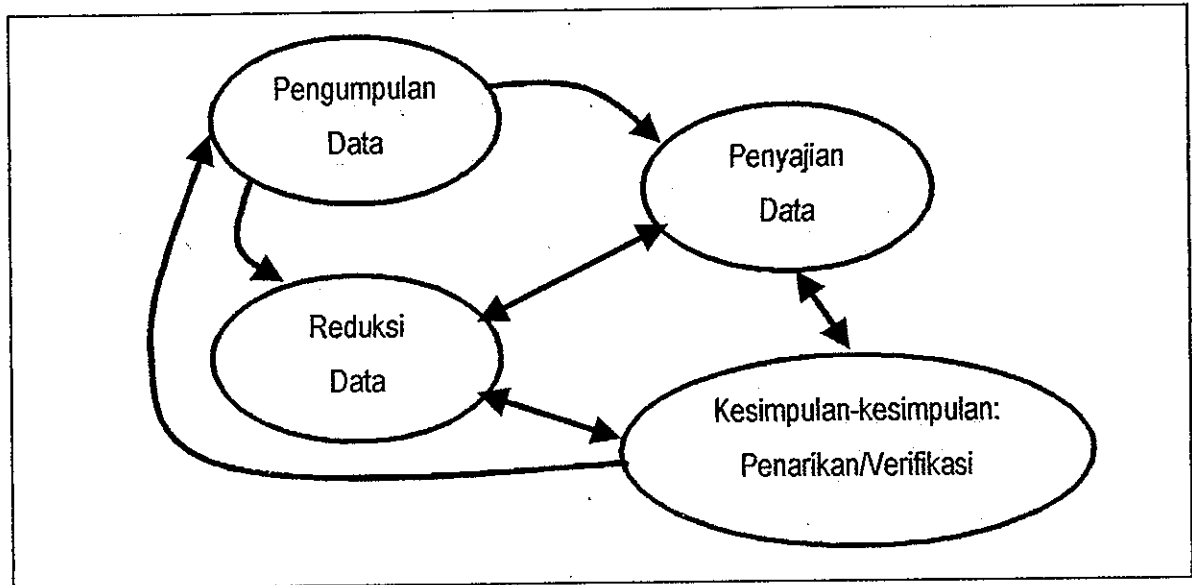
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah *penyajian data*, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ia merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah *menarik kesimpulan dan verifikasi*. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar,

tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa penarikan kesimpulan, hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan "intersubjektif". Atau juga upaya-upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

GAMBAR 1.5
KOMPONEN-KOMPONEN ANALISIS DATA KUALITATIF:
MODEL INTERAKTIF



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Dalam gambar di atas tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus.

Penelitian kualitatif ini pada dasarnya mengadopsi ketiga alat analisis kualitatif tersebut, namun penggunaannya disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam konteks terapan, penelitian ini lebih banyak berupaya mengemukakan dan memberikan penjelasan (deskripsi) mengenai fenomena yang terkait dengan variabel penelitian. Sehingga proses pelaksanaannya lebih banyak menggunakan

teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun kerangka analisis dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL I.5
KERANGKA ANALISIS PENELITIAN

No	INPUT	PROSES	OUTPUT
1.	<p>a. Data sekunder kebijakan pemerintah daerah tentang perencanaan penataan kawasan. (Input 1a)</p> <p>b. Data primer dan sekunder kebijakan pemerintah pembangunan yang partisipatif (program partisipasi masyarakat. (Input 1b)</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif. (Proses 1)</p>	<p>Kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan dan pembangunan yang partisipatif (Output 1).</p>
2.	<p>Data primer pendapat dan persepsi narasumber tentang realita implementasi dalam perencanaan pembangunan dan usulan penataan kawasan. (Input 2)</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif. (Proses 2)</p>	<p>Persepsi masyarakat terhadap rencana penataan kawasan (Output 2)</p>
3.	<p>a. Data sekunder kebijakan pemerintah tentang perencanaan pembangunan partisipatif. (Input 3a)</p> <p>b. Data primer karakteristik masyarakat dan karakteristik kawasan (Input 3b)</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif. (Proses 3)</p>	<p>Faktor-faktor pendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan (Output 3).</p>
4.	<p>Abstraksi Output 1,2,3 (Input 4)</p>	<p>Analisis deskriptif kualitatif. (Proses 4)</p>	<p>Kesimpulan dan rekomendasi. (Output 4)</p>

Sumber: Penulis, 2005

▪ **Analisis Deskriptif Kualitatif (1)**

Analisis ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan dan pembangunan yang partisipatif. Data yang dibutuhkan dalam analisis ini berupa data primer maupun sekunder yang meliputi data kebijakan pemerintah daerah tentang perencanaan penataan kawasan dan pembangunan partisipatif. Analisis ini mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, berkaitan dengan perencanaan penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam serta pembangunan kawasan yang partisipatif dari data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait maupun observasi lapangan maupun dari wawancara terhadap narasumber. Hasil akhir dari analisis tersebut menghasilkan kebijakan pemerintah daerah tentang penataan kawasan dan pembangunan yang partisipatif.

▪ **Analisis Deskriptif Kualitatif (2)**

Pada bagian ini terdiri dari kegiatan analisis dari masukan data hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai tanggapan dan persepsi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan dan usulan penataan kawasan. Peneliti berusaha semaksimal mungkin menggali masukan dari narasumber untuk memudahkan dalam analisis. Secara umum narasumber dibawa kepada pembicaraan sesuai variabel penelitian, namun masukan-masukan dari narasumber di luar hal tersebut sepanjang masih relevan dengan tujuan penelitian sangat dihargai.

Masukan-masukan tersebut dianalisis dengan 3 (tiga) alat utama dalam penelitian kualitatif. Sehingga meskipun dalam penelitian kualitatif senantiasa

terikat dengan ruang dan waktu (konteks) penelitian, namun berdasarkan data yang diperoleh senantiasa diungkapkan berbagai fakta apa adanya. Meski pada saat mengali data, peneliti mencoba mendekati diri semaksimal mungkin pada narasumber untuk memahami konteks jawaban atau pernyataan dari narasumber. Pada saat melakukan analisis lanjutan, hasil wawancara tersebut disikapi dengan cara lain agar hasil analisis secara keseluruhan dapat lebih baik dan memadai.

▪ **Analisis Deskriptif Kualitatif (3)**

Dalam analisis ini mencoba untuk mengambil intisari peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penataan kawasan yang tercantum dalam kebijakan pemerintah serta kondisi eksisting yang ada berupa karakteristik kawasan dan karakteristik masyarakat (potensi ekonomi, sosial, politik, kebudayaan). Dari hasil analisis ini dapat dirumuskan faktor-faktor pendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan serta bentuk-bentuk pelibatan masyarakat dan kontribusi masyarakat dalam penataan kawasan yang partisipatif.

▪ **Analisis Deskriptif Kualitatif (4)**

Analisis terakhir ini dilakukan berdasarkan hasil analisis ketiga yang dicoba untuk diabstraksikan dan direfleksikan lebih jauh, guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang perlu ditempuh. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berupa rencana penataan kawasan yang partisipatif dalam artian merupakan aspirasi dari masyarakat setempat. Selain itu juga dirumuskan bentuk-bentuk keterlibatan/partisipasi masyarakat dan kontribusinya dalam penataan kawasan sehingga penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam lebih partisipatif.

1.7 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis penulisan tesis ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam penyusunan tesis ini diperlukan suatu alur yang diawali dengan latar belakang mengapa diperlukan kajian ini, rumusan masalah yang ada, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam bab ini diulas tentang teori-teori yang diharapkan dapat digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari: pembangunan berkelanjutan, persepsi masyarakat dalam penataan kawasan, partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan, faktor-faktor yang mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan dan permasalahan partisipasi masyarakat serta rumusan kajian teori.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kondisi eksisting kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang meliputi: letak dan lokasi, kondisi karakteristik masyarakat, kondisi tata ruang, serta kondisi partisipasi masyarakat, dan kebijakan penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

BAB IV KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP RENCANA PENATAAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTUNG, KOTA BATAM

Bab ini menjelaskan mengenai kajian kesesuaian kebijakan dan rencana penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam, kajian potensi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung, kajian implementasi kegiatan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, kajian persepsi masyarakat terhadap penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, kajian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan serta kajian rekomendasi penataan kawasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

KAJIAN PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Penataan ruang kawasan nelayan pada penerapannya bertolak pada lingkup kawasan, yaitu kawasan kampung. Pada area-area kawasan nelayan di perkotaan, kompleksitas penataan menjadi sangat tinggi karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi yang spesifik dengan karakter nelayan, perkembangan usaha nelayan pada posisi sektor informal kota, karakter sosial masyarakat dan fisik lingkungan yang spesifik daerah perairan (sungai, muara dan laut).

Pembangunan komunitas berakar dari teori-teori *humanistic_planning*. Berkaitan dengan itu, teori-teori tentang partisipasi, *societal guidance*, *societal learning* dan perencanaan advokasi dapat digunakan. *Societal guidance* adalah teori mengenai apa dan bagaimana membangun konsensus terutama dalam visi dan cara membangun. *Societal_learning* adalah teori yang ingin menghilangkan kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki masyarakat awam dengan perencana profesional dan penentu kebijakan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif. Sedangkan Perencanaan Advokasi adalah perencanaan yang secara sadar melakukan pemihakan pada yang lemah.

Masyarakat madani hanya tercipta dari sebuah komunitas yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan. Menurut Etzioni, partisipasi berkaitan dengan proses pembebasan manusia, sedangkan proses pembebasan hanya bisa direalisasi oleh manusia bebas. Dengan kata lain, pembangunan

komunitas pertama-tama harus difokuskan pada usaha membebaskan manusia dari realitas yang menghambat eksistensi, yakni hambatan yang berupa ketidaksederajatan, tekanan, ancaman, ketakutan, dan penindasan dari pihak eksternal yang merasa lebih berpengetahuan, berpangkat, berjabatan dan lain sebagainya.

Namun demikian, bila kita mau jujur hampir di setiap lini profesi kehidupan masih berakar sikap-sikap munafik dan feodalisme terutama pada golongan yang berpengetahuan, berpangkat, berjabatan untuk kecenderungan menindas pihak yang lemah. Dengan perkataan lain, bila kita ingin membangun masyarakat madani, dimana masyarakat bisa bebas berpartisipasi, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghapuskan kultur penindasan ini. Mereka yang berpengetahuan, berpangkat, berjabatan harus bisa mewujudkan jargon kuno "*to lead the people, Walk behind them*", atau "*Ing madya mangun karsa, ing ngarsa sung tuladha, tut wuri handayani*".

Pemberdayaan memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif. Dalam konteks pemberdayaan, komunitas harus diberdayakan untuk merumuskannya sendiri melalui sebuah proses pembangunan konsensus diantara berbagai individu dan kelompok sosial yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko langsung (stakeholders) akibat adanya proses atau intervensi pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan fisik. Bangunan konsensus sosial inilah yang disebut sebagai societal guidance atau societal directives yang umumnya berisikan arah, tujuan, cara dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan.

2.1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Terdapat beberapa pengertian tentang pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh beberapa pihak. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development* disingkat WCED) dalam Hadi (2001: 2) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengeliminasi kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan secara implisit juga mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumberdaya alam. Konsep pembangunan berkelanjutan menyadari bahwa sumberdaya alam merupakan bagian dari ekosistem. Dengan memelihara fungsi ekosistem maka kelestarian sumberdaya alam akan tetap terjaga. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan melarutnya lingkungan dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menghendaki syarat-syarat sebagai berikut (Hadi, 2001:5-6):

1. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi.
2. Pembangunan itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat.
3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.

4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis.
5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual.

Dari definisi tersebut di atas, suatu pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan suatu dukungan dari semua pihak, tidak terkecuali adalah masyarakat setempat agar terselenggara keputusan yang demokratis. Keputusan yang demokratis mengandung arti bahwa keputusan yang diambil memuat kepentingan-kepentingan, masukan, tanggapan dan informasi dari masyarakat setempat sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat tidak hanya sebatas persepsi masyarakat, namun juga material, dana maupun tenaga.

Dalam perkembangan konsep selanjutnya, pembangunan berkelanjutan dielaborasi oleh Stren, While & Whitney dalam Budihardjo (1999: 18) sebagai suatu interaksi antara tiga sistem yaitu:

1. Sistem Biologis dan Sumberdaya
2. Sistem Ekonomi
3. Sistem Sosial

Memang dengan kelengkapan konsep berkelanjutan dalam trilogi: ekologi-ekonomi-sosial tersebut menjadi semakin menyulitkan pelaksanaannya, namun jelas lebih bermakna dan gayut dengan masalah, khususnya di negara berkembang. Dengan demikian, maka konsep pembangunan berkelanjutan berkembang lebih jauh, tidak lagi terpancang pada konsep awal yang lebih terfokus pada pemikiran kelestarian keseimbangan lingkungan semata-mata.

Dalam pembangunan berkelanjutan, faktor kualitas lebih diutamakan dari pada kuantitas, dan lebih ditujukan pada perbaikan dan peningkatan seluruh aspek kehidupan manusia untuk hari ini dan di masa mendatang. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan dapat juga diartikan sebagai perbaikan mutu kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan daya dukung ekosistem yang mendukung kehidupannya, sehingga keberadaan ekosistem akan tetap terjaga dan kualitas lingkungan tidak akan mengalami penurunan.

Dengan melaksanakan pembangunan berkelanjutan diharapkan akan dicapai kondisi ekonomi yang berkelanjutan, suatu tindakan ekonomi yang tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan, melalui peningkatan pengetahuan, penyempurnaan manajemen organisasi pemerintah dan institusi swasta, efisiensi teknis, serta penentuan kebijakan yang didasarkan pada kepentingan bersama.

Setiap pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain dan mengindahkan keberadaan kehidupan lain, dimanapun dan waktu sekarang maupun yang akan datang, di sini peran masyarakat sangat diperhatikan, terutama karena pada dasarnya semua pembangunan adalah dari dan untuk masyarakat itu sendiri, dengan demikian masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestarian hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia dalam segala aspek, termasuk keagamaan, fisik, rohani, dan budaya dengan tidak memboroskan sumberdaya alam yang ada

(terutama sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, yang tidak mempunyai kapasitas dan daya dukung lingkungan).

Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, dalam suatu proses pengembangan dan pembangunan kota mulai dari tahap perencanaan; perancangan dan penetapan strategi pembangunan serta pelaksanaan dan pengendaliannya harus lebih bertumpu pada kebutuhan (*needs*), tuntutan (*demands*) masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat, karena dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, maka masyarakat akan merasa ikut 'memiliki', dan karena ikut memiliki maka masyarakat akan merasa mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga segala sesuatu yang telah dimiliki tersebut, dengan demikian suatu proses pembangunan yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan. Sebagai langkah alternatif di mana masyarakat ikut berperan dan dilibatkan dalam proses pembangunan adalah dengan *pendekatan participatory planning* melalui forum dialog, rembung desa dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat menyamakan persepsi dan menjalin komunikasi antar aktor pembangunan.

2.2. Persepsi Masyarakat dalam Penataan Kawasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dijelaskan bahwa hak masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;

Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang terdiri dari:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana penataan kawasan tertentu yang terdiri dari:

- a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang;
- c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan atau
- f. bantuan dana.

Dari penjelasan tersebut di atas, peran serta masyarakat dalam penataan masyarakat dapat berupa persepsi terhadap rencana penataan kawasan tertentu. Persepsi tersebut berupa: saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, serta masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta alternatif rancangan penataan kawasan. Penyampaian saran,

pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan atau masukan dilakukan secara lisan atau tertulis kepada Bupati/Walikota setempat.

Peran serta masyarakat dalam penataan kawasan terutama persepsi masyarakat terhadap penataan kawasan perlu ditingkatkan melalui proses pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan cara-cara yang ditempuh antara lain:

- a. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan, bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan, dan atau pelatihan;
- b. menyebarluaskan semua informasi mengenai proses penataan ruang kepada masyarakat secara terbuka;
- c. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat;
- d. menghormati hak yang dimiliki masyarakat;
- e. melindungi hak masyarakat untuk berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, menikmati pemanfaatan ruang yang berkualitas dan penambahan nilai ruang akibat rencana tata ruang yang ditetapkan serta dalam menaati rencana tata ruang;
- f. memperhatikan dan menindaklanjuti saran, usul, atau keberatan dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penataan ruang.

Persepsi masyarakat dalam penataan kawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan yang berupa masukan, informasi, kritikan, tanggapan, pendapat, pertimbangan dan saran dalam kegiatan penataan kawasan tersebut. Jadi bentuk partisipasi tersebut berupa

pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang yang harus dipertimbangkan dan direspon dalam proses penataan kawasan baik dari proses perencanaan, implementasi program maupun dalam monitoring serta evaluasi program penataan kawasan.

Proses persamaan persepsi dan menjalin komunikasi antar aktor pembangunan perlu dilakukan karena sering terjadi pemahaman masalah, perumusan, tujuan dan ide-ide pemecahan praktis yang berbeda akibat menganganya jurang pengetahuan dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat. Pendekatan perencanaan yang sering dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut adalah dengan menggunakan *Transactive Planning* (Perencanaan Transaktif). Perencanaan Transaktif (Friedmann dalam Burke, 2004:238)) merupakan tanggapan terhadap kesenjangan komunikasi antara perencana teknis dan para klien. Untuk menutup kesenjangan tersebut, suatu rangkaian transaksi pribadi yang terus menerus dan terutama transaksi secara verbal antara perencana dan klien, sangat dibutuhkan. Friedmann juga menunjukkan bahwa tumbuhnya kaum teknokrat dari masyarakat kita menuntut adanya metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses belajar secara bersama-sama. Friedmann menjelaskan bahwa dibutuhkan suatu penggabungan sains dan teknologi dengan pengetahuan pribadi pada tahap-tahap kritis intervensi sosial guna menghindari agar pengambilan keputusan tidak berada di tangan pihak teknokrat secara eksklusif.

Perencanaan Transaktif memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari

perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu.

Pada saat pengetahuan kedua belah pihak melebur, maka persepsi dan imaji dari pihak satu terhadap pihak yang lain akan berubah, dan selanjutnya perilaku keduanya pun akan berubah. Ide awal dari perencana untuk “mengajari masyarakat” akan berubah menjadi “pelajar” (*the learners*) akan bertransformasi menjadi aksi masyarakat (*community action*) artinya “dialog saling belajar” telah merubah perilaku kolektif masyarakat dan mendorong masyarakat secara lebih aktif menolong diri mereka sendiri dan sekaligus membangun komunitas bersama seperti yang diharapkan.

Pengalaman empiris mengindikasikan bahwa bentuk operasional dalam pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan yang terpenting dan paling menentukan adalah kemitraan atau *partnership*. Dalam kemitraan, pelaku disebut sebagai *stakeholders* yaitu grup yang memiliki kepentingan dan menanggung resiko dari semua kualitas, distribusi dan penyediaan pelayanan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini struktur kemitraan atau *stakeholders groups* menjadi sangat krusial.

Di sisi lain, kemitraan selain diartikan untuk mempertemukan pendekatan dari atas dan dari bawah; para penentu kebijakan masih perlu banyak mengembangkan nilai dan ideologi yang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. *Partnership* juga masih memerlukan banyak inovasi dan reformasi institusional dalam bekerjasama dengan masyarakat, agar

pengaturan untuk kerja bersama para pengambil keputusan dari pemerintah plus seluruh pelaku yang lain (*stakeholder*) dengan komunitas, unit rumah tangga, dan CBO dapat dikoordinasikan secara lebih efektif.

Proses pembentukan *partnerships* antar *stakeholders* harus didukung oleh beberapa lembaga yang dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah mendasarkan pada pembentukan struktur *partnership* untuk mempertemukan *stakeholder* dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan potensi yang ada di kawasan. *Partnership* ini disebut sebagai “*Stakeholder Groups*” yang menangani masalah-masalah yang spesifik dengan membentuk panitia-panitia kecil dengan perencanaan yang kontinyu dalam jangka pendek sampai jangka panjang.

Ada 6 faktor kunci dalam keterlibatan *stakeholders* untuk perencanaan pengembangan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Menciptakan suatu visi masyarakat.
- b. Mengidentifikasi dan memprioritaskan *key issues* untuk memecahkan masalah yang mendesak.
- c. Mendukung masyarakat dalam menganalisa isu-isu lokal.
- d. Mengembangkan *action plan* berdasarkan pengalaman dan inovasi dari berbagai *stakeholder*.
- e. Memobilisasi sumber daya masyarakat dengan tujuan mengembangkan implementasi secara berkelanjutan.
- f. Koordinasi program dan teknik pengembangan terutama dengan pemerintah daerah.

Tahapan yang diperlukan untuk mendukung keterlibatan *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu:

- a. Menentukan lingkup perencanaan serta merumuskan tujuan dan sasaran dengan mengumpulkan kemauan dan dukungan publik. Lingkup perencanaan biasanya ditentukan oleh 5 faktor yaitu:
 - Pengembangan yang berkelanjutan dalam pengertian yang luas atau beberapa daerah prioritas pelayanan yang spesifik.
 - Area perencanaan (*neighborhood, city*).
 - Politik, geografis dan fasilitas pendukung.
 - Waktu yang mencakup penyelesaian masalah dan implementasi.
 - Sumber daya masyarakat dan institusional yang ada untuk mendukung perencanaan.
- b. Menciptakan atau mendesign suatu *Stakeholder Groups* untuk mengkoordinasikan dan memberikan pedoman perencanaan, serta mengintegrasikan hasil-hasil dikusi, penelitian, dan perencanaan dalam suatu action plan.

Partner tidak mutlak merupakan partisipan yang menyumbangkan pendapat. Tetapi mereka yang diharapkan untuk mengambil tanggung jawab dalam proses perencanaan dan hasilnya. Keterlibatan mereka didukung oleh suatu mekanisme organisasi.

Keberadaan stakeholder dapat menunjukkan kekuasaan dan kredibilitas dalam perencanaan. Forum ini dapat juga didukung dengan partisipasi antar sektor, pengumpulan informasi, dan negosiasi kesepakatan. Hal ini dapat membangun

konsensus pada suatu visi masyarakat yang strategis, tinjauan *action plan*, serta memberikan pedoman bagi pemerintah dan agen pelaksanaan lainnya.

- c. Menentukan struktur kelompok kerja di bawah supervisi *stakeholder group*. Kelompok kerja bertanggung jawab terhadap setiap tugas perencanaan yang spesifik, misalnya penyusunan prioritas, analisis masalah, pembentukan visi, implementasi, dan sebagainya. Kelompok kerja lebih memfokuskan pada masalah pokok antara lain kelompok kerja usaha kecil, perumahan, saluran, dan lain-lain.

Karena proses perencanaan pengembangan yang berkelanjutan meliputi berbagai aktivitas, maka *stakeholder group* harus membentuk suatu struktur organisasi untuk mengimplementasikan faktor-faktor yang ada dalam proses perencanaan. Untuk mendukung partisipasi masyarakat yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, *background*, sektor, dan pengalaman, maka *stakeholder group* membentuk suatu kelompok-kelompok kerja yang bersifat spesialis. Kelompok kerja ini menjalankan tugas untuk identifikasi, analisa masalah, penelitian teknis, penyusunan prioritas, *action plan* dan analisis dampak, implementasi, monitoring dan evaluasi.

- d. Mengidentifikasi rekanan yang tepat untuk berpartisipasi dalam *stakeholder group* dan kelompok kerjanya.

Perwakilan dari individu dan institusi yang tepat dapat diidentifikasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan perencanaan dan struktur. Partner-partner ini termasuk:

- *Service provider's* yaitu orang yang mengontrol dan mengatur pelayanan.
- *Service users* yaitu orang yang menggunakan dan yang dipengaruhi secara langsung oleh pelayanan tersebut.
- Pihak-pihak yang secara tidak langsung terpengaruh oleh dampak dari pelayanan tersebut.
- *Advisor*

Proses negosiasi dimulai sejak mereka berpartisipasi negosiasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan suatu keanggotaan *stakeholder group* dan menentukan kerangka kerja untuk perencanaan kemitraan.

- e. Merumuskan kerangka kerja kelompok termasuk mendefinisikan hubungan antara perencanaan *stakeholder* dengan program yang ada (pemerintah).

Kerangka kerja akan dijelaskan melalui:

- Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama dalam proses perencanaan.
- Aturan-aturan dari masing-masing partisipan dalam proses perencanaan, termasuk kegiatan spesifik yang dilakukan, informasi yang disediakan, dan skedul untuk input dan kontribusi mereka.
- Standar-standar untuk *share* informasi yang digunakan meliputi kesepakatan-kesepakatan penting.
- Metode-metode pengambilan keputusan.
- Sumber-sumber daya yang disediakan oleh masing-masing partner
- Kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana hasil-hasil perencanaan akan diintegrasikan dalam program pemerintah.

Kerangka kerja ini akan ditandatangani oleh anggota dan pemerintah daerah, dan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa hal itu *up to date*.

- f. Mengembangkan visi masyarakat sebagai dasar perencanaan.

Sumbangan terhadap visi masyarakat dapat memberi kesepakatan yang akan menuntun kelompok dalam memilih masalah (*issue*) untuk dianalisa dan negosiasi tujuan aksi, target dan rencana kerja.

Dalam sebuah proses visi, partisipan sebaiknya menyampaikan image mereka, termasuk ide yang biasanya dinilai sebagai sesuatu yang tidak realistik. Komunikasi ide-ide tersebut dapat memberikan inspirasi ambisi dan menantang dalam proses perencanaan. Hal ini juga membantu dalam klarifikasi nilai-nilai fundamental (mendasar).

2.3. Partisipasi Masyarakat (*Community Participation*)

Partisipasi pada prinsipnya adalah usaha untuk melibatkan secara nyata kelompok masyarakat dalam:

1. Merumuskan masalah, visi, tujuan dan sasaran pembangunan
2. Mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan
3. Mendorong partisipasi komunitas secara aktif dalam perencanaan, mengambil inisiatif dan melakukan aksi.

Pendekatan partisipasi masyarakat (*community participation*) merupakan pendekatan yang cocok diterapkan untuk konteks kekumuhan di dalam kota (*inner-city*) dan bukan di perdesaan (*rural area*) maupun daerah pinggiran (*urban fringe*), hal ini karena persoalan-persoalan kekumuhan yang timbul di *inner-city*

sudah sangat kompleks dan sulit.

Dengan kata lain partisipasi merupakan kunci keberhasilan program pembangunan. Pembinaan organisasi komunal hendaknya diarahkan pada pengembangan “sifat-sifat kooperatif” terhadap permukiman dan kesiapan untuk tinggal dalam kehidupan perkotaan (*inner-city*), pada kelanjutannya organisasi ini disertakan dalam *proses perencanaan* sejak perumusan masalah sampai dengan desain *engineering*-nya.

Partisipasi dalam Manifestasi Pembangunan

Secara empiris pendekatan partisipasi masyarakat dalam manifestasi pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam arti, bahwa kegiatan yang dilakukan harus mampu dan mau dilakukan oleh masyarakat, dan yang lebih penting masyarakat tahu proses pembangunan yang dilakukan. Dengan kata lain kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah: dari, oleh dan untuk masyarakat.

Hakekat Proses Partisipasi

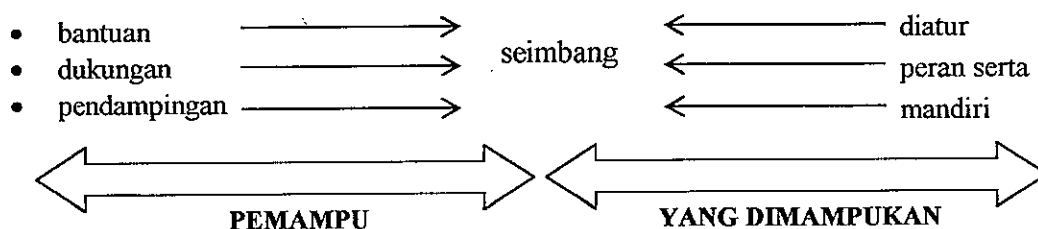
Strategi pengembangan masyarakat melalui *community participatory* ini lebih ditujukan pada bagaimana masyarakat di kawasan tersebut untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Partisipasi masyarakat (*community participation*) memberikan beberapa keuntungan baik bagi pemerintah dan masyarakat.

Keuntungan dan masalah partisipasi akan dilihat dalam konteks yang berbeda oleh setiap orang yang berkepentingan. Secara umum, keuntungan dari

partisipasi:

- a. Masyarakat akan merasa “memiliki” terhadap rencana kerja.
- b. Memungkinkan adanya ide-ide segar.
- c. Mendapat bantuan dalam bentuk barang atau sumber daya lainnya.
- d. Masyarakat akan tetap merasa menjadi bagian dari pemecahan masalah jangka panjang karena mereka telah mempunyai rasa memiliki terhadap ide-ide awal.
- e. Keikutsetaan dalam satu proyek atau program membangun kesadaran, kepercayaan dan keyakinan menjadi bagian penting pada proyek / kesempatan-kesempatan lainnya. Selain itu, keuntungan dari suatu keluaran atau “out put” yang lebih baik adalah isue “proses” membantu mengembangkan ketrampilan dan *confidence* masyarakat. Keuntungan pada umumnya berkaitan dengan Kepentingan utama yang disepakati pada tingkat partisipasi yang tepat; kesamaan bahasa untuk mendiskusikan isue dan mengembangkan ide-ide; dan Metode-metode tepat guna yang dipakai sebanyak mungkin sesuai kesepakatan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Peran partisipasi mengarah pada pembentukan iklim perimbangan antara peran “pemampu” dan peran “dimampukan”.



GAMBAR 2.1
HUBUNGAN PEMAMPU DAN YANG DIMAMPUKAN

Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat diketahui berdasarkan besarnya pengaruh yang dimiliki masyarakat di dalam proses penentuan permasalahan perencanaan beserta hasilnya, dari pengaruh yang kecil sampai kepada pengaruh yang besar. Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan terdiri dari (Burke, 2004:52-54):

1. Tinjauan dan Komentar

Masyarakat diberi kesempatan untuk meninjau suatu rencana yang diusulkan. Komentar dapat dibuat, tetapi organisasi perencanaan tidak terikat untuk mengubah atau memodifikasi rencana tersebut. Peran ini bersifat pasif, yang dirancang terutama untuk menyediakan informasi kepada masyarakat dan kelompok.

2. Konsultasi

Dengan peran ini, masyarakat diangkat dan dimintai masukan serta informasi khusus. Metode yang dipergunakan untuk memperoleh masukan adalah melalui pertemuan dan kuesioner. Peran masyarakat sebagai konsultan adalah untuk menjadi bagian dari usaha pembuatan keputusan perencanaan. Tujuan dari peran konsultasi ini bersifat lebih jauh, bukan hanya sebagai penyedia informasi bagi masyarakat. Peran ini merupakan proses komunikasi dua arah di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki keputusan di dalam perencanaan.

3. Pemberi Nasehat

Pengaruh dan peran masyarakat bersifat lebih besar karena masyarakat diangkat ke dalam organisasi dan ditempatkan pada komite kebijakan dan perencanaan di dalam organisasi perencanaan tersebut. Tujuan dari peran ini adalah untuk

memperoleh informasi maupun dukungan terorganisir untuk kegiatan-kegiatan perencanaan.

4. Pengambilan Keputusan Bersama

Peran ini menggambarkan partisipasi masyarakat dan perencana yang bertindak sebagai mitra di dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah untuk mencapai keputusan yang mencerminkan keinginan tim perencana yang di dalamnya memuat aspirasi masyarakat.

5. Pengambilan Keputusan Terkendali

Dalam peran ini, masyarakat memiliki wewenang penuh atas semua kebijakan dan keputusan perencanaan. Peran dari para staf profesional adalah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan, yaitu untuk bertindak sebagai penasehat dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh masyarakat. Peran partisipasi masyarakat ini sangat umum untuk organisasi yang bersifat sukarela.

Pendekatan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota, memungkinkan keseimbangan antara kepentingan administrasi dari pemerintah setempat dan integrasi penduduk setempat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat lokal. Terdapat 2 (dua) macam partisipasi masyarakat, yaitu (Jayadinata, 1999:201-202):

1. Partisipasi Vertikal

Penduduk diberi lebih banyak kesempatan untuk menyumbangkan pendapatnya dalam pengembangan kota. Interaksi dengan cara dari bawah ke atas (*bottom up*) dalam hal:

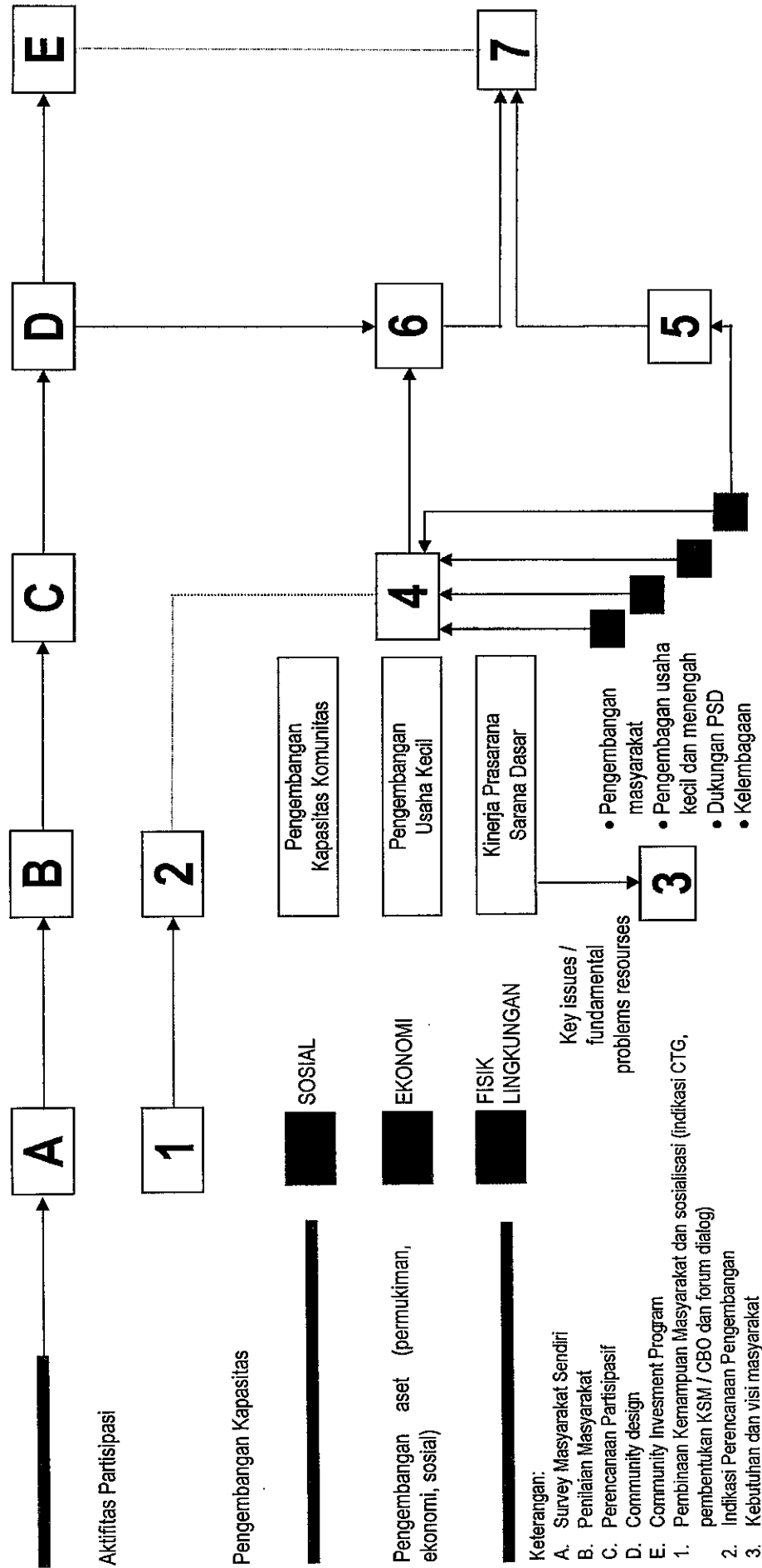
- a. Teknik belajar dan mendengarkan (masyarakat diberi informasi mengenai masalah aktual).
- b. Pengumuman informasi berhubungan dengan program yang diusulkan.
- c. Masukan yang terus dari berbagai golongan.
- d. Penelaahan kembali rencana yang diusulkan.

2. Partisipasi Horisontal

Dalam partisipasi ini masyarakat berinteraksi secara horisontal dalam hal:

- a. Masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai kelompok lain.
- b. Mengambil pengalaman dari kelompok lain.
- c. Mempengaruhi agar persentase partisipasi penduduk menjadi lebih besar.

GAMBAR 2.2 ALUR AKTIVITAS PARTISIPASI MASYARAKAT



Partisipasi masyarakat secara umum terbagi dalam 8 (delapan) tingkatan yang terdiri dari (Arstein; 1969):

1. *Manipulation*

Merupakan tingkatan partisipasi yang paling rendah, keterlibatan dan peran individu tidak ada sama sekali, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah sepenuhnya.

2. *Theraphy*

Tingkat partisipasi yang sangat rendah, pemerintah mengatur segala sesuatunya, sehingga individu merupakan obyek program.

3. *Informing*

Pada tingkatan ini, individu mulai memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari penguasa, namun tetap belum memiliki ruang gerak untuk berperan serta aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program.

4. *Consultation*

Pada tingkatan ini, mulai terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak satu dengan lainnya, yang memungkinkan keterlibatan individu dalam suatu program.

5. *Placation*

Pada tingkatan ini setiap individu yang ikut, terlibat, dan berpartisipasi dalam program akan mendapatkan imbalan berupa plakat.

6. *Partnership*

Merupakan tingkatan partisipasi yang ideal, pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam tahapan pelaksanaan program. Pada tingkat ini memungkinkan setiap individu berpartisipasi penuh dengan menyampaikan ide, aspirasi dan kreativitasnya.

7. *Delegated Power*

Pada tingkatan ini, individu/rakyat mulai memegang kendali kekuasaan, kedudukan

pemerintah berada di bawah rakyat, sehingga dominasi kekuasaan berada di tangan rakyat.

8. Citizen Control

Pada tingkatan partisipasi ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi secara penuh dan berimplikasi munculnya kegiatan-kegiatan yang menjurus anarki.

2.4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

2.4.1. Pengertian Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan penciptaan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagai hasil-hasil pembangunan secara adil (United Nations, 1981, dalam Midgley, 1986:24). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada tahap awal berupa keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penentuan tujuan-tujuan kemasyarakatan dan pengalokasian sumber untuk mencapai tujuan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Setelah rencana yang dihasilkan dari keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dalam hal pelaksanaan program-program dan proyek-proyek secara sukarela. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dalam proses pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau proyek, berdasarkan azas pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan bersama serta untuk menikmati hasil-hasil pembangunan terdiri dari 5 (lima) bentuk model dari tingkatan yang rendah sampai pada partisipasi masyarakat dalam tingkatan tertinggi. Model partisipasi

masyarakat dalam pembangunan terdiri dari:

1. Peran Serta Sebagai Penelitian Pasar

Peran serta masyarakat sebagai penelitian pasar menganggap masyarakat sebagai konsumen dan/atau pelanggan, yang dapat diminta pendapatnya, misalnya dalam jajak pendapat (survei pendapat masyarakat).

2. Peran Serta Sebagai Pembuat Keputusan

Peran serta masyarakat sebagai pembuat keputusan, masyarakat diberi kepercayaan untuk ikut membentuk badan-badan pengambilan keputusan dan mungkin bahkan menyerahkan pengambilan keputusan kepada masyarakat.

3. Peran Serta Sebagai Pemecah Oposisi yang Terorganisir (Partisipasi Retorik)

Peran serta masyarakat sebagai pemecah oposisi yang terorganisir berarti bahwa pemimpin-pemimpin golongan radikal yang cenderung beroposisi dimasukkan sebagai anggota komisi dan kredibilitas mereka diturunkan dalam pandangan pendukung-pendukungnya (dalam hal ini, masyarakat). Model peran serta ini biasanya dilakukan untuk menghindari oposisi yang merepotkan.

4. Peran Serta Sebagai *Social Therapy* (Terapi Sosial)

Peran serta masyarakat sebagai terapi sosial berarti bahwa masyarakat tidak dilibatkan terlalu banyak pada penentuan apa yang harus disediakan, tapi lebih pada proses penyediaan nyata dari pelayanan itu sendiri (semacam aktivitas kerja bakti/gotong-royong).

5. Peran Serta Sebagai *Grass-root Radicalism*

Peran serta masyarakat sebagai *Grass-root Radicalism* (radikalisme akar rumput) dapat diartikan bahwa masyarakat diorganisir untuk melawan struktur kekuasaan dengan cara apapun yang dianggap tepat dengan situasi dan kondisi yang ada, misalnya dengan

demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan, dan sebagainya. Model peran serta ini selalu timbul dengan sendirinya sebagai akibat tidak ada bentuk peran serta lainnya yang sengaja disediakan untuk masyarakat.

2.4.2. Tujuan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Penyertaan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dianggap penting didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut (Conyers, 1991):

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap pembangunan. Tanpa informasi tersebut, program-program dan proyek-proyek pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang menjadikan mereka sebagai obyek pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam pembangunan, berarti mereka bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, masyarakat mempunyai hak untuk turut *urun rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) – yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri.

2.5. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Apabila lingkup ruang tersebut dipersempit, maka ruang yang dimaksud dapat berupa kawasan yang merupakan satuan ruang dengan fungsi tertentu (misalnya: perkampungan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan sebagainya). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dicantumkan bahwa pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (kawasan) merupakan wujud pemberian porsi partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses penataan ruang (kawasan). Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara aktif tersebut tidak hanya dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan penataan kawasan saja, namun juga terlibat dalam kegiatan pencapaian tujuan bersama pada perbaikan lingkungan, yang menyangkut struktur fisik dari masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan informasi. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang (kawasan) secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:

1. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak untuk dioperasikan).
2. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi).
3. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial, dan personel).
4. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan.

Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan merupakan bentuk keikutsertaan

masyarakat dalam penataan kawasan. Dalam hal ini masyarakat memberikan sesuatu yang dimilikinya yang dapat berupa sumber daya untuk dimanfaatkan selama proses/program penataan kawasan mulai dari proses perencanaan, implementasi maupun pada proses evaluasi dan monitoring. Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Menurut Wujud Barang atau Jasa

Partisipasi masyarakat ini cenderung pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat secara individual/perorangan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan yang diberikan berupa: bahan atau material bangunan, dana/ biaya pembangunan, tenaga, pemikiran, kehadiran, dan dukungan moral/persetujuan.

2. Keterlibatan dalam Organisasi

Terdiri dari: menjadi anggota, pengurus organisasi, mengikuti kegiatan organisasi, membayar iuran organisasi dan anggota berbagai kegiatan.

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan

2.6.1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditinjau dari stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial merupakan pembagian masyarakat kedalam kelompok-kelompok masyarakat, dimana beberapa kelompok menerima penghargaan yang lebih baik dari kelompok yang lain. Hak-hak sekelompok orang berbeda dengan hak-hak kelompok-kelompok lain. Hak-hak ini selanjutnya berkaitan dengan hak dan kemampuan yang dimiliki sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Thio, 1989:210).

Komponen dalam dimensi stratifikasi sosial terdiri dari (Zanden, 1988:238):

1. Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam stratifikasi masyarakat terdiri dari kekayaan dan pendapatan (Zanden, 1988:238). Kelompok-kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan dan kekayaan yang berbeda-beda dimasukkan dalam kelas-kelas yang berbeda pula. Individu pada setiap kelas memiliki hak-hak yang berbeda-beda dalam masyarakat.

2. *Prestise* (Status)

Prestise disebut juga sebagai sistem status yang bersifat subyektif, bergantung pada keberadaan bagaimana seseorang "dilihat/dinilai" oleh orang lain. Pekerjaan seseorang menentukan *prestise* seseorang, dan pekerjaan sangat ditentukan oleh pendidikan dan pendapatan. *Prestise* yang "dilai/dilihat" dari pekerjaan seseorang, ternyata dipengaruhi juga oleh usia, ras dan gender/sex. Dengan kata lain, dua orang yang berbeda usia, ras dan sex, tetapi memiliki pekerjaan yang sama, akan memiliki *prestise* yang berbeda. Hal ini disebut juga *status inconsistency* (Thio, 1989:215-216).

3. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk meminta orang lain melakukan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan olehnya. Biasanya lebih banyak kekayaan yang dimiliki seseorang maka lebih besar kekuasaan yang dimiliki orang itu dan lebih tinggi kedudukan seseorang tersebut dalam stratifikasi sosial di lingkungannya.

Karakteristik masyarakat yang dapat membentuk suatu stratifikasi dalam masyarakat, serta mempengaruhi partisipasi seseorang atau sekelompok orang dalam pembangunan dan penataan kawasan adalah:

1. Jenis Kelamin

Partisipasi yang diberikan antara pria dan wanita dalam pembangunan dipengaruhi oleh sistem pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita. Perbedaan kedudukan dan derajat ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita. Sistem stratifikasi dan pelapisan masyarakat atas dasar seksualitas ini biasanya menempatkan golongan pria dengan sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita.

2. Usia

Perbedaan usia dalam partisipasi masyarakat membedakan kedudukan masyarakat atas dasar senioritas. Oleh karenanya terdapat lapisan atau golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal hak-hak tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan (Soedarno dkk, 1992:136).

3. Tingkat Pengetahuan

Litwin (1986:42) mengatakan bahwa salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan partisipatif adalah tingkat pengetahuan masyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat pengetahuan masyarakat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkat pengetahuan masyarakat adalah latar belakang pendidikan masyarakat. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan, serta mempengaruhi bentuk dan tata cara partisipasi yang dapat diberikan dalam pembangunan.

4. Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Baross

(1993:122) menyatakan bahwa dalam proyek-proyek yang diadakan di suatu kampung/kawasan, penduduk yang lebih berada kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan, tetapi tidak mengkontribusikan uang. Jadi semakin kaya seseorang, semakin sedikit pekerjaan yang dilakukan, namun kontribusi dalam bentuk materi semakin banyak. Sedangkan semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, namun semakin sedikit materi yang dikeluarkan.

5. Mata Pencarian/Pekerjaan

Tingkat penghasilan berkaitan erat dengan mata pencarian atau jenis pekerjaan. Karena itulah dikatakan bahwa mata pencarian dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pekerjaan mempengaruhi waktu luang yang dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Warga/masyarakat yang sudah disibukkan oleh persoalan sehari-hari tidak tertarik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan, diskusi, atau seminar-seminar, apalagi yang bersifat formil, kaku dan ilmiah.

2.6.2. Faktor Kelembagaan

Faktor kelembagaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah organisasi normatif (*normative organization*) yang mendasarkan diri pada kekuatan normatif dengan menggunakan cara-cara persuasi secara moral, mengandalkan prestise pemimpin dan menjanjikan penerimaan anggota secara sosial oleh organisasi. Kekuatan normaif yang digunakan oleh para "penggerak partisipasi masyarakat", yaitu pengurus organisasi, keterlibatan masyarakat (sebagai anggota organisasi) dalam mendukung kegiatan-kegiatan organisasi mencapai tujuannya (yaitu melibatkan masyarakat dalam pembangunan) adalah

keterlibatan secara moral (*moral involvement*). Dalam *moral involment* ini, para anggota secara kuat mendukung organisasi. Karena mereka dapat mendukung penuh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya, tanpa imbalan apapun, maka organisasi normatif ini sering pula dinamakan *voluntary association* (organisasi sukarela).

Definisi *voluntary association* adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan (*nonprofit organization*), yang memberi kesempatan kepada para anggotanya untuk menyalurkan minat mereka secara kolektif (Brinkerhoff dan White, 1985:154). Jadi, mereka yang menjadi anggota organisasi ini mempunyai minat yang sama, dan menjadi anggota organisasi ini dengan didasari oleh dorongan keinginan yang sama. Karakteristik utama organisasi ini adalah mengkombinasikan beberapa sifat grup primer dan grup sekunder. Jadi, para anggota organisasi ini dapat menyelaraskan keinginan dan minat mereka dengan tujuan organisasi. Atau dengan kata lain, para anggota organisasi dapat menyalurkan keinginan dan minat mereka melalui kegiatan-kegiatan organisasi.

Tomeh dalam Brinkerhoff dan White, 1985:155-156 mengemukakan beberapa karakteristik yang berkaitan dengan partisipasi anggota pada suatu *voluntary association*, yaitu:

1. **Penduduk kota atau penduduk desa.** Penduduk kota lebih sering terlibat dalam organisasi sukarela dibandingkan penduduk desa.
2. **Kelas sosial.** Masyarakat yang berasal dari kelas sosial tinggi lebih terlibat dalam organisasi sukarela dibandingkan masyarakat dari kelas sosial rendah. Selain itu, tipe organisasi yang dimasuki oleh setiap kelas sosial umumnya berbeda-beda.
3. **Usia.** Keanggotaan dalam organisasi sukarela meningkat pada usia dewasa, dan menurun pada usia lanjut. Usia juga mempengaruhi tipe organisasi yang umumnya dimasuki.
4. **Gender/sex/jenis kelamin.** Secara umum, pria lebih aktif berpartisipasi menjadi

anggota organisasi dibandingkan wanita. Organisasi sukarela yang dimasuki kaum pria umumnya lebih besar dan lebih formal dibandingkan organisasi yang umunya dimasuki kaum wanita.

5. **Agama.** Mereka yang keyakinan beragamanya kuat biasanya menjadi anggota pada lebih dari satu organisasi sukarela yang bersifat keagamaan.

Hal terpenting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui organisasi-organisasi/kelembagaan adalah masalah pemimpin. Anggota-anggota suatu organisasi akan menghadapi kesulitan mengkoordinasikan aktivitas mereka tanpa adanya arahan dari seorang pemimpin (Zanden, 1988:124). Organisasi/kelembagaan yang mendasarkan diri pada kekuatan normatif, mengandalkan diri pada prestise pemimpinnya yang demokratis. Ciri-ciri pemimpin yang demokratis adalah:

1. Pemimpin mendelegasikan kekuasaan pada organisasi, dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya adalah berdasarkan diskusi dan keputusan organisasi.
2. Anggota-anggota organisasi berbagi tugas dan tanggung jawab berdasarkan pembuatan keputusan yang partisipatif.
3. Komunikasi dalam tubuh organisasi berjalan aktif ke "atas" dan ke "bawah".
4. Kekuatan utama kepemimpinan demokratis adalah meningkatkan komitmen setiap individu anggota organisasi, melalui partisipasi dan kooperasi.
5. Kelemahan utama kepemimpinan demokratis adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang dilaksanakan dalam tipe kepemimpinan ini memakan waktu lama dan kadang menimbulkan konflik antar anggota organisasi.

Sedangkan tipe dari seorang pemimpin yang demokratis terbagi dalam dua tipe. Kedua tipe ini sama pentingnya, dan tipe mana yang harus diutamakan oleh seorang pemimpin tergantung pada situasi yang sedang dihadapi organisasi. Kedua tipe kepemimpinan itu adalah:

1. *Task-specialist leader.*

Pemimpin tipe ini mengarahkan kepemimpinannya terutama untuk pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin tipe ini memfokuskan dirinya pada pemecahan masalah pada tubuh organisasi dan pengorganisasian aktivitas organisasi secara efektif.

2. *Social-emotional specialist leader.*

Pemimpin tipe ini mempunyai orientasi utama menciptakan keharmonisan dan kesatuan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin tipe ini memfokuskan dirinya pada pemecahan masalah-masalah antar anggota organisasi, menurunkan ketegangan antar anggota, dan meningkatkan solidaritas anggota.

2.6.3. Faktor Keruangan

Masyarakat kota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan interaksi dengan masyarakat desa. Interaksi antara kota dan desa ini terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk secara keruangan (spasial). Zona-zona kota-desa yang dapat menimbulkan berbagai wujud interaksi desa-kota antara lain (Bintarto, 1983:66):

1. *city*, diidentikkan dengan kota;
2. *suburban* atau *faubourgh*, adalah suatu area yang lokasinya dekat pada pusat kota atau inti kota dengan luas yang mencakup daerah penglaju atau *commuters* (subdaerah perkotaan);
3. *suburban fringe*, adalah suatu area yang melingkari *suburban* dan merupakan daerah peralihan antara kota dan desa (jalur tepi subdaerah perkotaan);
4. *urban fringe*, adalah semua daerah batas luar kota yang mempunyai sifat-sifat mirip kota, kecuali inti kota (jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar); dan
5. *rural-urban fringe*, adalah suatu jalur daerah yang terletak antara daerah kota dan daerah desa yang ditandai dengan penggunaan tanah campuran (jalur batas desa-kota).

Adanya zona-zona interaksi desa-kota ternyata menyebabkan terbentuknya masyarakat dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda-beda. Karakteristik sosial budaya warga suatu zona umumnya berbeda dengan karakteristik sosial budaya warga zona lainnya. Kesibukan masing-masing warga kota dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian mereka kepada sesamanya, termasuk anggota keluarganya sendiri (Asy'ari, 1993).

Wilayah yang sering dikenal dengan *suburban* atau *rural urban* atau desa-kota, merupakan wilayah transisi dalam berbagai segi kehidupan, baik fisik maupun nonfisik, yakni sosial budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat atau karakteristik masyarakat desa (*rural*) dapat terlihat pada masyarakat *suburban* ini. Ciri khas masyarakat desa adalah masyarakat keluarga dan patematistik yang mempunyai ciri-ciri:

1. saling kenal-mengenal dengan baik di antara yang satu dengan lainnya;
2. memiliki keintiman yang tinggi di kalangan warganya;
3. memiliki rasa persaudaraan dan persekutuan yang tinggi;
4. memiliki jalinan emosional yang kuat di kalangan warganya;
5. saling membantu, tolong menolong atas dasar kekeluargaan.

Karena itulah, dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat *suburban* dalam pembangunan, lebih tinggi dibandingkan masyarakat di tingkat pusat kota dan tingkat partisipasi masyarakat *rural* (desa) dalam pembangunan lebih tinggi lagi dibandingkan masyarakat *suburban*. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah perkotaan berbeda-beda pada setiap ruang kota, baik di pusat kota, ekstensi pusat kota, maupun di pinggiran kota. Di pusat kota, partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup rendah. Semakin keluar dari pusat kota, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan semakin tinggi, dan partisipasi masyarakat yang tertinggi dalam pembangunan kota

adalah pada masyarakat di pinggiran kota. Hal ini karena sifat atau karakteristik masyarakat kota seperti yang telah dipaparkan di atas, sangat terlihat jelas pada masyarakat di pusat kota. Semakin keluar pusat kota menuju ke pinggiran kota, karakteristik tersebut tersebut semakin menurun atau tak terlalu terlihat jelas.

Faktor keruangan yang lain, selain faktor ruang kota, yang dapat mempengaruhi karakteristik sosial budaya masyarakat kota, dan akhirnya dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan perkotaan, adalah faktor karakteristik lingkungan permukiman. Mayoritas penghuni kota kota (kecuali yang sangat kaya) tinggal di kampung, atau seringkali disebut perkampungan. Perkampungan, menurutnya, merupakan bentuk permukiman yang unik. Masyarakat kampung beraneka ragam (heterogen). Kampung juga memiliki dimensi-dimensi yang kontras, antara kota-desa, tradisional-modern dan formal-tak formal, yang memberi corak khas pada kesempatan kerja, pengaturan perumahan, hubungan sosial dan keluarga, gerak-gerik ekonomi, dan sebagainya, yang membuat kampung berbeda dengan daerah "gubuk-gubuk" di kota, ataupun permukiman liar kelompok miskin.

Baross (1993: 121-123) mengatakan bahwa heterogenitas masyarakat kampung salah satunya dilihat dari keragaman kemampuan-kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat. Masyarakat dengan kemampuan-kemampuan ekonomi yang berbeda-beda menyebabkan pamrih-pragmatis mereka terhadap lingkungan juga berbeda-beda. Perbedaan pamrih-pragmatis mereka terhadap lingkungan menyebabkan mereka memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah lingkungan mereka dengan nyata, dengan kata lain tidak seorang pun di dalam kampung dapat berdiri sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang bermukim di kampung, dalam pembangunan di daerah perkotaan, berbeda dengan partisipasi masyarakat yang bermukim di jenis-jenis permukiman yang lain (seperti perumahan) yang lebih

homogen masyarakatnya.

2.7. Permasalahan Partisipasi Masyarakat

2.7.1. Permasalahan Partisipasi Masyarakat Ditinjau dari Proses Pembangunan

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses pembangunan, dari tahap penyusunan dan penetapan rencana (tahap perencanaan) pembangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, sampai tahap pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, permasalahan partisipasi masyarakat yang ditemui adalah:

1. Adanya partisipasi masyarakat membuat proses perencanaan pembangunan **tidak sederhana atau efisien**, bila pengertian efisiensi diukur dengan jumlah waktu, uang, serta usaha guna memenuhi suatu tujuan. Pada dasarnya tujuan perencanaan partisipasi adalah bukan membuat proses perencanaan lebih sederhana atau 'efisien', tetapi untuk meyakinkan bahwa kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat telah diperhitungkan secara matang, serta memungkinkan masyarakat turut menyumbangkan gagasan-gagasan yang mereka miliki dalam hal pembangunan tersebut (Conyers, 1991:201-202).
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan **tidak efektif**, karena masyarakat tidak dapat mengimplementasikan rencana-rencana mereka sendiri dan terbentur dengan kepentingan daerah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Conyers (1991:204) yang menyatakan bahwa "partisipasi nampaknya akan lebih efektif bila masyarakat dapat mengimplementasikan rencana-rencana mereka sendiri, tetapi sebagian kepentingan bergantung relatif antara tujuan masyarakat dan kepentingan daerah". Jadi permasalahan utama terletak pada adanya konflik kepentingan, antara tujuan masyarakat (tuntutan dan kebutuhan masyarakat) dengan kepentingan daerah (tujuan daerah).

2.7.2. Permasalahan Partisipasi Masyarakat Ditinjau dari Pelaku Partisipasi

Pelaku partisipasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu individu yang menyuarakan aspirasi mereka sendiri (dalam demokrasi langsung atau *direct democracy*) dan individu yang mewakili suara sekelompok masyarakat (dalam demokrasi perwakilan atau *representative democracy*). Permasalahan partisipasi masyarakat ditinjau dari pelaku partisipasi, antara lain:

1. Masyarakat enggan berpartisipasi atau **kurang mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi**. Conyers (1991:186) menyatakan bahwa masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan lokal walau diberi kesempatan untuk itu. Lebih lanjut, Conyers (1991: 186-187) menyatakan bahwa keengganan atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir (dengan kata lain bahwa keterlibatan atau partisipasi mereka tidak menampakkan hasil). Kedua, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak menarik minat mereka atau menurut mereka tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.
2. Dalam demokrasi perwakilan, seringkali individu yang mewakili masyarakat **tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya**. Dalam kaitannya dengan hal ini, Conyers (1991:194) menyatakan bahwa metode apapun yang digunakan untuk memilih perwakilan tidak akan menjamin seseorang untuk dapat memastikan bahwa mereka-mereka yang terpilih akan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat secara keseluruhan, atau bahkan mayoritas anggota-anggota masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan ada beberapa sifat dan sikap pemimpin lembaga-lembaga atau

organisasi yang menyalurkan partisipasi masyarakat, yang kurang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sifat dan sikap tersebut antara lain:

- a. Para pemimpin kurang terbuka dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang memperoleh informasi mengenai partisipasi atau keterlibatan mereka dalam pembangunan. Mengenai keterbukaan sistem ini, Conyers (1991:199) mengemukakan: "kadang-kadang masyarakat mengira partisipasi yang mereka berikan akan melebihi daripada apa yang sebenarnya terjadi. Seharusnya mereka diberi penjelasan mengenai bagaimana sistem tersebut berjalan".
- b. Para pemimpin kurang peduli dan kurang memperhatikan aspirasi atau usulan/saran yang merupakan kehendak masyarakat. Dalam hal ini Conyers (1991:200) mengemukakan bahwa "harapan-harapan masyarakat yang tidak terpenuhi dapat terjadi karena memang para perencana tidak peduli pada aspirasi atau usulan dari kehendak masyarakat. Seharusnya para perencana baru mulai mencari pendapat masyarakat kalau mereka sudah siap untuk memberi perhatian penuh guna mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pendapat yang diperoleh, dan bila hasil pertimbangan ini belum juga dapat memenuhi harapan masyarakat maka para perencana harus mampu menerangkan mengapa hal ini bisa terjadi".
- c. Para pemimpin kurang dapat melakukan pendekatan partisipatif, yaitu melakukan upaya atau tindakan untuk menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dan kurang komunikatif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan pihak luar. Dalam kaitannya dengan peran pemimpin ini, Conyers (1991:194) mengemukakan bahwa para pemimpin masyarakat berperan memobilisir

penduduk dan berfungsi sebagai saluran komunikasi antara komunitas itu sendiri dengan orang-orang lain.

2.8. Rumusan Kajian Teori

Dari kajian teori di atas, dapat ditarik beberapa rumusan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan dielaborasi sebagai suatu interaksi antara tiga sistem yaitu: sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem sosial. Dalam sistem sosial, proses pembangunan berkelanjutan dari tahap perencanaan; perancangan dan penetapan strategi pembangunan serta pelaksanaan dan pengandaliannya harus lebih bertumpu pada kebutuhan (*needs*), tuntutan (*demands*) masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat, karena dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, maka masyarakat akan merasa ikut 'memiliki', dan karena ikut memiliki maka masyarakat akan merasa mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga segala sesuatu yang telah dimiliki tersebut, dengan demikian suatu proses pembangunan yang berkelanjutan akan dapat diwujudkan.
2. Peran serta masyarakat dalam penataan masyarakat dapat berupa persepsi terhadap rencana penataan kawasan tertentu. Persepsi tersebut berupa: saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, serta masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta alternatif rancangan penataan kawasan. Proses persamaan persepsi dan menjalin komunikasi antar aktor pembangunan perlu dilakukan karena sering terjadi pemahaman masalah, perumusan, tujuan dan ide-ide

pemecahan praktis yang berbeda akibat menganganya jurang pengetahuan dan komunikasi antara perencana dengan masyarakat. Pendekatan perencanaan yang sering dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut adalah dengan menggunakan *Transactive Planning* (Perencanaan Transaktif) yang merupakan tanggapan terhadap kesenjangan komunikasi antara perencana teknis dan para klien. Perencanaan Transaktif memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu.

3. Partisipasi pada prinsipnya adalah usaha untuk melibatkan secara nyata kelompok masyarakat dalam hal merumuskan masalah, visi, tujuan dan sasaran pembangunan; mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan; serta mendorong partisipasi komunitas secara aktif dalam perencanaan, mengambil inisiatif dan melakukan aksi. Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan terdiri dari:
 - a. Tinjauan dan komentar
 - b. Konsultasi
 - c. Pemberi nasehat
 - d. Pengambilan keputusan bersama
 - e. Pengambilan keputusan terkendali

Sedangkan tingkatan partisipasi masyarakat terbagi dalam:

- a. *Manipulation*
- b. *Theraphy*
- c. *Informing*
- d. *Consultation*
- e. *Placation*

- f. *Partnership*
 - g. *Delegated Power*
 - h. *Citizen Control*
4. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan penciptaan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagai hasil-hasil pembangunan secara adil. Penyertaan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dianggap penting didasarkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap pembangunan. Tanpa informasi tersebut, program-program dan proyek-proyek pembangunan akan gagal.
 - b. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
 - c. Merupakan suatu hak demokrasi demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang menjadikan mereka sebagai obyek pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam pembangunan, berarti mereka bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, masyarakat mempunyai hak untuk turut *urun rembug* (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) – yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar

sebagai alat pembangunan itu sendiri.

5. Pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan merupakan wujud pemberian porsi partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses penataan kawasan. Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penataan ruang (kawasan) secara garis besar terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Partisipasi dalam membuat keputusan (membuat beberapa pilihan dari banyak kemungkinan dan menyusun rencana-rencana yang bisa dilaksanakan, dapat atau layak untuk dioperasionalkan).
 - b. Partisipasi dalam implementasi (kontribusi sumber daya, administrasi dan koordinasi kegiatan yang menyangkut tenaga kerja, biaya dan informasi).
 - c. Partisipasi dalam kegiatan yang memberikan keuntungan (material, sosial, dan personel).
 - d. Partisipasi dalam kegiatan evaluasi dan keterlibatan dalam proses yang sedang berjalan.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan dapat ditinjau dari faktor karakteristik masyarakat, faktor kelembagaan dan faktor keruangan. Faktor karakteristik masyarakat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari: jenis kelamin, usia, tingkat pengetahuan, tingkat penghasilan dan mata pencaharian. Faktor kelembagaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah organisasi normatif (*normative organization*) yang mendasarkan diri pada kekuatan normatif dengan menggunakan cara-cara persuasi secara moral, mengandalkan prestise pemimpin dan menjanjikan penerimaan anggota secara sosial oleh organisasi. Faktor keruangan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah interaksi kota dan desa serta karakteristik lingkungan permukiman.
7. Dalam hubungannya dengan proses pembangunan, permasalahan partisipasi masyarakat

ditinjau dari proses pembangunan adalah:

- a. Adanya partisipasi masyarakat membuat proses perencanaan pembangunan **tidak sederhana atau efisien**, bila pengertian efisiensi diukur dengan jumlah waktu, uang, serta usaha guna memenuhi suatu tujuan.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan **tidak efektif**, karena masyarakat tidak dapat mengimplementasikan rencana-rencana mereka sendiri dan terbentur dengan kepentingan daerah.

Sedangkan permasalahan partisipasi masyarakat ditinjau dari pelaku partisipasi adalah:

- a. Masyarakat enggan berpartisipasi atau kurang mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi karena masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak menarik minat mereka atau menurut mereka tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan.
- b. Dalam demokrasi perwakilan, seringkali individu yang mewakili masyarakat tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Hal ini dikarenakan ada beberapa sifat dan sikap pemimpin lembaga-lembaga atau organisasi yang menyalurkan partisipasi masyarakat, yang kurang mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sifat dan sikap tersebut antara lain:
 - Para pemimpin kurang terbuka dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat.
 - Para pemimpin kurang peduli dan kurang memperhatikan aspirasi atau usulan/saran yang merupakan kehendak masyarakat.
 - Para pemimpin kurang dapat melakukan pendekatan partisipatif, yaitu melakukan upaya atau tindakan untuk menggerakkan masyarakat agar mau

berpartisipasi dan kurang komunikatif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan pihak luar.

TABEL II.1
RANGKUMAN KAJIAN TEORI

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
A. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable development</i>)			
WCED (<i>World Commission on Environment and Development</i>)	Pembangunan berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan mereka sendiri - Adanya aspek ekologis, sosial dan ekonomi - Adanya perencanaan & pengawasan yang seksama pada semua tingkat
Hadi (2001)	Syarat-syarat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan	<p>Syarat-syarat pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan itu sarat dengan nilai, dalam arti bahwa ia harus diorientasikan untuk mencapai tujuan ekologis, sosial dan ekonomi. 2. Pembangunan itu, membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat. 3. Pembangunan itu menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat. 4. Pembangunan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis. 5. Pembangunan membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menghendaki pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat. - Dibutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak bagi terselenggaranya keputusan yang demokratis. - Membutuhkan suasana yang terbuka, jujur dan semua yang terlibat senantiasa memperoleh informasi yang aktual - Adanya sistem biologis dan sumberdaya, ekonomi dan sosial
Stren, While & Whitney dalam Budihardjo (1999)	Interaksi sistem dalam pembangunan berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu interaksi antara tiga sistem yaitu: Sistem Biologis dan Sumberdaya, Sistem Ekonomi dan Sistem Sosial	

Lanjutan

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
B. Persepsi Masyarakat dalam Penataan Kawasan			
PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masy. dlm Penataan Ruang	Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Penataan Kawasan	Peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana penataan kawasan tertentu yang terdiri dari: a. pemberian kejelasan hak atas ruang kawasan; b. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang; c. pemberian tanggapan terhadap rancangan rencana rinci tata ruang kawasan; d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; e. bantuan tenaga ahli; dan atau f. bantuan dana.	Peran serta masyarakat dalam penataan masyarakat dapat berupa persepsi terhadap rencana penataan kawasan tertentu. Persepsi tersebut berupa: saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, serta masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta alternatif rancangan penataan kawasan
Friedmann dalam Burke (2004)	Perencanaan Transaktif	Pendekatan perencanaan yang sering dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan tersebut adalah dengan menggunakan <i>Transactive Planning</i> (Perencanaan Transaktif) yang memungkinkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien, sedangkan klien belajar pengetahuan teknis dari perencana. Melalui proses ini pula, kedua macam pengetahuan tersebut masing-masing akan berubah dengan sendirinya, dan kemudian kedua macam pengetahuan ini akan melebur menjadi satu	- Terjadi proses transaksi antara perencana-klien - Perencana belajar pengetahuan eksperimental dari klien - Klien belajar pengetahuan teknis dari perencana - Terjadi penyatuan dan peleburan kedua macam pengetahuan ini
C. Partisipasi Masyarakat (<i>Community Participation</i>)			
Burke (2004)	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan tergantung dari besarnya pengaruh yang dimiliki di masyarakat dalam proses perencanaan. Partisipasi tersebut terdiri dari: - Tinjauan dan komentar - Konsultasi - Pemberi nasehat - Pengambilan keputusan bersama - Pengambilan keputusan terkendali	Bentuk partisipasi dalam perencanaan: - Tinjauan dan komentar - Konsultasi - Pemberi nasehat - Pengambilan keputusan bersama - Pengambilan keputusan terkendali
Jayadinata (1999)	Jenis/macam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal pada pengembangan kota	Terdapat 2 (dua) macam partisipasi masyarakat, yaitu: 1. Partisipasi Vertikal Interaksi dengan cara dari bawah ke atas (<i>bottom up</i>), dimana penduduk/ masyarakat diberi lebih banyak kesempatan untuk menyumbangkan pendapatnya dalam pengembangan kota. 2. Partisipasi Horisontal Dalam partisipasi ini masyarakat berinteraksi secara horisontal dimana masyarakat setempat berinteraksi dengan berbagai kelompok lain, mengambil pengalaman dari kelompok lain, mempengaruhi agar persentase partisipasi penduduk menjadi lebih besar.	Macam partisipasi masyarakat dalam

Lanjutan

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
Arstein (1969)	Tingkatan (tangga) partisipasi	<p>Tangga partisipasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Manipulation</i>; tingkatan partisipasi paling rendah, keterlibatan dan peran individu tidak ada sama sekali, dan kekuasaan berada di tangan pemerintah sepenuhnya. - <i>Therapy</i>; Tingkat partisipasi yang sangat rendah, pemerintah mengatur segala sesuatunya, sehingga individu merupakan obyek program. - <i>Informing</i>; Pada tingkatan ini, individu mulai memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dari penguasa, namun tetap belum memiliki ruang gerak untuk berperan serta aktif dan terlibat dalam pelaksanaan program - <i>Consultation</i>; Pada tingkatan ini, mulai terlihat adanya saling tukar informasi antara pihak satu dengan lainnya, yang memungkinkan keterlibatan individu dalam suatu program. - <i>Placation</i>; Pada tingkatan ini setiap individu yang ikut, terlibat, dan berpartisipasi dalam program akan mendapatkan imbalan berupa plakat. - <i>Partnership</i>; Merupakan tingkatan partisipasi yang ideal, pemerintah dan rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam tahapan pelaksanaan program. Pada tingkat ini memungkinkan setiap individu berpartisipasi penuh dengan menyampaikan ide, aspirasi dan kreativitasnya. - <i>Delegated Power</i>; Pada tingkatan ini, individu/rakyat mulai memegang kendali kekuasaan, kedudukan pemerintah berada di bawah rakyat, sehingga dominasi kekuasaan berada di tangan rakyat. - <i>Citizen Control</i>; Pada tingkatan partisipasi ini, rakyat memegang kekuasaan tertinggi secara penuh dan berimplikasi munculnya kegiatan-kegiatan yang menjurus anarki. 	<p>Tangga partisipasi terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Manipulation</i> - <i>Therapy</i> - <i>Informing</i> - <i>Consultation</i> - <i>Placation</i> - <i>Partnership</i> - <i>Delegated Power</i> - <i>Citizen Control</i>
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan			
Midgley, 1986	Pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan penciptaan kesempatan yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat secara aktif mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan dan berbagi hasil-hasil pembangunan secara adil.	<p>Masyarakat mempengaruhi dan memberi kontribusi pada proses pembangunan secara aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berbagi hasil secara adil.

Lanjutan

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
Conyers, 1991	Tujuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	<p>Penyertaan (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan dianggap penting didasarkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap pembangunan. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan yang menjadikan mereka sebagai obyek pembangunan. Dengan melibatkan mereka dalam pembangunan, berarti mereka bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan, masyarakat mempunyai hak untuk turut <i>urun rembug</i> (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. hal ini selaras dengan konsep <i>man-centered development</i> (suatu pembangunan yang dipusatkan pada kepentingan manusia) – yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan demi perbaikan nasib manusia dan tidak sekedar sebagai alat pembangunan itu sendiri 	<p>-Memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta sikap masyarakat terhadap pembangunan.</p> <p>-Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan</p> <p>-Merupakan suatu hak demokratis masyarakat dalam pembangunan</p>
E. Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan			
PP No. 69 Tahun 1996	Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan	<p>Partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan merupakan wujud pemberian porsi partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses penataan ruang (kawasan). Keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara aktif tersebut tidak hanya dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan penataan kawasan saja, namun juga terlibat dalam kegiatan pencapaian tujuan bersama pada perbaikan lingkungan, yang menyangkut struktur fisik dari masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya dan informasi</p>	<p>-Pembuatan keputusan dalam penataan kawasan</p> <p>-Pelaksanaan penataan kawasan</p> <p>-Pencapaian tujuan bersama dalam perbaikan lingkungan</p>
PP No. 69 Tahun 1996	Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan	<p>Bentuk keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut Wujud Barang atau Jasa Partisipasi masyarakat ini cenderung pada kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat secara individual/perorangan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan yang diberikan berupa: bahan atau material bangunan, dana/biaya pembangunan, tenaga, pemikiran, kehadiran, dan dukungan moral/persetujuan. 2. Keterlibatan dalam Organisasi Terdiri dari: menjadi anggota, pengurus organisasi, mengikuti kegiatan organisasi, membayar iuran organisasi dan anggota berbagai kegiatan 	<p>-Partisipasi dalam bentuk barang dan jasa (bahan/materi bangunan, dana/biaya, tenaga, pemikiran, kehadiran, dukungan moral)</p> <p>-Partisipasi keterlibatan dalam organisasi (menjadi anggota/pengurus, mengikuti kegiatan)</p>

Lanjutan

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Kawasan			
Soedarno dkk (1992); Litwin (1986); Baros (1993)	Karakteristik masyarakat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan	<p>Karakteristik masyarakat yang dapat membentuk suatu stratifikasi dalam masyarakat, serta mempengaruhi partisipasi seseorang atau sekelompok orang dalam pembangunan/penataan kawasan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kelamin Sistem stratifikasi dan pelapisan masyarakat atas dasar seksualitas ini biasanya menempatkan golongan pria dengan sejumlah hak istimewa dibandingkan golongan wanita. 2. Usia Perbedaan usia dalam partisipasi masyarakat membedakan kedudukan masyarakat atas dasar senioritas. Oleh karenanya terdapat lapisan atau golongan tua dan golongan muda, yang berbeda dalam hal hak-hak tertentu, misalnya menyalurkan pendapat dan mengambil keputusan 3. Tingkat Pengetahuan Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang tinggi tentunya mempunyai pengetahuan yang luas tentang pembangunan, serta mempengaruhi bentuk dan tata cara partisipasi yang dapat diberikan dalam pembangunan. 4. Tingkat Penghasilan Penduduk yang lebih berada kebanyakan membayar pengeluaran tunai dan jarang melakukan kerja fisik sendiri. Sementara penduduk termiskin melakukan kebanyakan pekerjaan, tetapi tidak mengkontribusikan uang. 5. Mata Pencarian/Pekerjaan Pekerjaan mempengaruhi waktu luang yang dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Warga/masyarakat yang sudah disibukkan oleh persoalan sehari-hari tidak tertarik untuk mengikuti pertemuan-pertemuan, diskusi, atau seminar-seminar, apalagi yang bersifat formil, kaku dan ilmiah. 	Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik masyarakat - Faktor kelembagaan - Faktor keruangan
Tomeh dalam Brinkerhoff dan White, 1985	Faktor kelembagaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan	<p>Faktor kelembagaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah organisasi normatif (<i>normative organization</i>) yang mendasarkan diri pada kekuatan normatif dengan menggunakan cara-cara persuasi secara moral, mengandalkan prestise pemimpin dan menjanjikan penerimaan anggota secara sosial oleh organisasi. Karakteristik yang berkaitan dengan partisipasi anggota pada suatu organisasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk kota atau penduduk desa. Penduduk kota lebih sering terlibat dalam organisasi sukarela dibandingkan penduduk desa. 2. Kelas sosial. Masyarakat yang berasal dari kelas sosial 	

		<p>tinggi lebih terlibat dalam organisasi sukarela dibandingkan masyarakat dari kelas sosial rendah.</p> <p>3. Usia. Keanggotaan dalam organisasi sukarela meningkat pada usia dewasa, dan menurun pada usia lanjut. Usia juga mempengaruhi tipe organisasi yang umumnya dimasuki.</p> <p>4. Gender/sex/jenis kelamin. Secara umum, pria lebih aktif berpartisipasi menjadi anggota organisasi dibandingkan wanita. Organisasi sukarela yang dimasuki kaum pria umumnya lebih besar dan lebih formal dibandingkan organisasi yang umumnya dimasuki kaum wanita.</p> <p>5. Agama. Mereka yang keyakinan beragamanya kuat biasanya menjadi anggota pada lebih dari satu organisasi sukarela yang bersifat keagamaan.</p>	
Asy'ari (1983), Baross (1993)	Faktor keruangan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan	<p>Faktor keruangan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan berupa faktor ruang kota dan karakteristik lingkungan permukiman. Tingkat partisipasi masyarakat <i>suburban</i> dalam pembangunan, lebih tinggi dibandingkan masyarakat di tingkat pusat kota, dan tingkat partisipasi masyarakat <i>rural</i> (desa) dalam pembangunan lebih tinggi lagi dibandingkan masyarakat <i>suburban</i>.</p> <p>Sedangkan karakteristik lingkungan permukiman yang berupa perkampungan, menyebabkan mereka memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah lingkungan mereka dengan nyata, dengan kata lain tidak seorang pun di dalam kampung dapat berdiri sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya.</p>	
G. Permasalahan Partisipasi Masyarakat			
Conyers (1991)	Permasalahan partisipasi masyarakat ditinjau dari proses pembangunan	<p>Permasalahan partisipasi masyarakat kaitannya dengan proses pembangunan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya partisipasi masyarakat membuat proses perencanaan pembangunan tidak sederhana atau efisien, bila pengertian efisiensi diukur dengan jumlah waktu, uang, serta usaha guna memenuhi suatu tujuan. 2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak efektif, karena masyarakat tidak dapat mengimplementasikan rencana-rencana mereka sendiri dan terbentur dengan kepentingan daerah. 	

Lanjutan

TEORI	SUB BAHASAN	URAIAN	VARIABEL
Conyers (1991)	Permasalahan partisipasi masyarakat ditinjau dari pelaku partisipasi	<p>Permasalahan partisipasi masyarakat ditinjau dari pelaku partisipasi, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat enggan berpartisipasi atau kurang mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi. Keengganan atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi disebabkan oleh dua faktor. Pertama, masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Kedua, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak menarik minat mereka atau menurut mereka tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. 2. Dalam demokrasi perwakilan, seringkali individu yang mewakili masyarakat tidak mampu menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Hal ini dikarenakan oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Para pemimpin kurang terbuka dalam menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem yang melibatkan partisipasi masyarakat - Para pemimpin kurang peduli dan kurang memperhatikan aspirasi atau usulan/saran yang merupakan kehendak masyarakat - Para pemimpin kurang dapat melakukan pendekatan partisipatif, yaitu melakukan upaya atau tindakan untuk menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dan kurang komunikatif dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan kepentingan pihak luar 	

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

3.1. Kondisi Eksisting Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung

3.1.1. Letak dan Lokasi

Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam secara administratif termasuk dalam Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar. Luas kawasan studi yang terletak di RT 1, RT 2 dan RT 3, RW 22 seluas 3,553 Ha. Kawasan studi Kampung Melayu Tanjung Buntung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Teluk Tereng
- Selatan : RT 03
- Barat : Kelurahan Bukit Senyum
- Timur : Teluk Tereng

Secara topografis Kampung Melayu Tanjung Buntung yang terletak di kawasan pesisir relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 1 – 1,5 m di atas permukaan laut. Pada sisi barat kampung terdapat tebing perbukitan setinggi 10 - 20 meter yang merupakan batas fisik kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

3.1.2. Kondisi Tata Ruang

Kondisi tata ruang di kawasan studi secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu kondisi penggunaan lahan, pola pemukiman dan prasarana.

A. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan yang umum di kawasan studi merupakan permukiman bercorak desa nelayan serta prasarana pendukung seperti: masjid, lapangan volley, TPA serta pelantar (dermaga rakyat). Penggunaan lahan masih didominasi oleh ruang terbuka hijau, dengan vegetasi yang dominan adalah kelapa, tanaman perkarangan lainnya serta hutan bakau di sekitar pantai. Penggunaan lahan lainnya merupakan lokasi wisata pantai yang berada di RT 1. Lokasi wisata ini dikelola oleh masyarakat setempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar untuk berekreasi.

Lokasi wisata ini oleh masyarakat setempat sering disebut sebagai wisata rakyat. Wisata ini berupa pantai yang di sebelah kiri dibatasi tebing terjal dan sebelah kanan sebagian berupa hutan mangrove dan pantai berpasir. Pengelolaan lokasi wisata oleh masyarakat setempat berupa retribusi parkir terhadap kendaraan pengunjung. Selain itu, lokasi wisata ini juga dilengkapi dengan warung-warung milik masyarakat setempat yang menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan. Warung-warung tersebut berupa bangunan non permanen dan belum ditata dengan baik. Demikian halnya dengan batas antara lahan parkir dengan lokasi wisata rakyat tersebut yang hanya dibatasi oleh pagar kayu seadanya. Lebih jelasnya mengenai kondisi wisata rakyat tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: Peneliti, 2005

GAMBAR 3.2 WISATA RAKYAT

B. Pola Pemukiman

Pola permukiman di kawasan studi adalah berpola kluster. Pola permukiman ini berarti bahwa permukiman penduduk tersebar secara berkelompok (*clustered*) di sepanjang jalan utama kampung yang berupa jalan tanah. Kawasan permukiman di Kawasan Kampung Melayu ini memiliki luas lebih kurang 42 % dari seluruh luas kawasan.

Secara umum ada 2 bagian kelompok rumah (kluster) ditinjau dari letaknya. Kelompok pertama adalah kelompok rumah yang berada di sebelah timur jalan utama yang merupakan rumah panggung yang berada di atas permukaan laut, di belakang vegetasi mangrove. Kontruksi bangunan rumah tersebut terbuat dari kayu, yang tidak memiliki pekarangan. MCK pada kelompok rumah yang berupa

rumah panggung, berada di belakang rumah yang langsung membuang kotorannya ke laut. Sementara kelompok kedua yang terletak di sebelah barat jalan utama merupakan rumah yang dibangun di atas tanah. Konstruksi bangunan rumah pada kelompok ini merupakan konstruksi rumah semi-permanen. Sama halnya dengan rumah-rumah panggung tersebut, kelompok rumah yang berada di sebelah barat jalan desa tersebut juga tidak memiliki pekarangan. Mereka jika akan membuang hajat juga langsung ke laut yang dilakukan di sekitar hutan mangrove. Lebih jelasnya mengenai pola permukiman di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



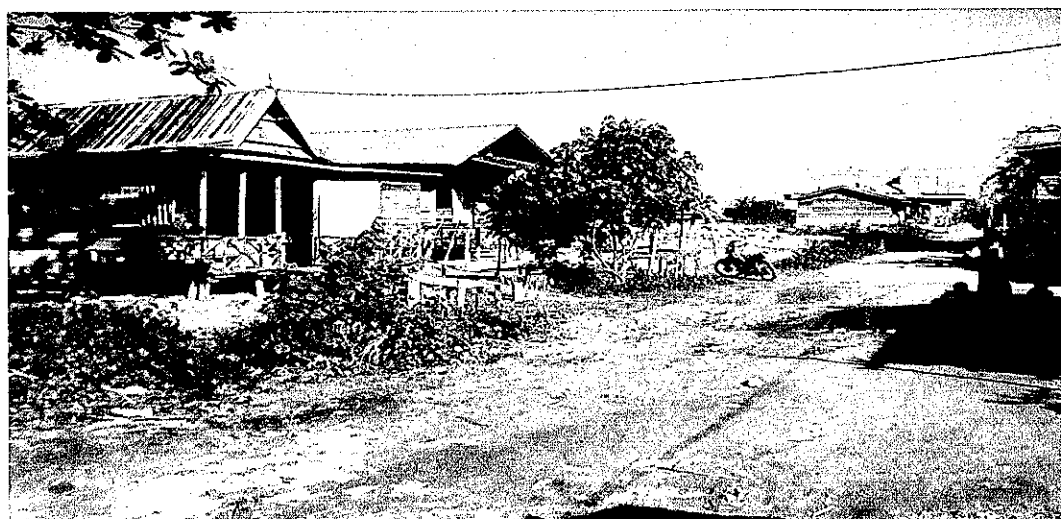
Sumber: Peneliti, 2005

GAMBAR 3.3
POLA PERMUKIMAN PENDUDUK

C. Prasarana Lingkungan

Tingkat pendapatan masyarakat nelayan yang rendah mempengaruhi kondisi prasarana yang dibangun oleh masyarakat setempat. Hal ini terlihat dari sanitasi dan MCK terutama yang dimiliki oleh masyarakat di rumah panggung dengan kondisi yang buruk. MCK rumah panggung di belakang rumah langsung dibuang ke hutan bakau (mangrove).

Kondisi prasarana jalan desa juga termasuk buruk. Jalan desa yang ada merupakan *entry point* kawasan berupa jalan tanah. Pada musim hujan, jalan desa tersebut becek dan susah dilewati. Padahal jalan desa merupakan prasarana vital yang diharapkan dapat membuka isolasi kawasan dan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Selain itu, sistem drainase di kawasan studi termasuk buruk dengan saluran yang tersumbat dan tertimbun tanah. Hal ini mengakibatkan banjir di kawasan studi saat musim hujan datang. Di samping itu, banjir di kawasan studi diperparah dengan adanya reklamasi pantai di sebelah timur kawasan studi (sekitar Teluk Tering).



Sumber: Peneliti, 2005

GAMBAR 3.4
JALAN DAN DRAINASE

Prasarana lain yang merupakan prasarana vital di kawasan studi adalah adanya pelantar (dermaga rakyat). Dermaga ini direncanakan sebagai salah satu *entry point* di kawasan studi dari arah laut dan untuk mendaratkan ikan dari perahu-perahu nelayan setempat yang mencari ikan di laut. Namun dalam kenyataannya sekarang, dermaga tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagaimana mestinya. Kondisi dermaga tersebut saat ini mulai keropos dan mulai rusak. Padahal investasi dan dana untuk pembangunan dermaga tersebut cukup besar. Hal ini dikarenakan rencana pembangunan dermaga tersebut tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang merasa belum perlu dibangun dermaga karena perahu-perahu nelayan setempat bukanlah perahu besar yang memerlukan dermaga. Sehingga program pembangunan dermaga tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Dermaga tersebut saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk tempat memancing dan tempat wisata karena letaknya yang berdekatan dengan lokasi wisata rakyat. Lebih jelasnya mengenai kondisi dermaga/pelantar rakyat dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Sumber: Peneliti, 2005

GAMBAR 3.5
DERMAGA RAKYAT (PELANTAR)

Prasarana air bersih di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini belum dilayani oleh PT. Adhya Tirta Batam yang merupakan perusahaan penyedia air bersih di Kota Batam. Kebutuhan air masyarakat Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dari sumur-sumur di kawasan tersebut yang terdiri dari 3 perigi (sumur) untuk kebutuhan mandi dan mencuci, serta 2 perigi (sumur) untuk mencukupi kebutuhan air minum. Permasalahan yang timbul saat ini adalah beralihnya fungsi tangkapan air di perbukitan sebelah barat kawasan studi menjadi kawasan perumahan. Peralihan fungsi tersebut dikawatirkan akan berakibat pada berkurangnya sumber air bagi masyarakat setempat. Selain itu juga adanya intrusi air laut yang menyebabkan tingkat kesadahan yang cukup tinggi pada air di sumur penduduk tersebut. Terlebih lagi penambahan jumlah penduduk yang berdampak pada penambahan kebutuhan akan air bersih. Sedangkan kebutuhan akan listrik di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dengan aki yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jaringan listrik saat ini belum masuk ke Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung karena keterbatasan ekonomi penduduk setempat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan pemasangan baru.

3.1.3. Kondisi Partisipasi Masyarakat Tanjung Buntung.

Kondisi partisipasi masyarakat Tanjung Buntung sangat perlu diketahui berkaitan dengan peberdayaan masyarakat dalam penataan kawasan kampung melayu Tanjung Buntung, Kota Batam. Kondisi partisipasi masyarakat Tanjung Buntung dapat digambarkan dengan potensi dan kendala yang berasal dari

masyarakat setempat. Potensi partisipasi masyarakat Tanjung Buntung antara lain:

- Semangat gotong-royong dan kesadaran telah ada, seperti kegiatan terjadwal dalam membersihkan lingkungan.
- Kelembagaan di tingkat lokal dalam menyikapi kondisi penataan lingkungan yang berkembang cukup baik, yang dikoordinir oleh tokoh-tokoh setempat.
- Kesadaran terhadap pengembangan potensi wisata alam (pantai) di Tanjung Buntung telah dimiliki oleh masyarakat. Sehingga bagi mereka ada harapan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat dalam mendukung kegiatan wisata.
- Kesadaran akan ancaman sosial dan budaya yang terjadi bagi generasi muda bila kampungnya dijadikan obyek wisata. Mereka berupaya melakukan teguran pada pengunjung yang tidak memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu yang bersendi pada ajaran agama Islam.
- Keinginan dan motivasi masyarakat Melayu untuk maju dan dapat bersaing dengan pendatang cukup kuat.

Sedangkan faktor kendala partisipasi yang berasal dari masyarakat Tanjung Buntung antara lain:

- Perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat, berpotensi menjadi konflik bila tidak dikelola dengan baik.
- Lembaga-lembaga desa belum maksimal untuk dapat mengakomodir dan melihat kebutuhan masyarakat.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat secara umum, menimbulkan masalah pada tingkat pemahaman dan sudut pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah baik yang berkaitan dengan lingkungan dan organisasi kemasyarakatan di

tingkat lokal.

- Keterbatasan pengetahuan dalam memicu kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan ekonomi di tingkat lokal yang mendukung program pariwisata.

3.2. Kebijakan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam

3.2.1. Rencana Tata Ruang Kawasan

Dalam kebijakan Penataan Kawasan Kampung Melayu di Tanjung Buntung, disebutkan rencana tata ruang kawasan yang meliputi: rencana pemanfaatan ruang, rencana tata ruang dan bangunan, rencana penyediaan sarana pelayanan lingkungan, serta rencana prasarana sanitasi lingkungan.

I. Rencana Pemanfaatan Ruang

Rencana pemanfaatan ruang di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa blok peruntukan yang ditentukan sesuai fungsi kegiatan yang akan dikembangkan. Blok peruntukan yang akan dikembangkan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terdiri atas:

1. Permukiman Penduduk

Blok peruntukan permukiman penduduk merupakan zona privat yang memanfaatkan permukiman yang sudah ada. Blok ini dikembangkan bagi masyarakat setempat beretnis asli Melayu, maupun masyarakat pendatang yang sudah lama bermukim di Tanjung Buntung dan menghormati budaya masyarakat setempat (Melayu). Kampung Tanjung Buntung akan dikembangkan dengan menggunakan konsep lingkungan Kampung Melayu Tradisional, yang diharapkan dapat terus dilestarikan sepanjang masa. Pada

blok peruntukan ini akan coba diterapkan pola pengembangan budaya Melayu secara statis maupun dinamis. Blok permukiman ini juga akan berhubungan dengan permukiman baru yang dikembangkan di sebelah barat Kampung Tanjung Buntung.

2. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Blok fasilitas sosial dan fasilitas umum dikembangkan untuk lebih memudahkan masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung memperoleh pelayanan fasilitas lingkungan yang dibutuhkan. Blok peruntukan ini akan diintegrasikan dengan blok permukiman yang berisi fasilitas antara lain: pendidikan (SD), kesehatan (Puskesmas Pembantu), dan perdagangan (kedai-kedai). Pada dasarnya blok peruntukan fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan zona semi privat.

3. Wisata

Blok peruntukan wisata yang ada di kawasan studi diarahkan pada pengembangan potensi eksotis pantai Teluk Tering sebagai daerah tujuan wisata. Wisata pantai di Kampung Melayu Tanjung Buntung ini dapat dikembangkan secara terbatas, mengingat keterbatasan kondisi fisik lahan di belakang pantainya yang merupakan tebing yang terjal. Segmentasi pasar berupa wisatawan golongan menengah ke bawah yang saat ini sudah terbentuk, terlihat dengan banyaknya wisatawan lokal warga Kota Batam yang datang di akhir pekan untuk menikmati panorama pantai yang masih alami.

Selain wisata pantai yang sudah berkembang, kegiatan wisata yang mungkin dapat dikembangkan adalah wisata alam berupa penyelusuran hutan bakau,

dengan segmentasi pasarnya wisatawan mancanegara (Singapura dan Jepang). Selain itu juga kegiatan wisata di sekitar dermaga berupa kegiatan memancing, maupun pengembangan restoran/cafe yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung.

II. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Rencana tata bangunan dan lingkungan dimaksudkan untuk mengendalikan pembangunan fisik kawasan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang serta fungsi dan peran pengembangan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang diusulkan sebagai salah satu Kawasan Cagar Budaya Melayu.

Rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan studi mengatur hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain:

- **Perpetakan**

Perpetakan (persil/kapling) untuk rumah tinggal di kawasan studi maksimal seluas 200 m². Sedangkan untuk perpetakan non rumah tinggal, luasan sesuai dengan kebutuhan pengembangan.

- **Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**

Merupakan perbandingan antara luasan lantai bangunan dengan luasan perpetakan. KDB maksimal 30% untuk pengembangan rumah tinggal, sedangkan untuk pengembangan non rumah tinggal KDB maksimal sebesar 40%.

- **Koefisien Lantai Bangunan (KLB)**

Merupakan perbandingan antara luasan total lantai bangunan dengan luasan lantai dasar bangunan. KLB maksimal 1 dengan alasan bangunan yang ada di kembangkan merupakan bangunan tidak bertingkat.

- **Ketinggian Bangunan**

Ketinggian bangunan maksimal di kawasan studi maksimal 15 meter atau harus lebih rendah dari ketinggian pohon kelapa.

- **Sempadan Bangunan**

Garis sempadan bangunan (GSB) merupakan jarak antara batas garis Daerah Milik Jalan (Damija) dengan dinding bangunan terluar yang menghadap ke jalan. GSB yang diterapkan di kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung untuk persil rumah tinggal atau *homestay* minimal 2 x lebar Damija. Sedangkan persil bukan rumah tinggal minimal 3 x lebar Damija.

- **Pola Arsitektur Bangunan**

Pola arsitektur yang digunakan adalah pola arsitektur bangunan Melayu tradisional yang bercirikan: rumah panggung, bentuk atap limasan, memiliki *selaso* (beranda), ornamen *lebah menggantung* pada *list plang* maupun kisi-kisi ventilasi dan lainnya.

- **Pola Tata Hijau**

Pola tata hijau di kawasan studi didominasi pohon kelapa sebagai simbol kampung Melayu yang terletak di tepi pantai. Sedangkan tanaman pekarangan berupa tanaman bumbu, maupun tanaman obat-obatan.

- **Parkir dan Sirkulasi**

Perparkiran kendaraan wisatawan menggunakan sistem *off street parking* yakni parkir di luar badan jalan. Perkerasan pada pelataran parkir menggunakan *grassblock* yang dapat meresap air, sehingga mengurangi genangan air di waktu hujan. Sedangkan sirkulasi internal di kawasan studi terdiri dari 2 jenis, yaitu sirkulasi kendaraan secara terbatas yang dilayani oleh jalan serta sirkulasi pejalan kaki yang dilayani oleh pedestrian.

III. Rencana Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan

Penyediaan sarana pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan di Kampung Melayu Tanjung Buntung ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait. Pemerintah Kota Batam berkewajiban menyediakan sarana pendidikan tingkat SD beserta sarana penunjangnya, Balai Adat/Balai Pertemuan Warga, maupun sarana lainnya sesuai dengan rencana kota (RTRW Kota Batam). Pihak pengusaha swasta dapat berperan serta dalam menyediakan sarana lingkungan yang memiliki nilai ekonomis seperti wartel, kedai dan lainnya, sedangkan masyarakat baik secara swadaya kelompok maupun perorangan dapat berperan serta dalam menyediakan sarana seperti: kedai, sarana pendidikan (TK) dan prasarana lainnya sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.

3.2.2. Program Partisipasi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung

I. Rencana Partisipasi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung

Tahapan rencana partisipasi masyarakat yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

A. Tahap I

Merupakan tahap sosialisasi, yang memperkenalkan konsep pembangunan yang telah direncanakan kepada masyarakat, dimana transparansi merupakan tujuan dari tahap ini. Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi stakeholder lain yang terkait. Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan pada setiap jenis kegiatan sosial, ekonomi dan fisik, yang akan dilaksanakan di tingkat lokal, tahap ini merupakan proses dialogis di awal saat menjalankan program

B. Tahap II

- Edukasi, merupakan program pendidikan yang akan mempersiapkan masyarakat setempat dalam program basis ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan dan wisata budaya. Tahap ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan pendidikan untuk mendapatkan motor penggerak dan pelaksana teknis di tingkat lokal, serta mempersiapkan program kerja baru.
- Pembangunan Fisik, merupakan tahap yang berkesinambungan dan terkoordinasi dengan program partisipasi masyarakat, karena pembangunan fisik merupakan aspirasi dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan fisik ini akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan pendek masyarakat setempat.

C. Tahap III

- Pengorganisasian Lembaga, merupakan tahap pembentukan lembaga beserta infrastrukturnya serta pembentukan konsep pengelolaan lembaga sesuai dengan jenis kegiatannya. Proses dilakukan antara masyarakat dengan pelaku kegiatan dan pembina sebagai pendamping kegiatan.
- Workshop, merupakan tahapan pembentukan unit kegiatan teknis yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.
- Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan.
- Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengelolaan Kegiatan Pariwisata.

D. Tahap IV

- Monitoring
- Evaluasi

Proses kegiatan pembangunan yang berbasis masyarakat setempat ini membutuhkan *stakeholder* yang mendukung, mengontrol atau mendampingi setiap kegiatan yang akan dilakukan di kawasan ini. *Stakeholder* yang akan menjadi mitra masyarakat dan perannya masing-masing adalah:

A. Konsultan Pembangunan

Merupakan tim pendamping/pembina yang memiliki tugas dan peran sebagai berikut:

- Mengawal kegiatan masyarakat sehingga terbentuk kontrol mulai di tingkat masyarakat sampai *stakeholder* yang berkaitan dengan program.
- Memberikan edukasi sehingga terbentuk cara pandang yang dinamis, kreatif, kritis dan berdaya guna, agar tercipta pembangunan yang menyeluruh dan berkembang.
- Memberikan pandangan dan konsultasi bagi instansi pemerintah dan investor swasta dalam melakukan kegiatan di lokasi.

B. Pemerintah Kota Batam dan Bappeda Kota Batam

Sebagai fasilitator program pembangunan, memiliki tugas sebagai berikut:

- Sebagai penyelenggara pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Memberikan dukungan modal dan pemasaran bagi pengembangan ekonomi di masyarakat.
- Investigator dalam menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, sehingga akuntabilitas dari pelaksanaan pembangunan tetap terjaga.
- Koordinator dari setiap instansi/lembaga yang ikut serta dalam program

pembangunan.

- Memberikan dukungan infrastruktur, kepastian hukum penggunaan tanah dan keamanan masyarakat dan investor swasta.

C. Dinas Terkait

Memiliki tugas antara lain:

- Pelaksana dari kegiatan pembangunan, edukasi di bidang ekonomi dan *technical assistant* dalam pembangunan fisik.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam/Bappeda dan pendamping/pembina dan masyarakat, dalam menjalankan pembangunan.

D. Operator Swasta

Memiliki tugas dalam mendukung program partisipasi masyarakat, antara lain:

- Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
- Memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- Selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam, pendamping dan instansi terkait.
- Memperhatikan kesinambungan dan daya dukung lingkungan.
- Memberikan kesempatan bekerja bagi masyarakat setempat.

II. Rencana Pengorganisasian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan

Mekanisme hubungan antar lembaga di tingkat desa dalam melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan bertujuan untuk dapat menciptakan hubungan yang sinergis antar lembaga yang menjadi *stakeholder* di tingkat kelurahan dalam menjalankan program partisipasi pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

Peranan organisasi kerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, selain sebagai lembaga kegiatan pembangunan dan perawatan lingkungan permukiman dan wisata, juga mendatangkan keuntungan ekonomi masyarakat di kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Secara umum organisasi kerja pembangunan dan pengelolaan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan belajar bersama antar masyarakat dan dengan pembina/pendamping, melalui proses dialog yang membahas tentang isu-isu lingkungan yang berkembang dan program serta mekanisme/koordinasi teknis kerja pembangunan dan pengelolaan lingkungan.
- b. Pengorganisasian kegiatan *workshop* di unit-unit kegiatan untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mendukung program wisata.
- c. Melakukan kegiatan administrasi dan manajerial lembaga.

Dalam pengelolaan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dibedakan dalam karakter kegiatan pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman dan wisata. Berdasarkan karakter kegiatan masing-masing organisasi/kelompok kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok kerja pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman, memiliki unit-unit kerja sebagai berikut:
 - Unit kerja administrasi
 - Unit kerja fasilitas umum
 - Unit kerja fasilitas sosial
 - Unit kerja jaringan jalan & drainase

b. Kelompok kerja pengelolaan lingkungan memiliki unit-unit kerja sebagai berikut:

- Unit kerja administrasi
- Unit kerja budaya Melayu dan Informasi
- Unit kerja fasilitas wisata darat
- Unit kerja fasilitas wisata laut
- Unit kerja perawatan lingkungan alam
- Unit kerja pelatihan dan workshop seni

BAB IV
KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
RENCANA PENATAAN KAWASAN KAMPUNG MELAYU TANJUNG
BUNTUNG, KOTA BATAM

**4.1 Kajian Kesesuaian Kebijakan dan Rencana Penataan Kawasan
Kampung Melayu Tanjung Buntung dengan Kondisi Kawasan**

Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam merupakan kampung Melayu cikal bakal Kota Batam. Kawasan ini terletak di Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batu Ampar, yang berdasarkan Rencana Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam dialokasikan untuk kawasan permukiman. Sedangkan berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas, Kawasan Kampung Melayu di Kota Batam, termasuk Kampung Melayu Tanjung Buntung perlu adanya peningkatan kualitas lingkungan dan memberi citra yang baik bagi perkampungan Melayu sebagai akar budaya Kota Batam. Oleh karena itu, menurut Pemerintah Kota Batam, perlu dilakukan penataan dan revitalisasi perkampungan Melayu sesuai akar budayanya, mulai dari penyusunan rencana penataan RTBL Kampung Melayu, membantu mengembangkan, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan penataannya, serta melengkapinya dengan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Selain itu Pemerintah Kota Batam bermaksud merangsang masyarakat Melayu untuk menghidupkan kembali kegiatan seni budaya Melayu yang ada di setiap Kampung Melayu serta memberdayakan masyarakatnya agar dapat menangkap peluang-peluang yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan demikian, keberadaan Kampung-kampung Melayu ini akan memberi citra Kota Batam sebagai Kota Budaya Melayu dan memanfaatkannya sebagai salah satu objek wisata budaya.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam terutama dalam konsep pengembangan struktur tata Kota Batam diarahkan fungsinya untuk mendukung pengembangan kegiatan Ruang Terbuka Hijau. Oleh karenanya, dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung fungsi dan perannya diarahkan untuk mendukung pengembangan ruang terbuka hijau. Selain kebijakan ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam, kebijakan mengenai penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung juga tertuang dalam Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Pada bagian pembahasan ini, akan dilakukan kajian terhadap kebijakan dan rencana penataan kawasan dengan kondisi, khususnya potensi kawasan yang ada. Dengan melakukan kajian, dapat diputuskan bahwa apakah kebijakan dan rencana tersebut telah sesuai dengan kondisi kawasan yang sebenarnya. Pada dasarnya, perencanaan suatu kegiatan pembangunan, termasuk rencana yang bersifat *top-down* harus sesuai dengan kondisi obyeknya.

Sebagai kriteria dasar untuk melakukan kajian kesesuaian adalah: 1) kondisi kawasan memiliki kondisi fisik lahan yang sesuai untuk peruntukkan kebijakan dan rencana, dan 2) kawasan memiliki kondisi kegiatan dan kecenderungan perkembangan yang sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ada. Sedangkan fokus kajian ditujukan pada dua hal, yaitu 1) kajian terhadap arahan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan untuk pengembangan dan

penataan Kawasan Tanjung Buntung, dan 2) kajian terhadap rencana partisipasi masyarakat terhadap penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penataan kawasannya. Berikut ini adalah tabel kajian kesesuaian antara kebijakan dan rencana penataan kawasan dengan kondisi kawasan yang ada.

TABEL IV.1

KAJIAN PERBANDINGAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN DENGAN KAWASAN DENGAN KONDISI KAWASAN

No.	Kebijakan dan Rencana	Kondisi	Kajian	Kesimpulan
1.	<p>Rencana Pemanfaatan Ruang</p> <p>a. Permukiman Penduduk</p> <p>Blok peruntukan permukiman penduduk memanfaatkan permukiman yang sudah ada. Kampung Tanjung Buntung akan dikembangkan dengan menggunakan konsep lingkungan Kampung Melayu Tradisional secara statis maupun dinamis, yang diharapkan dapat terus dilestarikan sepanjang masa.</p> <p>b. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum</p> <p>Blok peruntukan ini akan diintegrasikan dengan blok permukiman yang berisi fasilitas antara lain: pendidikan (SD), kesehatan (Puskesmas Pembantu), dan perdagangan (kedai-kedai).</p> <p>c. Wisata</p> <p>Blok peruntukan wisata yang ada di kawasan studi diarahkan pada pengembangan potensi eksotis pantai Teluk Tering sebagai daerah tujuan wisata.</p> <p>Selain wisata pantai yang sudah berkembang, kegiatan wisata yang mungkin dapat dikembangkan adalah wisata alam berupa penyelusuran hutan bakau, dengan segmentasi pasarnya wisatawan mancanegara (Singapura dan Jepang).</p> <p>Selain itu juga kegiatan wisata di sekitar dermaga berupa kegiatan memancing, maupun pengembangan restoran/cafe yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung.</p>	<p>Kondisi fisik kawasan dan tata guna lahan yang terdapat di kawasan adalah:</p> <p>a. Secara topografis, kawasan merupakan kawasan pesisir relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 1 – 1,5 m di atas permukaan laut. Pada sisi barat kampung terdapat tebing perbukitan setinggi 10 -20 meter yang merupakan batas fisik kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.</p> <p>b. Kawasan merupakan kawasan permukiman penduduk nelayan. Lebih dari 42 % luas lahan kawasan merupakan kawasan permukiman.</p> <p>c. Pada kawasan ini terdapat beberapa prasarana umum, seperti jalan dan air bersih meskipun dengan kondisi yang buruk, serta sarana atau fasilitas umum, seperti masjid, lapangan volley, TPA serta pelantar (dermaga rakyat) dan lahan hijau terbuka, yang berupa kebun kelapa dan tanaman lainnya.</p> <p>d. Pada kawasan terdapat kegiatan wisata pantai yang menyajikan panorama pantai berpasir dan hutan mangrove. Pengelolaan wisata oleh masyarakat setempat berupa retribusi parkir terhadap kendaraan pengunjung. Selain itu, lokasi wisata ini dilengkapi dengan warung-warung milik masyarakat. Warung-warung tersebut berupa bangunan non permanen dan belum ditata dengan baik.</p>	<p>a. Dari tiga arahan kebijakan rencana tata ruang yang ditetapkan, semua rencana tata ruang telah sesuai dengan potensi fisik kawasan dan kegiatan ada yang telah berkembang.</p> <p>b. Arahan rencana pengembangan kawasan berdasarkan pada kecenderungan (<i>trend-planning</i>) yang berkembang pada obyek perencanaan.</p> <p>c. Terdapat kesenjangan kondisi yang ada dengan arahan rencana yang ditetapkan. Kesenjangan ini menjadi alasan untuk melakukan pengembangan dan penataan kawasan.</p>	<p>Arahan kebijakan dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan kondisi fisik kawasan dan kawasan dan kecenderungan perkembangan kegiatan yang ada. Pengembangan dan penataan kawasan bermaksud mengurangi dan menyempatkan kesenjangan yang terjadi antara kondisi yang ada dengan kondisi rencana yang ditetapkan.</p>

No.	Kebijakan dan Rencana	Kondisi	Kajian	Kesimpulan
2.	<p>Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)</p> <p>a. Perpetakan Perpetakan (persil/kapling) untuk rumah tinggal di kawasan studi maksimal seluas 200 m². Sedangkan untuk perpetakan non rumah tinggal, luasan sesuai dengan kebutuhan pengembangan.</p> <p>b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) KDB maksimal 30% untuk pengembangan rumah tinggal, sedangkan untuk pengembangan non rumah tinggal KDB maksimal sebesar 40%.</p> <p>c. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) KLB maksimal 1 dengan alasan bangunan yang ada di kembangkan merupakan bangunan tidak bertingkat.</p> <p>d. Ketinggian Bangunan Ketinggian bangunan maksimal di kawasan studi maksimal 15 meter atau harus lebih rendah dari ketinggian pohon kelapa.</p> <p>e. Sempadan Bangunan GSB yang diterapkan di kawasan Kampung Melayu Tanjung Bunting untuk persil rumah tinggal atau <i>homestay</i> minimal 2 x lebar Damija. Sedangkan persil bukan rumah tinggal minimal 3 x lebar Damija.</p> <p>f. Pola Arsitektur Bangunan Pola arsitektur yang digunakan adalah pola arsitektur bangunan Melayu tradisional yang bercirikan: rumah panggung, bentuk atap limasan, memiliki <i>selaso</i> (beranda), ornamen <i>lebah menggantung</i> pada <i>list plang</i> maupun kisi-kisi ventilasi dan lainnya.</p>	<p>a. Perpetakan (persil/kapling) rumah tinggal di kawasan bervariasi antara 80 - 300 m²</p> <p>b. KDB yang terdapat didalam kawasan bervariasi antara 30% hingga 100 %.</p> <p>c. KLB yang ada pada saat ini maksimal 1, berupa bangunan tidak bertingkat.</p> <p>d. Ketinggian bangunan di kawasan studi bervariasi, maksimal 15 meter atau harus lebih rendah dari ketinggian pohon kelapa.</p> <p>e. GSB di kawasan bervariasi. Rata-rata dibawah 2 x lebar Damija.</p> <p>f. Pola arsitektur bangunan ada adalah pola arsitektur bangunan nelayan tradisional yang bercirikan: rumah panggung, dengan ornamen yang sederhana.</p> <p>g. Pola tata hijau di kawasan studi didominasi pohon kelapa dan mangrove.</p> <p>h. Perparkiran kendaraan pengunjug menggunakan sistem <i>on-street parking</i> dan <i>off street parking</i> yakni parkir di luar badan jalan, dengan kondisi lahan parkir yang berupa tanah.</p> <p>i. Rencana Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan.</p>	<p>a. Penyusunan arahan kebijakan RTBL telah dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan.</p> <p>b. Penyusunan arahan RTBL memperhatikan kondisi ideal yang seharusnya dikembangkan di kawasan.</p> <p>c. Kondisi ideal yang digunakan didalam RTBL berbeda sangat jauh dari kondisi yang ada pada saat ini.</p> <p>d. Terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara arahan pengembangan dengan kondisi pada saat ini.</p> <p>e. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyusunan RTBL, meskipun memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan yang ada, tetapi lebih memperhatikan arahan 'top-down' daripada mengadopsi kebutuhan nyata di lapangan.</p>	<p>Arahan pengembangan dan penataan kondisi kawasan yang dituju yang tertuang didalam kebijakan RTBL berbeda jauh dengan kondisi yang terdapat pada saat ini. Hal ini menunjukkan sifat RTBL yang 'top-down' <i>planning</i> yang belum memperhatikan kebutuhan dan permasalahan nyata kawasan</p>

No.	Kebijakan dan Rencana	Kondisi	Kajian	Kesimpulan
g. h.	<p>Pola Tata Hijau</p> <p>Pola tata hijau di kawasan studi didominasi pohon kelapa sebagai simbol kampung Melayu yang terletak di tepi pantai. Sedangkan tanaman pekarangan berupa tanaman bumbu, maupun tanaman obat-obatan.</p> <p>Parkir dan Sirkulasi</p> <p>Perparkiran kendaraan wisatawan menggunakan sistem <i>off street parking</i> yakni parkir di luar badan jalan. Perkerasan pada pelataran parkir menggunakan <i>grassblock</i> yang dapat meresap air, sehingga mengurangi genangan air di waktu hujan. Sedangkan sirkulasi internal di kawasan studi terdiri dari 2 jenis, yaitu sirkulasi kendaraan secara terbatas yang dilayani oleh jalan serta sirkulasi pejalan kaki yang dilayani oleh pedestrian.</p>			
3.	<p>Rencana Penyediaan Sarana Pelayanan Lingkungan</p> <p>Penyediaan sarana pelayanan lingkungan yang akan dikembangkan di Kampung Melayu Tanjung Buntung ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait, baik dari pemerintah kota, swasta maupun swadaya masyarakat sendiri.</p>	<p>Penyediaan sarana pelayanan lingkungan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersumber dari pendanaan hasil pengelolaan obyek wisata. Hanya sedikit peran Pemerintah Kota di dalam penyediaan prasarana tersebut.</p>	<p>Adanya sumber-sumber pendanaan dari masyarakat setempat dalam hal penyediaan sarana pelayanan lingkungan, namun peran dari pemerintah masih kecil, bahkan swasta belum menunjukkan perannya terhadap penyediaan sarana pelayanan lingkungan.</p>	<p>Arahan penyediaan sarana pelayanan lingkungan berbeda antara rencana dan kondisi eksisting</p>

Sumber: *Kajian Peneliti, 2005*

Berdasarkan tabel kajian kesesuaian tersebut di atas, terdapat kesenjangan antara kondisi arahan kebijakan dan rencana yang dikehendaki dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kesenjangan tersebut sebenarnya merupakan hal yang seharusnya terjadi antara tujuan suatu rencana dengan kondisi awal rencana, karena suatu perencanaan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari pada kondisi awal perencanaan.

Tetapi pada arahan Rencana Tata Ruang dan RTBL Kawasan Tanjung Buntung, rencana yang dibuat, meskipun telah memperhatikan kondisi nyata, tetapi ternyata bersifat ideal. Sehingga terjadi kesenjangan yang relatif besar antara kondisi tujuan yang hendak dicapai dengan kondisi nyata.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyusunan Rencana Tata Ruang dan RTBL Kawasan Tanjung Buntung, meskipun memperhatikan kondisi dan kecenderungan perkembangan yang ada, tetapi lebih memperhatikan arahan *top-down* daripada mengadopsi kebutuhan nyata di lapangan.

Berdasarkan kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa arahan pengembangan dan penataan kondisi kawasan yang dituju yang tertuang di dalam rencana tata ruang dan RTBL kawasan berbeda jauh dengan kondisi yang terdapat pada saat ini. Hal ini menunjukkan sifat rencana tata ruang dan RTBL yang *top-down planning* yang belum memperhatikan kebutuhan dan permasalahan nyata kawasan.

Sedangkan untuk kajian program pelibatan atau partisipasi masyarakat pada penataan kawasan dengan kondisi realisasinya, dapat dilihat pada tabel kajian berikut ini:

TABEL IV.2
KAJIAN PROGRAM PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN KAWASAN TANJUNG MELAYU BUNTUNG

No.	Kebijakan dan Rencana	Kondisi	Kajian	Kesimpulan
1.	<p>Rencana Partisipasi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung.</p> <p>a. Tahap I</p> <p>Merupakan tahap sosialisasi, yang memperkenalkan konsep pembangunan yang telah direncanakan kepada masyarakat, dimana transparansi merupakan tujuan dari tahap ini.</p> <p>Pada tahap ini juga dilakukan sosialisasi <i>stakeholder</i> lain yang terkait. Kegiatan sosialisasi juga dapat dilakukan pada setiap jenis kegiatan sosial, ekonomi dan fisik, yang akan dilaksanakan di tingkat lokal. Tahap ini merupakan proses dialogis di awal saat menjalankan program</p> <p>b. Tahap II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edukasi • Pembangunan Fisik <p>c. Tahap III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengorganisasian Lembaga • Workshop • Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. • Peran Aktif Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata. <p>d. Tahap IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring • Evaluasi 	<p>a. Hingga saat ini, sejak perencanaan dibuat pada tahun 2000, tahapan pelaksanaan program pelibatan masyarakat belum dilaksanakan.</p> <p>b. Program yang telah dilaksanakan berupa program perbaikan fisik lingkungan yang merupakan program pembangunan fisik reguler.</p>	<p>a. Sebenarnya, proses perencanaan pelibatan masyarakat pada penataan kawasan telah logis dan sistematis, yaitu dimulai dari upaya untuk mensosialisasikan program kegiatan, hingga pada melibatkan masyarakat secara langsung kedalam proses penataannya.</p> <p>b. Tetapi, karena rencana penataan, yang termuat didalam rencana tata ruang dan RTBL dilakukan dengan pendekatan <i>top down planning</i>, maka program pelibatan dan partisipasi masyarakat juga tentunya dilakukan dengan pendekatan yang sama.</p> <p>c. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan tersebut diakibatkan pada lambatnya tahap sosialisasi, yang menjadikan lambatnya tahap-tahap selanjutnya.</p>	<p>Pendekatan <i>top down planning</i> yang digunakan pada proses perencanaan penataan kawasan, termasuk didalam proses perencanaan tata ruang dan RTBL kawasan telah menyebabkan rencana pelibatan masyarakatnya juga terpengaruh, dan mengakibatkan terhambatnya proses pelibatan masyarakat.</p>

No.	Kebijakan dan Rencana	Kondisi	Kajian	Kesimpulan
2.	<p>Rencana Pengorganisasian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan</p> <p>Peranan organisasi kerja masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, selain sebagai lembaga kegiatan pembangunan dan perawatan lingkungan pemukiman dan wisata, juga mendatangkan keuntungan ekonomi masyarakat di kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Berdasarkan karakter kegiatan masing-masing organisasi/kelompok kerja adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelompok kerja pembangunan dan pengelolaan lingkungan permukiman, memiliki unit-unit kerja sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Unit kerja administrasi Unit kerja fasilitas umum Unit kerja fasilitas sosial Unit kerja jaringan jalan & drainase Kelompok kerja pengelolaan lingkungan memiliki unit-unit kerja sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Unit kerja administrasi Unit kerja budaya Melayu dan Informasi Unit kerja fasilitas wisata darat Unit kerja fasilitas wisata laut Unit kerja perawatan lingkungan alam Unit kerja pelatihan dan workshop seni 	<ol style="list-style-type: none"> Hingga saat ini, sejak perencanaan dibuat pada tahun 2000, belum ada upaya untuk membentuk suatu organisasi dan tidak ada upaya meningkatkan organisasi kemasyarakatan yang ada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat didalam penataan kawasan. Kegiatan organisasi yang berlangsung pada saat ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang ada, seperti organisasi RT, RW, dan BKD. 	<ol style="list-style-type: none"> Dampak penggunaan pendekatan <i>top down planning</i> pada proses perencanaan penataan juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelibatan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan tersebut diakibatkan pada lambatanya tahap sosialisasi dari program pelibatan masyarakat, yang menjadikan lambatanya keseluruhan program kegiatan. 	<p>Pendekatan <i>top down planning</i> yang digunakan pada proses perencanaan penataan kawasan, termasuk didalam proses perencanaan tata ruang dan RTBL kawasan, disamping menyebabkan rencana pelibatan masyarakatnya juga terpengaruh, dan mengakibatkan terhambatnya proses pelibatan masyarakat, pada skhinya juga menghambat pembentukan dan pengembangan organisasi pelibatan masyarakat didalam penataan kawasan.</p>

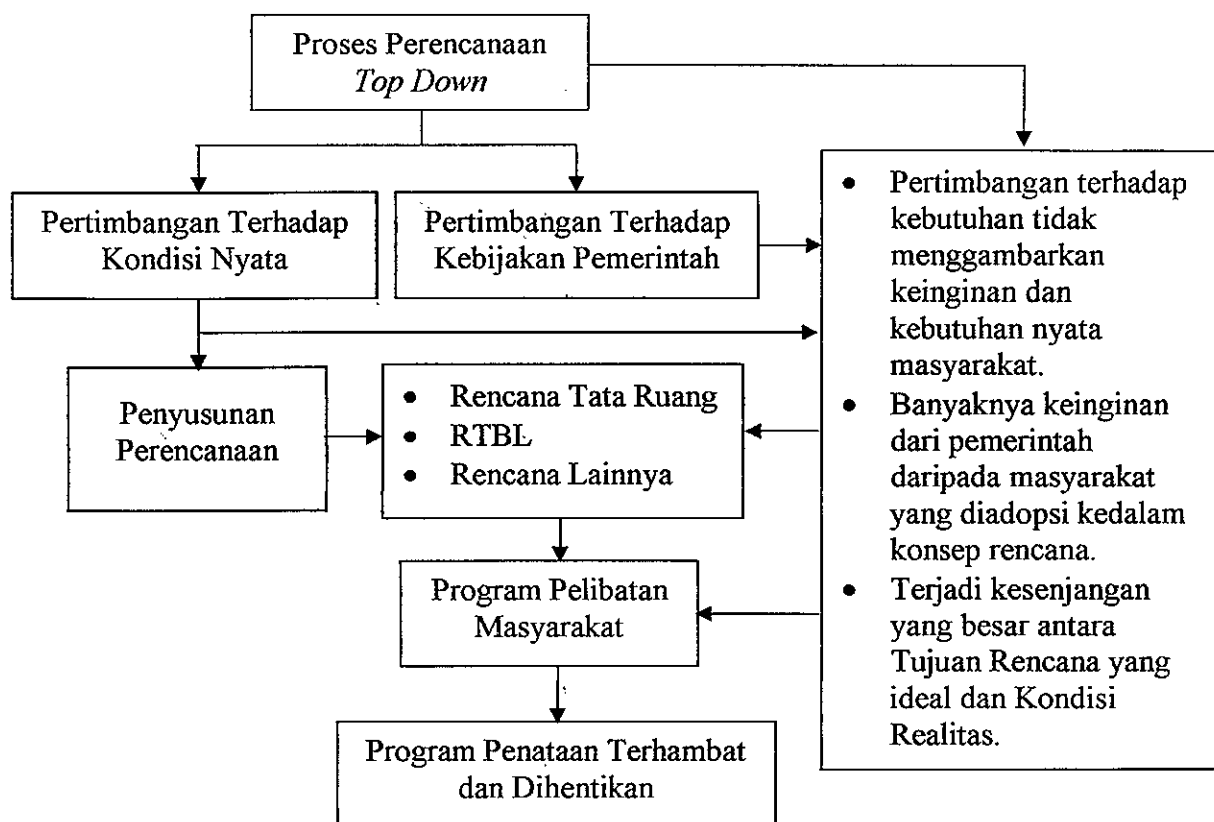
Sumber: Kajian Peneliti, 2005

Sebenarnya, proses perencanaan pelibatan masyarakat pada penataan kawasan telah logis dan sistematis, yaitu dimulai dari upaya untuk mensosialisasikan program kegiatan, hingga pada melibatkan masyarakat secara langsung kedalam proses penataannya. Tetapi, karena rencana penataan, yang termuat didalam rencana tata ruang dan RTBL dilakukan dengan pendekatan *top down planning*, maka program pelibatan dan partisipasi masyarakat juga tentunya dilakukan dengan pendekatan yang sama.

Oleh karena itu, program tersebut tidak dapat segera dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan tersebut diakibatkan pada lambatnya tahap sosialisasi, yang menjadikan lambatnya tahap-tahap selanjutnya. Dampak penggunaan pendekatan *top down planning* pada proses perencanaan penataan juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, program pelibatan masyarakat, termasuk pembentukan dan pengembangan organisasi pelibatan masyarakat tidak dapat segera dilaksanakan. Hambatan pelaksanaan tersebut diakibatkan pada lambatnya tahap sosialisasi dari program pelibatan masyarakat, yang menjadikan lambatnya keseluruhan program kegiatan pelibatan dan partisipasi masyarakat.

Jika digambarkan dalam sebuah diagram, proses kesesuaian arahan kebijakan, rencana, dan kondisi kawasan, dan dikaitkan dengan program pelibatan masyarakat didalam penataan kawasan dapat dilihat pada diagram berikut ini:



Sumber: Kajian Peneliti, 2005

GAMBAR 4.1
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN, RENCANA DAN KONDISI
KAWASAN DALAM PENATAAN KAWASAN TANJUNG MELAYU
BUNTUNG

4.2 Kajian Potensi Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam

Potensi masyarakat masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya dari aspek usia, agama, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat pendapatan dan serta stratifikasi sosial yang ada.

4.2.1 Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung paling banyak pada usia 10-14 tahun dan komposisi penduduk paling sedikit pada kelompok umur >55 tahun. Sedangkan jika dilihat dari jumlah usia produktif, penduduk Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang termasuk dalam kelompok usia produktif sebesar 36,81%. Sedangkan jumlah penduduk non produktif berjumlah 212 jiwa atau sekitar 40,23% dari total penduduk Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam.

Jumlah penduduk yang termasuk dalam klasifikasi usia produktif yang cukup besar (59,77%) tersebut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penduduk usia produktif tersebut dapat menjadi modal dan menjadi faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Dengan asumsi bahwa penduduk yang termasuk dalam usia produktif akan dapat menyumbangkan tenaganya yang diperlukan dalam proses Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, maka program penataan kawasan dapat mengandalkan partisipasi masyarakat, mengingat potensi penduduk dalam usia produktif yang relatif tinggi.

4.2.2 Agama

Kampung Melayu Tanjung Buntung mayoritas penduduknya adalah suku Melayu. Ciri khas suku Melayu adalah beragama Islam. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat yang bertempat tinggal di Kawasan Kampung Melayu

Tanjung Buntung beragama Islam. Namun demikian, di Kampung Melayu Tanjung Buntung tersebut telah berkembang tidak hanya didiami oleh suku Melayu saja, namun juga suku-suku lain. Sehingga, masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut tidak hanya beragama Islam, namun juga agama-agama lain. Agama-agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung lainnya adalah: Katholik, Kristen Protestan dan Budha.

Penduduk Kampung Melayu Tanjung Buntung yang beragama Islam merupakan penganut agama yang kuat, terlihat dari jumlah fasilitas keagamaan di kawasan studi berupa masjid dan TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) maupun pendidikan formal keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Selain itu juga adanya perkumpulan pengajian yang dilakukan setiap malam Jum'at di masjid setempat. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Asnawi sebagai berikut ini:

“Kampung kami sebagian besar orang Melayu. Agama yang dipeluk Islam dan kami taat menjalankan agama dan di kampung kami ada masjid, TPA untuk anak-anak dan madrasah. Masjid ini selain untuk sholat lima waktu juga untuk sholat Jum'at. Dan yang pasti setiap Malam Jum'at ada kelompok pengajian yang mengaji di masjid selain pengajian tiap hari untuk anak-anak di TPA sebelah masjid”. Lihat lampiran 1.19 butir 1.

Dengan adanya kelompok-kelompok keagamaan di Kampung Melayu Tanjung Buntung ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai faktor pendorong program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama pada proses sosialisasi program kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut

diharapkan akan adanya dukungan dari masyarakat setempat terutama informasi dan pemikiran berkaitan dengan Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

4.2.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung masih tergolong rendah, dimana penduduk yang telah mengenyam pendidikan formal paling banyak adalah lulusan SMP sebesar 24,49% penduduk atau sebanyak 120 jiwa dan penduduk yang hanya tamat SD sebesar 18,36%. Sedangkan penduduk yang tamat pendidikan formal yang lebih tinggi yaitu SMA sebesar 6,12% dan lulusan Akademi/ Perguruan Tinggi hanya 1 orang saja.

Tingkat pendidikan masyarakat Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung termasuk rendah yang diasumsikan bahwa pengetahuan mereka dalam hal penataan kawasan tersebut juga masih terbatas. Nur Yasin juga menyatakan bahwa:

"Kami ini bukanlah orang pintar. Paling-paling lulusan SMP. Kalau ditanya soal penataan, perencanaan dan hal-hal yang berbelit-belit kami tak tahu. Makanya kami ingin belajar kepada ibu Bappeda macam mana menata kampung kami agar lebih sehat, lebih bersih". Lihat lampiran 1.7 butir 2.

Oleh karenanya, dalam perencanaan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan Perencanaan Transaktif, yang memungkinkan masyarakat belajar pengetahuan teknis perencanaan dari perencana, sedangkan perencana belajar pengetahuan

eksperimental dari masyarakat setempat.

4.2.4 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dipengaruhi oleh kondisi geografis yang berupa daerah pesisir dengan mata pencaharian utama sebagai nelayan. Mata pencaharian masyarakat di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama kaum laki-laki tidak hanya satu pekerjaan saja. Artinya, mereka memiliki pekerjaan utama yang sebagian besar sebagai nelayan. Hal ini dikemukakan oleh Ilyas sebagai berikut:

“Kalau ditanya pekerjaan apa yang paling banyak di kampung ini ya nelayan. Namun, ya begini ini nasib kami. Paling sehari hanya dapat Rp. 25.000,-. Kadang tak ada tangkapan. Bagaimana harus memberi makan keluarga? Sedangkan mamaknya anak-anak tak bekerja. Yang mungkin ya cari pekerjaan sambilan. Kadang ngojek. Kalau kawan ada kerja di bangunan ya ikut aja. Kadang yang lain juga jadi buruh atau sekuriti pabrik saat tak melaut”. Lampiran 1.12 butir 2.

Sedangkan pekerjaan tambahan berupa pekerjaan-pekerjaan informal seperti: tukang bangunan, tukang ojek/supir maupun bekerja di industri kecil serta berdagang. Pekerjaan tambahan ini dilakukan saat mereka tidak melaut, yakni pada siang hari dan terutama pada saat musim utara, dimana gelombang besar dan hasil tangkapan tidak ada. Nelayan Kampung Melayu Tanjung Buntung hanya mampu melaut di lautan dangkal karena kemampuan kapal dan alat tangkap yang terbatas. Sedangkan kaum perempuan lebih banyak berdiam diri di rumah

mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari.

4.2.5 Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan masyarakat setempat dipengaruhi oleh mata pencahariannya. Mata pencaharian penduduk setempat sebagai nelayan dengan kemampuan melaut di perairan dangkal, menyebabkan pendapatan yang diterimanya kecil. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat setempat, didapatkan data bahwa pendapatan rata-rata masyarakat setempat per hari dari hasil melaut tidak menentu. Kadang-kadang mendapatkan hasil meskipun kecil, kadang-kadang tidak mendapatkan hasil sama sekali. Oleh karena itu, maka masyarakat setempat mencari alternatif pekerjaan lain selain sebagai nelayan. Dengan tingkat pendapatan yang rendah tersebut, menyebabkan masyarakat mencari alternatif pekerjaan tambahan sebagai tukang ojek, sopir, buruh bangunan, buruh industri kecil maupun berdagang. Pekerjaan tambahan tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dengan tingkat pendapatan rata-rata per hari sebesar Rp. 25.000,- seperti yang dinyatakan oleh Ilyas (lihat lampiran 1.12 butir 2).

“Kalau ditanya pekerjaan apa yang paling banyak di kampung ini ya nelayan. Namun, ya begini ini nasib kami. Paling sehari hanya dapat Rp. 25.000,-. Kadang tak ada tangkapan. Bagaimana harus memberi makan keluarga? Sedangkan mamaknya anak-anak tak bekerja. Yang mungkin ya cari pekerjaan sambilan. Kadang ngojek. Kalau kawan ada kerja di bangunan ya ikut aja. Kadang yang lain juga jadi buruh atau sekuriti pabrik saat tak melaut”.

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah tersebut mempengaruhi kontribusi masyarakat dalam proses penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan kontribusi yang mereka berikan dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung bukanlah materi, namun berupa tenaga. Semakin kaya seseorang, maka semakin sedikit pekerjaan yang dilakukan, namun kontribusi dalam bentuk materi semakin banyak. Sedangkan semakin rendah tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan, namun semakin sedikit materi yang dikeluarkan (Baross, 1993).

4.2.6 Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial merupakan pembagian masyarakat kedalam kelompok-kelompok masyarakat, dimana beberapa kelompok menerima penghargaan yang lebih baik dari kelompok yang lain. Hak-hak sekelompok orang berbeda dengan hak-hak kelompok-kelompok lain. Hak-hak ini selanjutnya berkaitan dengan hak dan kemampuan yang dimiliki sekelompok orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Perbedaan stratifikasi sosial tersebut berdasarkan kekuatan ekonomi, status dan kekuasaan.

Munculnya stratifikasi sosial muncul karena karakteristik yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Karakteristik masyarakat yang mayoritas suku Melayu yang beragama Islam memunculkan golongan pemuka agama Islam seperti kiayi dan ulama. Oleh karena itu, memunculkan kelembagaan non formal berkaitan dengan aktivitas keagamaan di Kawasan Kampung Melayu

Tanjung Buntung, seperti: takmir masjid dan kelompok pengajian. Selain itu ada juga lembaga formal yang tercipta dalam interaksi sosial di Kampung Melayu Tanjung Buntung dan lebih kearah politis. Hal ini tersirat dari pernyataan Bahrin sebagai berikut.

”Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung seharusnya dapat dilakukan dengan dukungan dari masyarakat setempat asal pemerintah jelas tujuan apa. Kami bisa memberi tahu kepada masyarakat. Kampung kami ada BPD, kebetulan kami salah satu anggota BPD di sini. Ada juga perkumpulan pengajian, karang taruna dan pengelola obyek wisata. Kalau pemerintah beritikad baik, tentunya menyampaikan rencana-rencananya kepada masyarakat dan kami bisa membantu. Kalaupun materi kami tidak mampu, tapi kami punya tenaga, punya informasi dan yang penting kami bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan perbaikan kampung”. Lihat lampiran 1.1 butir 1.

Tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat yang rendah, menyebabkan minimnya akses masyarakat terhadap penentu kebijakan. Namun demikian, akses mereka secara politis terwakili dengan adanya BPD (Badan Perwakilan Desa) serta keberadaan Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai pembantu aparat desa dalam proses pembangunan. Selain itu, di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung juga terdapat karang taruna dan pengelola obyek wisata.

Stratifikasi sosial ini merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan keberadaannya dapat

memberikan kontribusi terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung baik berupa materi maupun persepsinya (masukan, sumbang saran, tanggapan, informasi) terhadap Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Namun, hal yang paling penting adalah kemampuan yang dimilikinya untuk menggerakkan masyarakat untuk berperan serta aktif dalam program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

4.2.7 Rangkuman Kajian Karakteristik Masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung

Dari uraian dan kajian di atas, dapat terlihat beberapa karakteristik masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung yang diringkas sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan usia, perbandingan usia produktif dan non produktif penduduk di Kampung Melayu Tanjung Buntung sebanyak 59,77% termasuk dalam kategori penduduk usia produktif. Hal ini menyatakan bahwa penduduk di kawasan ini dapat memberikan dukungan kepada proses Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama dari faktor tenaga.
2. Mayoritas penduduk Kampung Melayu Tanjung Buntung adalah pemeluk agama Islam yang taat. Hal ini mendorong timbulnya perkumpulan-perkumpulan keagamaan seperti: takmir masjid dan kelompok pengajian. Kelompok/kelembagaan ini dapat mendorong program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama pada proses sosialisasi program kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang sampai ke masyarakat,

diharapkan akan adanya dukungan dari masyarakat setempat terutama informasi dan pemikiran berkaitan dengan Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap teknis penataan yang rendah, diharapkan akan terciptanya suatu proses perencanaan antara masyarakat dan perencana. Masyarakat belajar pengetahuan teknis perencanaan dari perencana, sedangkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari masyarakat setempat.
4. Mata pencaharian penduduk yang utama adalah sebagai nelayan. Namun demikian saat tidak melaut, mereka mencari pekerjaan tambahan berupa pekerjaan-pekerjaan informal. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya waktu luang dari masyarakat setempat. Waktu luang tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendorong program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama dalam hal pelibatan masyarakat pada program tersebut baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses implementasi program.
5. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah mempengaruhi kontribusi masyarakat dalam Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Kontribusi masyarakat setempat untuk program tersebut bukan dalam hal material, namun dalam hal sumbangan tenaga.
6. Adanya kelompok-kelompok dalam stratifikasi sosial masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa kelompok pengajian, BPD, RT dan RW serta kelompok karang taruna dapat menjadikan "jembatan" antara

pemerintah dan masyarakat setempat dalam hal sosialisasi program maupun dalam hal pemberian informasi, sumbang saran, masukan maupun tanggapan. Sedangkan kelompok pengelola kawasan wisata dalam berkontribusi terhadap Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa *sharing* dana yang didapatkan dari pengelolaan kawasan wisata rakyat untuk pendanaan progam penataan kawasan.

4.3 Kajian Implementasi Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam

Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam saat ini telah tersusun suatu Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Namun, dalam implementasi dan pelaksanaannya mengalami kendala-kendala sehingga program/kegiatan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal. Ada beberapa kendala yang menjadikan kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung belum dapat terlaksana dengan baik. Kendala-kendala tersebut antara lain (Analisis data primer, 2005):

1. Status Kepemilikan Tanah

Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung belum dapat terlaksana karena adanya permasalahan mengenai status kepemilikan tanah di kawasan tersebut. Status tanah di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung bukanlah milik masyarakat setempat, sehingga hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program penataan kawasan tersebut karena segala sesuatu yang menyangkut perubahan penggunaan dan bangunan

di atas tanah yang mereka tempati. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Bahrin yang mengatakan bahwa:

"Permasalahan utama tidak berjalannya Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung karena tidak jelasnya status tanah di kampung ini. Tanah yang ditempati oleh masyarakat bukanlah tanah milik pribadi, namun tanah milik orang lain. Kami hanya menumpang saja. Segala kebijakan tergantung dari para tuan tanah. Karena, masyarakat merasa tidak berkepentingan terhadap program tersebut". Lihat lampiran 1.1 butir 4.

Jika dirunut mengenai aspek legalitas tanah-tanah yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini merupakan tanah-tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam. Hal ini berbeda dengan pernyataan dari masyarakat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah-tanah milik tuan tanah. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat terhadap aspek hukum yang disebabkan akses mereka ke Pemerintah yang terbatas. Selain itu, adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut dengan mengaku tanah tersebut sebagai miliknya. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor mengapa kebijakan penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung belum dapat dilakukan karena tidak adanya dukungan masyarakat setempat. Dengan kata lain, kebijakan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat diimplementasikan dengan dukungan masyarakat jika masalah mendasar yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas telah teratasi. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko

Batam diharapkan dapat sebagai mediator dalam pemberian kejelasan status tanah tersebut antara “tuan tanah” dengan masyarakat setempat serta Otorita Batam. Masyarakat setempat diperbolehkan untuk mengurus kepemilikan tanah kepada Otorita Batam serta menyelesaikan permasalahan dengan “tuan tanah” dengan mediator pemerintah (Pemko Batam). Hal ini dianggap penting karena Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan salah satu kampung Melayu yang ada di Batam yang perlu untuk dilindungi.

2. Pendanaan

Aspek lain yang menjadi kendala dalam Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung adalah dalam hal pendanaan. Dana yang dibutuhkan dalam kegiatan penataan kawasan tersebut cukup besar, namun di sisi lain, pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kota Batam) kesulitan dalam pengalokasian pendanaan untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan pihak-pihak lain selain pemerintah daerah dalam hal penataan kawasan tersebut, seperti swasta (investor) dalam penyediaan prasarana dasar dan terutama adalah masyarakat setempat. Dari wawancara yang dilakukan dengan Amran (Ketua BPD) didapatkan beberapa penting berkaitan dengan pendanaan dalam Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, antara lain (lihat lampiran 1.15) dan Sobirin (lampiran 1.17) sebagai berikut:

- Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.
- Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sehingga sulit

mengharapkan pendanaan program penataan kawasan dari masyarakat.

- Adanya pengelolaan wisata rakyat yang menghasilkan pemasukan terutama dari retribusi parkir. Pemasukan ini dapat digunakan sebagai sumber pendanaan dalam program penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.
- Perlunya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat serta swasta dalam penataan kawasan wisata rakyat, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang pada akhirnya meningkatkan pemasukan dari pengelolaan obyek wisata tersebut.

3. Tingkat Pendapatan Masyarakat

Tingkat pendapatan masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung yang masih rendah berakibat kepada kontribusi masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan yang masih rendah. Masyarakat setempat cenderung menggantungkan program dan kegiatan dari pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan beban pendanaan kepada pemerintah (terutama Pemerintah Kota Batam).

Meskipun adanya kendala-kendala dalam Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung seperti tersebut di atas, namun terdapat potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut berupa pantai yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai obyek wisata rakyat. Obyek wisata tersebut sering disebut sebagai wisata rakyat karena pengelolaan kawasan wisata rakyat berupa pantai tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat dengan membentuk unit pengelolaan wisata rakyat. Wisata rakyat tersebut merupakan aset utama yang

dimiliki oleh Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dalam pengembangan kawasan tersebut. Pengelolaan wisata rakyat tersebut berupa pembangunan warung-warung yang menjual makanan dan minuman bagi pengunjung, menyediakan lahan parkir bagi kendaraan wisatawan serta meberlakukan retribusi parkir bagi kendaraan wisatawan. Uang yang terkumpul dari retribusi parkir tersebut dibagi untuk beberapa alokasi kegiatan, seperti yang dijelaskan oleh Chairul sebagai berikut ini:

"Uang yang terkumpul dari retribusi parkir hanya cukup untuk itu-itu saja. Paling honor penjaga, perbaikan parkir dan perbaikan warung. Kalaupun ada sisa lebih paling buat renovasi lapangan volley, masjid TPA. Lihat lampiran 1.2 butir 3.

Dari uraian tersebut di atas, retribusi parkir dari pengelolaan wisata rakyat dialokasikan untuk perbaikan dan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, di antaranya adalah:

1. dana operasional dan perbaikan obyek wisata rakyat
 - honor penjaga obyek wisata rakyat
 - perbaikan lapangan parkir
 - penataan warung-warung makanan dan minuman
2. perbaikan sarana olah raga berupa pembangunan dan perbaikan lapangan volley
3. perbaikan dan pembangunan sarana keagamaan.
 - pembangunan dan renovasi masjid
 - perbaikan TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an)

4.4 Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam

Persepsi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam pada dasarnya setuju berkaitan dengan kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung selama untuk usaha-usaha perbaikan lingkungan kampung tersebut. Perbaikan lingkungan merupakan substansi dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung karena adanya permasalahan lingkungan kampung sehingga diperlukan suatu kegiatan penataan kawasan kampung tersebut.

Permasalahan sarana dan prasarana lingkungan yang dapat diidentifikasi berdasarkan informasi dan persepsi masyarakat serta observasi lapangan antara lain adalah:

1. Jalan Desa

Jalan desa yang ada merupakan *entry point* Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa jalan tanah. Pada musim hujan, jalan desa tersebut becek dan susah dilewati (observasi lapangan tanggal 24 Mei 2005). Padahal jalan desa merupakan prasarana vital yang diharapkan dapat membuka isolasi kawasan dan dapat menggerakkan roda ekonomi masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Bahrin salah satu anggota BPD setempat.

“Jalan memang merupakan hal penting untuk membuka diri ke kawasan lain. Tapi dengan kondisi seperti ini bagaimana bisa meningkatkan ekonomi rakyat? Padahal sudah sejak lama kerusakan jalan ini terjadi” (lihat Lampiran 1.1 butir 2).

Selain itu jalan desa merupakan akses utama menuju obyek wisata rakyat. Kondisi jalan desa yang buruk tersebut menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan ke obyek wisata rakyat menurun. Permasalahan menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, meskipun wisatawan lokal, mempengaruhi tingkat pendapatan dari retribusi parkir yang dikenakan kepada pengunjung/wisatawan yang menggunakan kendaraan bermotor untuk mencapai ke lokasi/obyek wisata rakyat tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Chairul, bahwa:

“Memang benar kondisi jalan yang buruk menghambat roda perekonomian masyarakat, yang menyebabkan turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke obyek wisata rakyat. Meskipun wisatawan lokal, namun yang penting mereka bawa kendaraan dan kena parkir. Kalau mereka yang bawa kendaraan enggan berkunjung, maka retribusi parkir juga berkurang”. (Lihat Lampiran 1.2)

Rencana perbaikan jalan dari pemerintah memang sudah didengar dan pengukuran-pengukuran terhadap jalan juga sudah dilakukan, namun sampai sekarang realisasi perbaikan jalan tersebut belum juga terlaksana, seperti yang dikatakan oleh Bahrun:

“Rencana perbaikan jalan memang sudah terdengar. Masyarakat juga sudah banyak yang tahu ada orang ngukur-ngukur jalan. Tapi sampai sekarang tidak pula terlaksana.” (Lihat lampiran 1.1 butir 3).

2. Saluran Drainase

Sistem drainase di kawasan studi termasuk buruk dengan saluran yang tersumbat dan tertimbun tanah. Hal ini mengakibatkan banjir di kawasan studi saat musim hujan datang dan memperparah kerusakan jalan desa menuju Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Di samping itu, banjir di kawasan studi diperparah dengan adanya reklamasi pantai di sebelah timur kawasan studi (sekitar Teluk Tering) untuk lahan perumahan. Hal ini diperkuat oleh Rifai Ketua RT 1 yang menyatakan:

“Drainase di kampung ini termasuk parah. Kalau musim hujan sering banjir. Lebih-lebih adanya reklamasi pantai di Teluk Tering memperparah keadaan. Sepertinya pemerintah lebih memihak kepada investor. Sedang masyarakat kecil selalu dirugikan. Program-program pembangunan tidak pernah sampai ke kampung ini. Padahal kampung ini adalah cikal bakal Kota Batam”. (Lihat Lampiran 1.3)

3. Air Bersih

Kebutuhan air bersih untuk Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dari 5 buah perigi di RT 2 dengan perincian 3 perigi (sumur) untuk kebutuhan mandi dan mencuci, serta 2 perigi (sumur) untuk mencukupi kebutuhan air minum, sebagaimana dinyatakan oleh Rifai, Ketua RT 2:

“Di RT 2 terdapat 5 perigi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan air. Perigi yang dapat keluar air kebetulan hanya di RT kami. 3 untuk mandi dan nyuci baju dan 2 untuk air minum”. (Lihat Lampiran 1.4)

Anwar, masyarakat setempat menambahkan pernyataan Rifai yang menyatakan:

“Meski saat ini perigi yang ada masih mencukupi, namun bukit sebelah barat kampung mulai dibangun perumahan. Belum lagi air di perigi mulai sadah dan penduduk makin tambah aja. Sedang air ledeng belum juga masuk ke kampung”. (Lihat Lampiran 1.5)

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang timbul saat ini adalah beralihnya fungsi tangkapan air di perbukitan sebelah barat kawasan studi menjadi kawasan perumahan. Peralihan fungsi tersebut dikawatirkan akan berakibat pada berkurangnya sumber air masyarakat setempat. Selain itu juga adanya intrusi air laut yang menyebabkan tingkat kesadahan pada air di sumur penduduk tersebut yang terus meningkat. Terlebih lagi penambahan jumlah penduduk kawasan studi yang berdampak pada penambahan kebutuhan akan air bersih yang terus meningkat, sedangkan kapasitas penyediaan air bersih dari sumur-sumur di kawasan studi cenderung menurun. Sedangkan jaringan pelayanan PT. Adhya Tirta Batam (ATB) sebagai perusahaan penyedia air bersih di Kota Batam belum melayani Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

4. Listrik

Kebutuhan akan listrik di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dengan aki yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jaringan listrik dari PLN saat ini belum masuk ke Kawasan Kampung Melayu Tanjung

Buntung karena keterbatasan ekonomi penduduk setempat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan pemasangan baru. (Lihat lampiran 1.6).

5. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi lingkungan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung tergolong buruk karena kesadaran penduduk akan kesehatan masih rendah. Tiap-tiap rumah di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini belum memiliki MCK pribadi. Selama ini limbah pribadi (MCK) dari masyarakat setempat dilakukan dan langsung dibuang ke laut. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kadir:

"Kalau ditanya soal kakus atau buang hajat, masyarakat di sini melakukannya di sana, dekat semak-semak (hutan mangrove) langsung ke laut. Masyarakat di sini mana ada punya kakus sendiri. Toh selama ini tidak ada apa-apa. Tidak ada penyakit".

6. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa: fasilitas keagamaan (masjid, TPA), fasilitas olahraga (lapangan volley), fasilitas pendidikan (madrasah) serta fasilitas rekreasi (wisata rakyat). Seperti yang dinyatakan Rahman:

"Fasilitas-fasilitas yang ada di RT 3 ada banyak. Ada mesjid, TPA, lapangan volley, serta madrasah. Bahkan di sebelah sana ada wisata rakyat yang lumayan ramai dikunjungi wisatawan hari Sabtu sore serta hari Minggu.

Lihat lampiran 1.8.

Pembangunan dan perbaikan fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan yang mungkin untuk dimanfaatkan. Sumber pendanaan dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas sosial dan umum berasal dari: infaq masjid, pemasukan dari wisata rakyat serta sumber-sumber lain. Hal ini disampaikan oleh Asnawi sebagai berikut:

“Pembangunan dan perbaikan masjid diambil dari infaq masjid tiap hari Jum’at. Namun demikian infaq yang terkumpul juga untuk memperbaiki Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA)”. Lihat lampiran 1.9. butir 2.

Nur Fauzi juga menambahkan bahwa sumber pendanaan lain yang digunakan untuk perawatan lapangan olah raga berasal dari retribusi parkir obyek wisata rakyat. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Retribusi parkir dari pengunjung obyek wisata rakyat untuk perbaikan lapangan parkir dan membayar honor penjaga parkir. Namun demikian, ada juga untuk perbaikan lapangan olah raga. Terutama jika mendekati Agustusan”. Lihat lampiran 1.10.

Selain itu, ada juga sumber pendanaan lain yang tidak menentu, seperti yang dinyatakan oleh Syamsul sebagai berikut ini:

“Besok minggu (29 Mei 2005) Pak Ismeth (calon Gubernur Provinsi Kepri, kebetulan masuk masa Kampanye Pilkada Gubernur Kepri) rencananya akan datang ke Tanjung Buntung menyerahkan bantuan untuk masjid dan pembangunan lapangan olahraga”. Lihat lampiran 1.11.

Namun demikian, Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini belum memiliki fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat menunjang perkembangan kawasan. Pembangunan fasilitas yang ada sekarang ini berupa pelantar (dermaga rakyat) tidak dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas tersebut diharapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga akan dapat dimanfaatkan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam hal penataan kawasan. Fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut antara lain adalah: tempat pendaratan ikan dan pasar ikan yang dapat menampung hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh nelayan setempat. Dengan adanya tempat pendaratan ikan dan pasar ikan tersebut, diharapkan terjadi transaksi perdagangan ikan di Kampung Melayu Tanjung Buntung, sehingga nelayan setempat tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan berupa biaya transportasi yang diperlukan untuk menjual ikan di tempat lain. Hal ini didasari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh masyarakat setempat, di antaranya adalah yang dinyatakan oleh Ilyas yang menyatakan:

“Di Kampung ini ada pelantar yang dibangun oleh pemerintah. Namun lama tidak digunakan karena jarak antara pelantar dengan muka air laut terlalu tinggi dan tidak dapat dijangkau perahu-perahu nelayan.”

Pernyataan di atas ditambahkan oleh Irwanudin yang menyatakan:

“Pelantar (dermaga rakyat) tersebut tidak dimanfaatkan karena pemerintah

kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Seharusnya yang terpenting adalah tempat pendaratan ikan dan pasar ikan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi keluar kawasan untuk menjual ikannya”.

Syaifudin sebagai nelayan setempat juga mencoba memberikan argumen perlunya pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pasar ikan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dari segi ekonomi sebagai berikut ini:

“Selama ini kami menjual ikan ke pasar yang berada di luar kampung. Ongkos kendaraan bertambah, tapi harga ikan tak menentu. Nelayan sering kecewa. Mereka ingin pasar ikan ada di kampung ini, sehingga tidak perlu ada lagi ongkos transpot.” Lihat lampiran 1.14.

Informasi mengenai permasalahan penyediaan sarana dan prasarana lingkungan di Kawasan Tanjung Buntung ini dapat dijadikan sebagai masukan program-program apa saja yang harus dilakukan di Kawasan Kampung Melayu berkaitan dengan penataan kawasan. Program-program tersebut memerlukan dukungan dana baik dari pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat setempat. Namun demikian, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat setempat juga mengalami kendala dalam hal pendanaan, terutama dari masyarakat setempat yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya program-program peningkatan pendapatan masyarakat.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dengan mata pencaharian sebagai nelayan disebabkan karena selama ini mereka mencari ikan di lautan dangkal di sekitar Teluk Tering dengan nilai ekonomis hasil tangkapan yang rendah. Mereka belum sanggup untuk melaut di lautan dalam dengan hasil tangkapan bernilai ekonomis tinggi karena keterbatasan alat tangkap berupa perahu tempel. Sebagaimana diungkapkan oleh Mahmudi:

"Nasib kami sebagai nelayan ini sungguh sengsara. Pendapatan kami dari melaut tiap hari maksimal Rp. 30.000,- bahkan terkadang tidak dapat hasil sama sekali. Padahal kalau melaut juga pakai minyak (BBM, solar) dengan cara ngutang. Perahu kami hanya dapat menjangkau perairan dangkal dengan jumlah tangkapan yang sedikit. Itupun paling-paling ketam, udang dan ikan-ikan murah. Terlebih lagi dengan adanya reklamasi berdampak sangat besar pada tangkapan ikan karena rusaknya ekosistem laut". Lihat Lampiran 1.16.

Oleh karena itu, masyarakat berpendapat bahwa dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung jika menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, maka tahap awal yang perlu diatasi adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Sebagaimana dikatakan oleh Amran, Ketua BPD setempat.

"Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang penting bukan hanya materi rencana penataan, namun juga dari segi pendanaan untuk pelaksanaan rencana. Kalau hanya menggantungkan harapan kepada

Pemerintah dari segi pendanaan, akan sulit karena keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah. Sedangkan kalau mengharapkan swadaya masyarakat, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah tentunya masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam penataan kawasan dalam bentuk materi”.

Lihat lampiran 1.15.

Hal ini diperjelas oleh pernyataan dari Syamsul yang menyatakan:

“Agar partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan dapat terwujud, maka jalan pertama yang harus ditempuh adalah upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan dapat dengan cara pemberian kredit bergulir kepada nelayan. Nelayan membentuk kelompok (badan usaha), mengajukan kredit, setelah kredit cair, tahap awal dibelikan beberapa motor tempel dengan kemampuan yang lebih besar. Kalau kemampuannya meningkat, perahu masyarakat setempat dapat melaut ke laut dalam dengan tangkapan ikan yang lebih ekonomis. Dari hasil tangkapan tersebut disisihkan untuk kelompok sebagian. Hasil yang terkumpul kemudian dibelikan motor tempel lagi untuk anggota kelompok yang lain. Sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat”. Lampiran 1.11 butir 2.

Dari pendapat masyarakat tersebut di atas, terlihat bahwa masyarakat mengharapkan pemerintah dapat menyediakan kredit usaha maupun pinjaman modal bergulir yang digunakan untuk pengadaan motor tempel yang dapat digunakan oleh nelayan setempat untuk melaut di laut dalam. Hasil yang didapat tentunya jauh lebih besar, sehingga dapat digunakan untuk pengembalian modal

usaha yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan lain di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, tentunya akan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, terutama dari segi finansial. Sehingga dukungan masyarakat setempat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung akan meningkat pula.

Selain itu, pendanaan yang diperlukan dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat berasal dari pemasukan wisata rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat. Pemasukan dari wisata rakyat tersebut selain dialokasikan untuk biaya operasional dan pemeliharaan obyek wisata rakyat tersebut, sebagian juga dapat dialokasikan untuk Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Hal ini dikemukakan oleh Sobirin seperti tersebut di bawah ini:

“Jika wisata rakyat bisa ditata dengan baik, saya yakin akan banyak pengunjung yang datang. Semakin banyak pengunjung yang datang terutama yang memakai kendaraan, semakin banyak pemasukan dari retribusi parkir. Maka akan semakin banyak materi yang dapat dimanfaatkan untuk penataan kawasan”. Lampiran 1.17.

Namun demikian, dalam pengelolaan wisata ke depan, perlu adanya konsep pengembangan yang jelas dari pemerintah setempat. Jangan sampai dengan adanya pengembangan obyek wisata rakyat, masyarakat setempat hanya sebagai penonton saja tanpa adanya peran dari masyarakat setempat, sebagaimana yang dikatakan oleh Amran sebagai berikut:

"Masyarakat memiliki wisata rakyat yang dapat dimanfaatkan dan dikelola. Jika pemerintah akan mengelola wisata rakyat ini, maka harus ada konsep yang jelas. Masyarakat setempat juga harus dilibatkan dalam penataan dan pengelolaan obyek wisata tersebut.". Lampiran 1.15 butir 2.

Selain itu, wisata yang berkembang tidak justru menimbulkan kemaksiatan di kawasan wisata rakyat tersebut, sebagaimana *image* negatif yang disandang dunia pariwisata Indonesia maupun dunia pada umumnya. Kegiatan wisata yang diperkenankan merupakan kegiatan wisata alam (memancing, berenang, melihat pemandangan maupun melihat matahari terbit/ *sunrise*) maupun kegiatan wisata budaya (rumah tradisional Melayu, seni tradisional, kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta upacara adat Melayu). Pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut di atas disampaikan oleh Abdul Syukur sebagai berikut ini:

"Yang penting dalam pengembangan wisata, di kampung ini tidak ada kemaksiatan. Tidak ada orang membuka aurat, minum-minuman maupun melakukan tindakan maksiat". Lampiran 1.19.

Hal ini juga juga didukung oleh pendapat Arwani yang menyatakan bahwa:

"Kampung ini sendiri juga memiliki potensi obyek wisata alam. Orang dapat berenang, melihat pemandangan alam pagi serta sore. Bisa juga mancing di pelantar dekat obyek wisata rakyat. Kalau tidak juga bisa melihat kebudayaan yang ada di kampung ini.". Lihat lampiran 1.20.

Ahmad Fatah juga memberikan alternatif wisata yang dapat dikembangkan yang berpendapat sebagai berikut ini:

“Jika Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung akan dikembangkan menjadi kawasan wisata, maka ada potensi wisata yang dapat dikembangkan terutama wisata budaya dan atraksi keagamaan yang dimiliki Kampung Melayu Tanjung Buntung”. Lampiran 1.18.

Pengelolaan dan penataan obyek wisata rakyat diperlukan untuk mencapai konsep pengembangan wisata di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Penataan obyek wisata berupa peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang dapat mendukung perkembangan wisata rakyat tersebut, sehingga karakteristik wisatawan yang berkunjung tidak lagi sebatas wisatawan lokal, namun juga wisatawan domestik yang berasal dari luar Kota Batam. Hal ini dikemukakan oleh Chairul sebagai berikut ini:

“Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke obyek wisata rakyat perlu dilakukan penataan dan pengelolaan wisata rakyat yang lebih baik. Jika hanya mengandalkan pemasukan dari retribusi parkir, maka dana yang dibutuhkan tidak cukup. Padahal potensi wisata rakyat berupa pemandangan pantai cukup bagus. Sayang jika tidak dikembangkan secara maksimal. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan obyek wisata rakyat”. Lampiran 1.2 butir 2.

Hal ini didukung oleh pernyataan Amran sebagai Ketua BPD setempat sebagai berikut:

"Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam penataan dan pengembangan obyek wisata rakyat perlu ditingkatkan. Pemerintah yang menata obyek wisatanya dari pembuatan toilet, tempat peneduh, serta perbaikan jalan masuk. Masyarakat dapat menyediakan penginapan untuk tamu yang akan menginap, maupun tanaman peneduh agar lebih nyaman".

Lampiran 1.15 butir 3.

Dari pendapat masyarakat yang diurai di atas tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa pengelolaan dan penataan obyek wisata rakyat perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat. Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan dalam penataan dan pengembangan obyek wisata rakyat berupa tempat berteduh baik *gazebo* maupun tanaman peneduh, toilet, jalan masuk menuju obyek wisata maupun penginapan. Untuk tanaman peneduh dapat diserahkan kepada masyarakat setempat/ pengelola wisata rakyat dalam hal pengadaan dan pemeliharannya. Selain itu, dalam penyediaan penginapan dapat menggunakan rumah-rumah penduduk setempat yang digunakan sebagai *homestay* yang memenuhi standar penginapan. Sedangkan penataan obyek wisata berupa pembangunan *gazebo*, toilet serta peningkatan jalan masuk ke obyek wisata, perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah setempat dalam penataan kawasan wisata tersebut.

Usulan program penataan kawasan yang berasal dari masyarakat setempat seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan berkaitan dengan Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Permasalahan tersebut berupa status kepemilikan tanah

yang ditempati masyarakat setempat yang dikuasai oleh “tuan tanah”. Padahal, tanah tersebut merupakan Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam yang belum diberikan hak atas tanah kepada siapapun. Anggapan masyarakat bahwa tanah tersebut merupakan milik “tuan tanah” mengakibatkan masyarakat menjadi apatis terhadap program penataan kawasan tersebut karena segala sesuatu yang menyangkut perubahan penggunaan dan bangunan di atas tanah mereka sangat tergantung dari kebijakan tuan tanah, sebagaimana dinyatakan oleh Bahrin berikut ini:

”Permasalahan utama tidak berjalannya Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung karena tidak jelasnya status tanah di kampung ini. Tanah yang ditempati oleh masyarakat bukanlah tanah milik pribadi, namun tanah milik orang lain. Kami hanya memumpang saja. Segala kebijakan tergantung dari para tuan tanah. Karena, masyarakat merasa tidak berkepentingan terhadap program tersebut. Namun jika tercipta lingkungan yang lebih baik, maka sah-sah saja”. Lampiran 1.1 butir 4.

Pendapat di atas, didukung oleh Chairul yang memberikan pernyataan sebagai berikut ini:

”Namun jika tujuannya (Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung) baik, sah-sah saja. Pemerintah diminta untuk menjadi penengah antara pemilik tanah dengan masyarakat di sini dalam pemberian status tanah”. Lampiran 1.2 butir 4.

Implementasi kebijakan penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilakukan dengan dukungan masyarakat setempat jika masalah mendasar yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat seperti yang telah dijelaskan di atas telah teratasi. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko Batam diharapkan oleh masyarakat dapat sebagai mediator dalam pemberian kejelasan status tanah tersebut antara tuan tanah dengan masyarakat setempat bahkan juga Otorita Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Tanah di Pulau Batam agar memperoleh kejelasan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Masyarakat setempat diperbolehkan untuk mengurus kepemilikan tanah tersebut kepada Otorita Batam yang dilanjutkan kepada Pemerintah Kota Batam, dan pengalihan “kepemilikan” tanah antara “tuan tanah” dengan masyarakat dilakukan dengan cara jual beli dan Pemerintah Daerah sebagai penjaminnya. Permasalahan tersebut perlu diatasi agar Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilaksanakan, sehingga Kampung Melayu Tanjung Buntung sebagai salah satu kampung Melayu di Kota Batam dapat terlindungi keberadaannya. Solusi permasalahan di atas dikemukakan oleh Amran sebagai berikut ini:

”Dalam hal pemberian kejelasan hak atas tanah, sebaiknya melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator. Hal ini karena Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan salah satu perkampungan Melayu di Kota Batam yang tergolong tua dan seharusnya dilindungi keberadaannya. Pemerintah Daerah diminta untuk bersedia menjadi penjamin masyarakat setempat, sedangkan pengalihan hak atas tanah dilakukan dengan cara jual beli, dan pembayarannya dengan cara angsuran kepada Pemerintah Daerah

sebagai pihak penjamin.”

Dari uraian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dan usulan program dari masyarakat setempat dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL IV.3
PERMASALAHAN DAN USULAN PROGRAM PENATAAN KAWASAN
KAMPUNG MELAYU TANJUNG BUNTUNG, KOTA BATAM

Permasalahan Mendasar dan Usulan Program	
Permasalahan	Usulan Program
Permasalahan status kepemilikan tanah/lahan yang ditempati masyarakat setempat yang dikuasai oleh “tuan tanah”	Pemberian kejelasan status kepemilikan tanah/lahan dengan Pemko Batam sebagai mediator
Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang menyebabkan rendahnya kontribusi masyarakat terhadap Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	1. Kredit usaha bergulir 2. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Potensi wisata rakyat yang belum dikelola secara profesional dan maksimal	1. Peningkatan jalan 2. Penataan obyek wisata 3. Manajemen pengelolaan obyek wisata rakyat
Jalan desa berupa tanah, yang susah dilalui waktu musim hujan	Peningkatan kualitas jalan desa
Saluran drainase yang tersumbat dan tertimbun tanah	Penataan sitem drainase kawasan
Keterbatasan sumberdaya air bersih dan penambahan jumlah penduduk	Penyediaan sistem pelayanan air bersih
Belum adanya pelayanan listrik dari PLN	Penyediaan sistem pelayanan listrik
Buruknya sanitasi lingkungan di kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung	Perlunya penyediaan MCK komunal
Belum adanya fasilitas sosial dan umum yang dapat meningkatkan perkembangan kawasan dan kurangnya fasos dan fasum yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat	1. Perlunya Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan 2. Perbaikan sarana olah raga dan sarana keagamaan

Sumber: Penulis, 2005

4.5 Kajian Faktor-faktor yang Dapat Mempengaruhi dan Mendorong Pelibatan Masyarakat dalam Penataan Kawasan

Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dan program yang perlu dilakukan untuk dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya. Program-program/kegiatan tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Daerah dan terutama adalah masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat setempat tersebut berupa persepsi masyarakat terhadap kegiatan penataan kawasan maupun keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam hal pendanaan, tenaga maupun pemikiran-pemikiran. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan tersebut, sehingga keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam kegiatan penataan kawasan dapat maksimal dan dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penataan kawasan tersebut.

Bab sebelumnya (Bab II) telah merumuskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong pelibatan masyarakat dalam penataan kawasan yang terdiri dari: faktor karakteristik masyarakat, aspek kelembagaan serta aspek keruangan. Jika dikaitkan dengan kondisi eksisting yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terdiri dari:

1. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat yang dapat memengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilihat dari:

- Kelompok Usia

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kampung Melayu Tanjung Buntung lebih banyak termasuk dalam klasifikasi usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia non produktif (59,77% ; 40,23%). Banyaknya jumlah penduduk dalam klasifikasi usia produktif, menunjukkan bahwa adanya sumberdaya yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama kegiatan-kegiatan yang padat karya.

- Agama

Mayoritas penduduk Kampung Melayu Tanjung Buntung adalah pemeluk agama Islam yang taat. Hal ini mendorong timbulnya perkumpulan-perkumpulan keagamaan seperti: takmir masjid dan kelompok pengajian. Kelompok/kelembagaan ini dapat mendorong program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terutama pada proses sosialisasi program kepada masyarakat. Dengan adanya informasi yang sampai ke masyarakat, diharapkan akan adanya dukungan dari masyarakat setempat terutama informasi dan pemikiran berkaitan dengan Program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

- **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Melayu Tanjung Buntung termasuk dalam kategori rendah, dimana tingkat pendidikan formal paling banyak adalah lulusan SMP sebesar 24,49% atau sebanyak 120 jiwa dan lulusan SD sebesar 18,36% atau sebesar 90 jiwa. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diasumsikan pengetahuan mereka tentang penataan kawasan juga rendah. Hal ini dapat dieliminasi dengan pendekatan perencanaan transaktif yang memungkinkan adanya interaksi antara perencana dengan masyarakat setempat. Masyarakat belajar pengetahuan teknis perencanaan dari perencana, sedangkan perencana belajar pengetahuan eksperimental dari masyarakat setempat.

- **Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan yang melaut pada malam hari memungkinkan adanya waktu luang masyarakat, terutama kaum laki-laki pada siang dan sore hari. Waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat setempat ini memungkinkan mereka untuk terlibat aktif dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung baik berupa pemikiran dalam forum pertemuan maupun dalam kegiatan yang bersifat padat karya.

- **Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah tersebut mempengaruhi kontribusi masyarakat dalam proses penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah

menyebabkan kontribusi yang mereka berikan dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung bukanlah materi, namun berupa tenaga.

2. Faktor Kelembagaan

Kelembagaan-kelembagaan yang bersifat organisasi normatif yang ada saat ini dapat digunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Kelembagaan-kelembagaan yang ada di kawasan ini terdiri dari:

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dahulu bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Dersa (LKMD) merupakan suatu lembaga formal di tingkat desa yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Lurah. Lembaga ini juga berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Keberadaan BPD di Kelurahan Bengkong Laut yang bidang tugasnya meliputi seluruh Kelurahan Bengkong Laut, termasuk di dalamnya Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, diharapkan dapat mendorong kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang menampung aspirasi masyarakat kampung tersebut dan dapat mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan penataan kawasan. Hal ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena anggota dari BPD tersebut merupakan pemuka-

pemuka agama, pemuka masyarakat serta pengurus-pengurus RT/RW setempat.

- Ta'mir Masjid dan Kelompok Pengajian

Ta'mir masjid dan kelompok pengajian merupakan forum-forum keagamaan dengan intensitas pertemuan tiap minggu yang cukup tinggi (lihat lampiran 1.9). Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai media sosialisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Adanya sosialisasi tersebut menyebabkan masyarakat setempat mengetahui program-program yang akan dilakukan dan mengetahui apa saja yang dapat mereka berikan untuk tercapainya penataan kawasan karena manfaat dari adanya penataan kawasan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.

- Pengelola Wisata Rakyat

Kelompok pengelola wisata rakyat saat ini merupakan kelompok yang telah aktif dalam kegiatan penataan kawasan. Kelompok ini saat ini mengelola wisata rakyat yang berupa perbaikan dan penataan obyek wisata dan mengelola pemasukan yang dihasilkan dari retribusi kendaraan pengunjung obyek wisata (wisatawan). Hasil dari retribusi tersebut digunakan untuk pendanaan program-program/kegiatan-kegiatan penataan kawasan, seperti perbaikan dan renovasi fasilitas olah raga dan fasilitas keagamaan.

3. Faktor Keruangan

Faktor keruangan yang mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat

dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung adalah karakteristik permukiman di kawasan studi yang berupa perkampungan. Perkampungan, merupakan bentuk permukiman yang unik dengan masyarakat yang beraneka ragam (heterogen). Kampung juga memiliki dimensi-dimensi yang kontras, antara kota-desa, tradisional-modern dan formal-tak formal, yang memberi corak khas pada kesempatan kerja, pengaturan perumahan, hubungan sosial dan keluarga, gerak-gerik ekonomi, dan sebagainya, yang membuat kampung berbeda dengan daerah "gubuk-gubuk" di kota, ataupun permukiman liar kelompok miskin. Sehingga dari karakteristik permukiman di kawasan tersebut sebagai suatu kampung, memungkinkan interaksi yang kuat antar individu di kawasan tersebut. Selain itu karakteristik masyarakat kampung adalah masyarakat dengan sifat gotong-royong dan tolong-menolong yang tinggi. Sifat-sifat inilah yang dapat digunakan untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

4.6 Kajian Rekomendasi Penataan Kawasan

Kajian rekomendasi penataan kawasan ini mengkaji mengenai program/kegiatan yang dilakukan dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, skala prioritas kegiatan/program dan keterlibatan masyarakat dalam program/kegiatan tersebut. Berdasarkan analisis dan kajian sebelumnya, maka dapat dirangkum beberapa program/kegiatan dalam hal Penataan Kawasan

Kampung Melayu Tanjung Buntung. Rangkuman kegiatan-kegiatan itu antara lain adalah:

- Pemberian kejelasan status atas tanah
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Pengelolaan obyek wisata rakyat
- Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan

Implementasi kegiatan-kegiatan tersebut didasarkan oleh skala prioritas kegiatan, sehingga dalam implementasinya dapat dibagi menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu: kegiatan-kegiatan dalam tahap awal dan kegiatan-kegiatan tahap lanjutan. Tahap awal kegiatan merupakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu yang didasarkan dari tingkat penting-kurang penting. Sedangkan tahap lanjutan merupakan program/kegiatan yang dapat dilakukan setelah permasalahan mendasar yang dihadapi Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat teratasi dalam kegiatan/program pada tahap awal. Tahapan program/kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung terdiri dari:

a. Tahap Awal

Tahap awal Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Dengan kata lain, tahap awal ini merupakan *entry point* kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap awal terdiri dari:

- **Kejelasan Hak Atas Tanah**

Pemberian kejelasan hak atas tanah kepada masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan tahapan awal yang harus dilakukan agar penataan kawasan di Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat dilakukan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Permasalahan hak atas tanah di Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan permasalahan dasar yang dihadapi oleh masyarakat setempat kaitannya dengan penataan kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung hampir 70% dari total keseluruhan kawasan dikuasai oleh tuan-tuan tanah, sisanya merupakan kawasan terbuka berupa jalan desa, hutan mangrove, serta fasilitas sosial lainnya (masjid, TPA, lapangan olah raga dan wisata rakyat). Penguasaan tanah di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung oleh "tuan tanah", dikhawatirkan akan terjadi peralihan fungsi atas tanah yang ditempati masyarakat setempat sesuai keinginan tuan tanah. Peralihan fungsi tanah tersebut dikhatirkan menghilangkan nilai-nilai budaya masyarakat setempat

Hal yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang penetapan Kawasan Cagar Budaya Kampung-kampung Melayu di Kota Batam, salah satunya adalah Kampung Melayu Tanjung Buntung. Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kampung Melayu Tanjung Buntung tersebut diharapkan dapat melestarikan budaya-budaya Melayu yang ada di kampung tersebut yang

merupakan cikal-bakal Kota Batam. Penetapan Kawasan Cagar Budaya tersebut dilanjutkan dengan program pemberian status tanah masyarakat setempat. Dalam hal ini menuntut peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator maupun mediator antara "tuan tanah" dengan masyarakat setempat serta Otorita Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan di Pulau Batam.

Diharapkan dengan adanya kejelasan hak atas tanah tersebut, masyarakat setempat akan lebih peduli terhadap kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini berdampak pada dukungan dari masyarakat yang lebih besar terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung baik dari sumbang saran (persepsi) masyarakat, tenaga bahkan dari segi finansial.

- **Peningkatan Pendapatan Masyarakat**

Persepsi masyarakat terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung juga terkait dengan pendapatan masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat dapat diajak diskusi mengenai penataan kawasan di lingkungan tempat tinggalnya dan memberikan kontribusi dalam kegiatan penataan kawasan jika kebutuhan sehari-hari masyarakat belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat setempat sebagai nelayan yang sangat kecil. Selama ini mereka mencari ikan di lautan dangkal di sekitar Teluk Tering dengan nilai ekonomis hasil tangkapan yang rendah. Mereka belum sanggup untuk melaut di lautan

dalam dengan hasil tangkapan bernilai ekonomis tinggi karena keterbatasan alat tangkap berupa perahu tanpa motor.

Oleh karena itu, masyarakat berpendapat bahwa dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, tahap awal yang perlu diatasi adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Mereka mengharapkan pemerintah dapat menyediakan kredit usaha maupun pinjaman modal bergulir yang digunakan untuk pengadaan motor tempel yang dapat digunakan oleh nelayan setempat untuk melaut di laut dalam. Hasil yang didapat tentunya jauh lebih besar, sehingga dapat digunakan untuk pengembalian modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan lain di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, tentunya akan meningkatkan kontribusi masyarakat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, terutama dari segi finansial. Sehingga dukungan masyarakat setempat dalam Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung akan meningkat pula.

- **Pengelolaan dan Penataan Obyek Wisata Rakyat**

Wisata rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat selama ini telah memberlakukan retribusi parkir terhadap para wisatawan (mayoritas wisatawan lokal) yang berkunjung ke lokasi wisata tersebut. Kondisi yang ada saat ini, lokasi wisata tersebut juga telah dilengkapi dengan lahan parkir dan warung-warung milik masyarakat setempat yang menyediakan makanan dan minuman bagi wisatawan. Namun demikian, dalam

pengelolaan wisata ke depan, perlu adanya konsep pengembangan yang jelas dari pemerintah setempat. Jangan sampai dengan adanya pengembangan obyek wisata rakyat, masyarakat setempat hanya sebagai penonton saja tanpa adanya peran dari masyarakat setempat. Selain itu, wisata yang berkembang tidak justru menimbulkan kemaksiatan di kawasan wisata rakyat tersebut, sebagaimana *image* negatif yang disandang dunia pariwisata Indonesia maupun dunia pada umumnya. Kegiatan wisata yang diperkenankan merupakan kegiatan wisata alam (memancing, berenang, melihat pemandangan maupun melihat matahari terbit/ *sunrise*) maupun kegiatan wisata budaya (rumah tradisional Melayu, seni tradisional, kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta upacara adat Melayu).

Pengelolaan dan penataan obyek wisata rakyat diperlukan untuk mencapai konsep pengembangan wisata di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Penataan obyek wisata berupa peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang dapat mendukung perkembangan wisata rakyat tersebut, sehingga karakteristik wisatawan yang berkunjung tidak lagi sebatas wisatawan lokal, namun juga wisatawan domestik yang berasal dari luar Kota Batam. Sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan berupa tempat berteduh baik *gazebo* maupun tanaman peneduh, toilet jalan masuk menuju obyek wisata maupun penginapan.

Untuk tanaman peneduh dapat diserahkan kepada masyarakat setempat/pengelola wisata rakyat dalam hal pengadaan dan

pemeliharaannya. Selain itu, dalam penyediaan penginapan dapat menggunakan rumah-rumah penduduk setempat yang digunakan sebagai *homestay* yang memenuhi standar penginapan. Sedangkan penataan obyek wisata berupa pembangunan *gazebo*, toilet serta peningkatan jalan masuk ke obyek wisata, perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah setempat dalam penataan kawasan wisata tersebut.

b. Tahap Lanjutan

Tahapan lanjutan merupakan tahapan yang dapat dilakukan setelah permasalahan mendasar yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dapat teratasi. Tahapan lanjutan merupakan

- **Jalan/Aksesibilitas**

Jalan desa di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini berupa jalan tanah, sehingga pada musim hujan sulit dilalui kendaraan roda empat, bahkan kendaraan roda dua. Hal ini diperparah dengan kondisi jalan dari Kampung Melayu Tanjung Buntung sampai dengan Restoran *Golden Prawn*. Kondisi ruas jalan tersebut berlubang-lubang, sehingga pada musim hujan membentuk kubangan besar di tengah jalan. Diharapkan dengan adanya campur tangan dari pemerintah setempat dalam hal penanganan permasalahan jalan tersebut membawa dampak positif khususnya dalam peningkatan wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata rakyat pada khususnya, maupun pengembangan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung pada umumnya. Diharapkan

Untuk jalan lingkungan (internal) kawasan diperlukan pembatasan kendaraan bermotor yang melalui kawasan tersebut. Hal ini dikarenakan pola permukiman penduduk yang berkelompok (*cluster*) serta kepadatan bangunan yang cukup tinggi.

- **Penataan Sistem Drainase Kawasan**

Penataan sistem drainase kawasan diperlukan karena sistem drainase di kawasan studi tersumbat dan tertimbun tanah. Hal ini mengakibatkan banjir di kawasan studi saat musim hujan datang dan memperparah kerusakan jalan desa menuju Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Di samping itu, banjir di kawasan studi diperparah dengan adanya reklamasi pantai di sebelah timur kawasan studi (sekitar Teluk Tering) untuk lahan perumahan.

- **Penyediaan Sistem Pelayanan Air Bersih**

Kebutuhan air bersih untuk Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dari 3 perigi (sumur) untuk kebutuhan mandi dan mencuci, serta 2 perigi (sumur) untuk mencukupi kebutuhan air minum. Permasalahan yang timbul saat ini adalah beralihnya fungsi tangkapan air di perbukitan sebelah barat kawasan studi menjadi kawasan perumahan. Peralihan fungsi tersebut dikawatirkan akan berakibat pada berkurangnya sumber air bagi masyarakat setempat. Selain itu juga adanya intrusi air laut yang menyebabkan tingkat kesadahan yang cukup tinggi pada air di sumur penduduk tersebut. Terlebih lagi penambahan jumlah penduduk yang berdampak pada penambahan kebutuhan akan air bersih. Oleh karena itu

perlu adanya suplai jaringan air bersih dari PT. Adhya Tirta Batam (ATB) sebagai perusahaan yang menyediakan air bersih di Kota Batam. Suplai jaringan air bersih tersebut selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung (wisatawan) di obyek wisata rakyat.

- **Penyediaan Sistem Pelayanan Listrik**

Kebutuhan akan listrik di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung saat ini dipenuhi dengan aki yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Jaringan listrik saat ini belum masuk ke Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung karena keterbatasan ekonomi penduduk setempat yang tidak mampu untuk mengajukan permohonan pemasangan baru. Oleh karena itu, diperlukan teknologi terapan (tepat guna) yang dapat membantu masyarakat setempat dalam pemenuhan akan kebutuhan listrik. Teknologi terapan tersebut misalnya berupa pembangkit listrik tenaga angin yang dapat diterapkan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung mengingat keberadaan kawasan tersebut pada daerah pesisir. Dalam pengelolaan dan operasionalnya secara kolektif, artinya biaya yang diperlukan untuk operasional perangkat tersebut ditanggung bersama-sama. Selain itu, dalam penggunaannya diutamakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

- **Penyediaan Sanitasi Lingkungan**

Sanitasi lingkungan di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung tergolong buruk karena kesadaran penduduk akan kesehatan masih rendah. Selama ini limbah pribadi (MCK) dari masyarakat setempat dilakukan dan dibuang ke laut. Oleh karena itu, perlu adanya pengadaan MCK secara komunal yang disertai dengan sosialisasi serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya kesehatan lingkungan. MCK umum tersebut selain dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, juga dapat digunakan bagi wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata rakyat.

- **Pembangunan Pasar Ikan dan TPI**

Pasar ikan dan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat setempat yang merupakan masyarakat nelayan. Dalam pembangunannya, fasilitas pasar ikan dan TPI tersebut harus terkait dengan keberadaan pelantar yang saat ini telah ada. Diharapkan dengan adanya pasar ikan dan TPI di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung tersebut, masyarakat setempat dapat memasarkan hasil tangkapan ikannya tanpa adanya biaya tambahan berupa ongkos transportasi yang dikeluarkan untuk menjual hasil tangkapannya di tempat lain. Selain itu, dengan adanya pasar ikan dan TPI tersebut, fungsi dari pelantar yang ada saat ini dapat dimanfaatkan kembali, sehingga investasi dan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sia-sia.

- **Perbaikan Sarana Olah Raga dan Sarana Keagamaan**

Perbaiki sarana olah raga yang diperlukan dalam hal penataan kawasan berupa perbaikan lapangan volley. Sedangkan sarana keagamaan yang perlu ditingkatkan berupa perbaikan masjid, TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an) serta perbaikan madrasah.

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam hal Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung tersebut di atas, maka memerlukan dukungan pendanaan yang cukup besar. Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah dalam penataan kawasan yang terbatas, maka perlu adanya dukungan pendanaan dari pihak lain. Sedangkan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, dukungan pendanaan dari masyarakat juga sangat terbatas. Namun demikian, terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh masyarakat berkaitan dengan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang dapat mendukung program penataan kawasan antara lain:

1. Wisata rakyat

Pengelolaan kawasan wisata di Kampung Melayu Tanjung Buntung yang dilakukan oleh masyarakat setempat, selama ini telah berkontribusi terhadap penataan kawasan. Namun demikian, karena pengelolaan wisata rakyat yang belum profesional, maka kontribusinya terhadap penataan kawasan masih terlalu kecil. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama pengelolaan kawasan wisata rakyat antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat setempat bahkan bisa juga melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan kawasan wisata rakyat. Namun demikian, dalam pengelolaan kawasan wisata rakyat tersebut tidak

melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat, seperti: melanggar kesusilaan. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat dalam penataan kawasan tersebut berupa manajemen pengelolaan kawasan wisata rakyat dan fungsi kontrol terhadap upaya penataan dan pengembangan kawasan wisata rakyat tersebut.

2. Tenaga

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, menyebabkan kontribusi masyarakat terhadap program penataan kawasan terutama dalam hal pendanaan tergolong rendah. Namun demikian berdasarkan kelompok usia, masyarakat setempat sebagian besar termasuk dalam kategori usia produktif. Oleh karenanya, tenaga yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat dimanfaatkan dalam program penataan kawasan, terutama program-program yang bersifat padat karya.

3. Waktu luang

Adanya waktu luang dari masyarakat setempat setelah melaut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penataan kawasan, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses implementasi program.

4. Kelembagaan

Adanya kelembagaan-kelembagaan yang ada di Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung baik lembaga formal dan non formal dapat mendukung program penataan kawasan di Kampung Melayu Tanjung Buntung. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Pemerintah dapat mensosialisasikan

program-program penataan kawasan yang akan dilakukan, sedangkan pemerintah dapat menyerap informasi, aspirasi, tanggapan dan saran dari masyarakat setempat berkaitan dengan program Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kampung Melayu Tanjung Buntung merupakan salah satu kampung Melayu yang ada di Kota Batam yang penduduknya mayoritas adalah nelayan. Seperti halnya kampung Melayu lainnya, permasalahan utama yang mendasar adalah Sumber Daya Manusia dengan taraf kehidupan masyarakatnya yang rendah dan fasilitas dasar juga belum sepenuhnya terpenuhi. Di samping itu, lahan pemukiman masyarakat Kampung Melayu tersebut juga belum jelas statusnya sampai saat ini. Hal ini disebabkan oleh karena Kawasan Kampung Melayu tersebut merupakan kawasan yang lahannya masih menjadi Hak Pengelolaan Otorita Batam.

Walaupun jika dilihat dari segi jumlah penduduk yang sedikit dan mayoritas penduduknya adalah nelayan dengan waktu yang dihabiskan lebih banyak di laut, Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam terkesan mubazir. Namun penataan kawasan kampung Melayu di Kota Batam sebenarnya adalah bersifat strategis, karena merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kota Batam dalam upaya melestarikan adat istiadat dan budaya Melayu. Berdasarkan hasil pengamatan dari perkembangan Kampung Melayu yang ada, hanya Kampung Melayu Tanjung Buntunglah yang belum tersentuh pembangunannya oleh Pemerintah Kota dibandingkan dengan Kampung Melayu lainnya seperti: Batu Besar, Tanjung Riau maupun Patam yang telah memiliki infrastruktur, fasilitas

umum dan sosial yang lengkap. Sebenarnya pertimbangan lain Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan penataan kawasan ini adalah adanya potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut berupa pantai yang sangat indah yang apabila dikembangkan diharapkan akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Saat ini potensi wisata tersebut dikelola oleh masyarakat setempat sebagai obyek wisata rakyat. Dana yang terkumpul dari retribusi parkir kendaraan tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung.

Kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung Kota Batam saat ini telah tersusun dalam bentuk Rencana Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Namun, dalam implementasi dan pelaksanaannya mengalami kendala-kendala sehingga program/kegiatan tersebut belum dapat terlaksana. Salah satu kendala yang ada adalah status lahan yang belum jelas, di samping itu juga adanya anggapan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penataan kawasan. Sehingga perencanaan kawasan tersebut masih bersifat *top down planning*.

Dari kajian yang telah dilaksanakan, berdasarkan persepsi masyarakat Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam, masyarakat setempat pada dasarnya setuju berkaitan dengan kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Berdasarkan kajian persepsi masyarakat tersebut permasalahan pokok di samping mengenai status kepemilikan lahan, juga adanya permasalahan yang berkaitan sarana dan prasarana lingkungan seperti: jalan desa, saluran drainase, air bersih, jaringan listrik, sanitasi lingkungan serta fasilitas umum dan

fasilitas sosial lainnya juga perlu segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Batam.

Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan yang terdiri dari: faktor karakteristik masyarakat, faktor kelembagaan dan faktor keruangan.

Dari kajian-kajian sebelumnya berupa persepsi masyarakat terhadap Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung dan faktor-faktor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan berupa faktor karakteristik masyarakat, faktor kelembagaan dan faktor keruangan, dilakukan kajian mengenai rekomendasi penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa program-program yang harus dilakukan dan bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diberikan dalam rangka Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung. Program-program yang harus dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ada dan skala prioritas kegiatan/program tersebut. Berdasarkan skala prioritas, program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa:

A. Tahap Awal

- Kejelasan hak atas tanah
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Pengelolaan dan penataan obyek wisata rakyat

B. Tahap Lanjutan

- Peningkatan jalan dan aksesibilitas
- Penataan sistem drainase kawasan

- Penyediaan sistem pelayanan air bersih
- Penyediaan sistem pelayanan listrik
- Penyediaan sanitasi lingkungan
- Pembangunan pasar ikan dan TPI
- Perbaikan sarana olah raga dan sarana keagamaan

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung berupa:

- Manajemen pengelolaan kawasan wisata rakyat dan fungsi kontrol terhadap proses penataan dan pengembangan wisata rakyat.
- Tenaga yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat dimanfaatkan dalam program penataan kawasan, terutama program-program yang bersifat padat karya.
- Waktu luang yang dimiliki oleh masyarakat selepas melaut yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penataan kawasan, baik dalam proses perencanaan maupun dalam proses implementasi program.
- Sumbangan pemikiran, usulan program maupun informasi berkaitan permasalahan yang ada di kawasan studi melalui lembaga-lembaga formal dan informal.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil kajian dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi agar Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung

Buntung dapat terlaksana dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain:

1. Dalam melaksanakan proses perencanaan perlu melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat sejak awal, pendekatan yang sesuai adalah pola bottom up planning yang sampai saat ini masih dilaksanakan dalam proses perencanaan. Adanya pertemuan rutin masyarakat dengan RT dan RW melalui pengajian rutin maupun musyawarah desa/kelurahan dan UDKP merupakan sarana yang efektif dalam penjangkauan aspirasi masyarakat dalam upaya mengkaji kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini perlu dipertahankan oleh seluruh Kepala wilayah setempat.
2. Budaya dan adat istiadat Melayu yang telah mengakar pada masyarakat perlu untuk dilestarikan melalui kajian lebih lanjut potensi pariwisata yang tidak hanya potensi pantai yang indah tapi juga potensi budaya yang ada. Disamping itu juga diharapkan Pemerintah Kota untuk melaksanakan revitalisasi budaya Melayu secara bertahap khususnya untuk kawasan-kawasan kampung Melayu yang ada di Kota Batam agar budaya Melayu *tak kan hilang dibumi* dan tetap lestari. Revitalisasi Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung perlu adanya kegiatan dan program pendahuluan yang berupa Penetapan Kawasan Cagar Budaya Kampung Melayu Tanjung Buntung oleh Pemerintah Kota Batam serta pemberian kejelasan status tanah kepada masyarakat setempat sehingga program dan kegiatan yang dilakukan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat baik berupa sumbang saran (persepsi), tenaga bahkan dukungan finansial.

3. Belum dapat di implementasikannya penataan kawasan di kampung Melayu Tanjung Buntung ini merupakan salah satu bentuk perencanaan yang dilaksanakan tidak melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak peduli dan apatis terhadap hasil perencanaan. Kajian pendekatan partisipatif dalam perencanaan kiranya perlu secara bertahap dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk dapat menghasilkan mutu perencanaan yang dapat diimplementasikan dan didukung oleh masyarakat.
4. Perlunya dukungan berbagai pihak dalam kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung baik dari Pemerintah Daerah maupun dari masyarakat setempat. Dukungan dari Pemerintah Daerah terutama dari segi pendanaan dan dari aspek kebijakan daerah. Sedangkan dukungan dari masyarakat setempat berupa pemikiran, informasi dan usulan program serta tenaga yang diberikan.
5. Khusus untuk kawasan kampung Melayu Tanjung Buntung ini perlunya studi lanjutan mengenai potensi obyek wisata rakyat dan manajemen pengelolaan obyek wisata, sehingga dapat dijadikan sebagai "ujung tombak" kegiatan Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, mengingat adanya kontribusi pendanaan dari pengelolaan obyek wisata rakyat tersebut. Disamping itu juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Pemerintah Kota perlu melaksanakan studi mengenai kelayakan pembangunan Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan Pasar Ikan di Kampung Melayu Tanjung Buntung yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pembangunannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budihardjo, Eko. 1999. Kota Berkelanjutan. Bandung: Penerbit Alumni.
- Burke, Edmund M. 2004. Sebuah Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Kota (Terjemahan *A Participatory Approach to Urban Planning* oleh Puji Lestari dkk.). Bandung: Penerbit Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Dahl. 1963. *Democracy and Its Critics*.
- Hadi, Sudharto P. 2001. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
- Kodoatie, Robert J. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: PT. Prasetia Widya Pratama.
- Masri, Singarimbu. 1982. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Miles, Matthew B. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru (Terjemahan *Qualitative Data Analysis* oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Nurmandi, Achmad. 1999. Manajemen Perkotaan: Aktor, Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Lingkar Bangsa.

Pradhanawati, Ari. 2004. Pemberdayaan. Materi Kuliah Perencanaan Pembangunan Masyarakat Kota.

Sugiyono. 2002. Statistik untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta.

Jayadinata, Johara T. 1986. Bandung: Penerbit ITB.

BUKU DATA/LAPORAN/RENCANA

Pemerintah Kota Batam. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam Tahun 2001-2011.

Pemerintah Kota Batam. 2000. Penataan Kawasan Kampung Melayu Tanjung Buntung, Kota Batam.

PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah .

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/756/OTDA tentang Penyusunan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal.